

BERITA DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 10

TAHUN : 2026

PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Bapperida adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bekasi.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Pusat dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
8. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-Perangkat Daerah sebelum disepakati oleh DPRD.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah selanjutnya disebut RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Kota Bekasi yang berisi program dan kegiatan suatu Perangkat Daerah serta pagu anggaran sementara yang disusun berdasarkan KUA dan PPAS
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah rencana pembangunan tahunan Perangkat Daerah yang merupakan dokumen Tahunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah dokumen rencana penerimaan dan pengeluaran pada pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

Maksud penyusunan RKPD untuk mewujudkan sinergitas dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumberdaya dalam pembangunan daerah Tahun 2027.

Pasal 3

RKPD sebagaimana dimaksud Pasal 2 mempunyai tujuan sebagai:

- a. pedoman Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027;
- b. pedoman dalam rangka penyusunan KUA-APBD dan PPAS Tahun 2027;
- c. pedoman penyusunan rancangan APBD Tahun 2027; dan
- d. pedoman penyusunan RKA Perangkat Daerah Tahun 2027.

BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 4

- (1) RKPD disusun dengan sistematika terdiri atas:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum;
 - c. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
 - d. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
 - e. rencana kerja dan pendanaan Daerah;
 - f. kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - g. memuat penutup.
- (2) Ketentuan mengenai RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan, Kepala Perangkat Daerah melakukan pemantauan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah menugaskan pejabat yang menangani perencanaan beserta operator Perangkat Daerah untuk menginput progress/realisasi capaian kinerja keluaran (output) ke dalam Aplikasi E-Monev setiap triwulan pada minggu pertama triwulan selanjutnya.
- (3) Bapperida menghimpun dan menganalisis hasil capaian pelaksanaan rencana pembangunan dari setiap Perangkat Daerah.

Pasal 6

- (1) Bapperida menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan bagi penyusunan RKPD Tahun berikutnya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 3 Juli 2026

WALI KOTA BEKASI,

Ttd

TRI ADHianto TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 3 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

JUNAEDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2026 NOMOR 10

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2027

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam kerangka mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045, Kota Bekasi sesuai kewenangannya diharuskan menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) bahwa pemerintah daerah harus menyusun dokumen perencanaan jangka panjang berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), jangka menengah berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta jangka pendek berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Cita-cita Indonesia Emas 2045 dimaksud sejalan dengan cita-cita Kota Bekasi sebagaimana tertuang dalam RPJPD Tahun 2025-2045 yaitu Kota Bekasi Maju, Berdaya Saing, Berkelanjutan, dan Ihsan. Cita-cita tersebut pada dasarnya juga sejalan dengan tujuan pembangunan daerah yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tujuan pembangunan daerah itu yaitu untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Visi jangka panjang yang diterjemahkan menjadi arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan dalam RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025-2045 menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029. Adapun visi RPJMD tersebut adalah “Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera”.

RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 tersebut kemudian dioperasionalkan ke dalam RKPD, sehingga pada penyusunan RKPD tahun 2027 selain memedomani RPJMD juga mengacu kepada RKP dan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2027. RKPD tersebut pada dasarnya merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD Kota Bekasi Tahun 2027 yang merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan daerah dan nasional, juga disusun berdasarkan hasil evaluasi kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya.

Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD ini mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu sebagai berikut:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan KUA dan PPAS yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan
4. Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka penyusunan RKPD dilakukan melalui serangkaian tahapan dimulai dari persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan musrenbang, perumusan rancangan akhir, dan penetapan dengan Peraturan Wali Kota.

Penyusunan RKPD Kota Bekasi Tahun 2027 diharapkan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027. Selain itu, dengan disusunnya RKPD Kota Bekasi Tahun 2027 diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat berkontribusi sesuai dengan perannya dalam rangka melaksanakan pembangunan sesuai dengan RKPD ini.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Kota Bekasi Tahun 2027, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023/Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6866);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6881);
14. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
22. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 346);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2580 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 9);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 Nomor 7);

28. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
29. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 13);
30. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 7);
31. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 12); dan
32. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 Nomor 10).

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN

Rencana pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Artinya bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun dengan memedomani dan memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dokumen perencanaan lainnya dapat berupa dokumen perencanaan pada jenjang di atasnya (provinsi dan nasional) maupun dokumen sektoral lainnya yang setara dengan dokumen yang disusun dalam konteks kota.

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2024-2044 merupakan salah satu yang harus dipedomani. Tujuan memedomani RTRW ini yaitu untuk menyelaraskan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan rencana strategis kota ke dalam RKPD Kota Bekasi Tahun 2027.

Dokumen perencanaan jangka menengah yang juga harus dipedomani yaitu RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029. Dokumen tersebut perlu diakomodasi dalam RKPD Kota Bekasi Tahun 2027 terutama berkaitan dengan tujuan, sasaran, prioritas pembangunan, dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk dokumen tahunan yang dipedomani yaitu berkaitan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 dan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2027. Kedua dokumen ini perlu dipedomani untuk menyelaraskan tema, prioritas pembangunan, dan kinerja sehingga Kota Bekasi dapat memberikan kontribusi sesuai dengan kewenangannya.

Selain dokumen di atas, penyusunan RKPD Kota Bekasi Tahun 2027 juga harus memperhatikan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD periode sebelumnya sebagai bagian masukan untuk perumusan Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah.

RKPD merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan menjadi pedoman Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan penentuan Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan APBD

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan RKPD Kota Bekasi Tahun 2027 adalah untuk memberikan pedoman perencanaan dan penganggaran pembangunan tahun 2027 dan sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan serta sasaran RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029. Adapun tujuan penyusunan RKPD Kota Bekasi Tahun 2027 adalah:

1. Memberikan gambaran kondisi daerah dalam rangka mengoptimalkan potensi dan peluang daerah sebagai modalitas dalam pelaksanaan pembangunan Kota Bekasi Tahun 2027;
2. Menjamin keselarasan RKPD Kota Bekasi Tahun 2027 dengan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029, RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2027 dan RKP Tahun 2027;
3. Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027; dan
4. Memberikan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Bekasi Tahun 2027.

1.5 SISTEMATIKA

Dokumen RKPD Kota Bekasi Tahun 2027 ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi penjelasan terkait latar belakang penyusunan, dasar hukum yang digunakan, keterkaitan antar dokumen perencanaan, maksud dan tujuan penyusunan serta sistematika penyajian dokumen.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini berisi penjelasan terkait gambaran umum kondisi daerah meliputi evaluasi capaian kinerja daerah berupa Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD), pencapaian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), tematik pembangunan, permasalahan dan isu strategis pembangunan, dan telaah pokok-pokok pikiran DPRD.

Bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

Bab ini berisi penjelasan terkait kondisi ekonomi daerah tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan yang antara lain mencakup kerangka ekonomi dan sektor yang mempengaruhi Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) serta sumber keuangan daerah (Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah) untuk menggambarkan kondisi fiskal daerah.

Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Bab ini berisi penjelasan terkait tujuan dan sasaran pembangunan daerah, tema dan prioritas pembangunan, arah kebijakan, dan program prioritas daerah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan

Bab ini berisi rencana program, kegiatan dan subkegiatan daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan di RPJMD. Selain itu, pada bab ini diuraikan rencana program, kegiatan dan subkegiatan dalam rangka pencapaian target nasional, kontribusinya terhadap prioritas provinsi, dan tematik pembangunan.

Bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Bab ini menjelaskan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD).

Bab VII Penutup

Bab ini berisi tentang kaidah pelaksanaan RKPD Kota Bekasi Tahun 2027.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 KONDISI UMUM DAERAH

2.1.1 POSISI DAN PERAN STRATEGIS DAERAH

Kota Bekasi merupakan salah satu kota yang menjadi bagian dari Megapolitan Jabodetabek. Bahkan Kota Bekasi juga menjadi kota satelit dengan jumlah penduduk terbanyak se-Indonesia. Sebagai kota yang berkembang menjadi tempat tinggal kaum urban, Kota Bekasi yang juga sering dijuluki sebagai Kota Patriot atau Kota Pejuang, merupakan bagian dari perlintasan atau poros Sumatera - Jakarta - Jawa Tengah - Jawa Timur maupun poros Jakarta - Bandung.

Kota Bekasi menjadi salah satu kota yang memiliki perkembangan yang sangat pesat. Daerah yang dulunya hanya berupa sawah, saat ini telah disulap menjadi kota dengan berbagai infrastruktur yang sangat memadai. Kota Bekasi sudah dilintasi berbagai transportasi publik seperti kereta *Commuter Line*, LRT serta berbagai transportasi umum lainnya. Selain itu, keberadaan jalan tol juga makin menunjang mobilitas masyarakat.

Mobilitas masyarakat yang tinggi di Kota Bekasi tercermin dari kegiatan komuter di Metropolitan Jakarta. Pada tahun 2023, terdapat 258.759 kegiatan komuter yang memasuki Kota Bekasi dari daerah-daerah lainnya di Metropolitan Jakarta. Kegiatan komuter tersebut terutama berasal dari Kabupaten Bekasi (55,2 persen) dan Kota Administrasi Jakarta Timur (20,3 persen). Tingginya komuter yang masuk di Kota Bekasi menunjukkan bahwa Kota Bekasi saat ini sudah menjadi kota tujuan bekerja/pendidikan bagi daerah-daerah di sekitarnya.

Secara geografis Kota Bekasi merupakan daerah perbatasan di Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi DKI Jakarta yang berada pada 106°48'28" - 107°27'29" Bujur Timur dan 6°10'6" - 6°30'6" Lintang Selatan. Kota Bekasi terdiri atas 12 kecamatan dan 56 kelurahan, memiliki luas wilayah sekitar 213,1174 km² atau 21.311,74 ha, dengan batas administrasi sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Bekasi;
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bogor dan Kota Depok;
- Sebelah Barat : Provinsi Daerah Khusus Jakarta; dan

- Sebelah Timur : Kabupaten Bekasi.

Secara fisik geografis, ketinggian wilayah di Kota Bekasi menunjukkan variasi yang cukup signifikan, berkisar antara 28 hingga 110 meter di atas permukaan laut. Wilayah Kota Bekasi dialiri 3 sungai utama yaitu Sungai Cakung, Sungai Bekasi dan Sungai Sunter, beserta anak-anak sungainya. Sungai Bekasi mempunyai hulu di Sungai Cikeas yang berasal dari gunung pada ketinggian kurang lebih 1.500 meter dari permukaan air. Limpasan air permukaan di setiap kecamatan di Kota Bekasi rata-rata sekitar 33,92 juta m³/tahun.

Penggunaan lahan Kota Bekasi didominasi oleh permukiman teratur (perumahan) dan permukiman tidak teratur yang dibangun secara individu. Permukiman teratur yang dikembangkan developer banyak dikembangkan di Kota Bekasi dengan tingkat kepadatan cukup tinggi yang memanfaatkan potensi aksesibilitas jalan arteri dan kolektor primer yang strategis untuk menampung limpahan penduduk yang bekerja di Jakarta dan di kota-kota sekitar Kota Bekasi. Penggunaan lahan terbangun lainnya diperuntukkan untuk kawasan komersial, industri, fasilitas pelayanan umum, kawasan campuran, pemerintahan, perkantoran dan infrastruktur pendukung kegiatan perkotaan.

2.1.2 POTENSI PENGEMBANGAN WILAYAH

Dalam konteks Nasional, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kota Bekasi merupakan bagian Kawasan Strategis Nasional yaitu Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur termasuk Kepulauan Seribu (Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat). Kota Bekasi juga merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN), yang dalam peraturan tersebut dijelaskan sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan berskala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Dan Cianjur, kedudukan Kota Bekasi dalam konteks Jabodetabekpunjur, Kawasan Perkotaan Bekasi memiliki fungsi utama sebagai: pusat pemerintahan kota dan/atau kecamatan; pusat perdagangan dan jasa skala regional; pusat pelayanan kesehatan; pusat pelayanan pendidikan tinggi; pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional; dan pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara.

Dalam konteks Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 – 2042, Kota Bekasi diarahkan sebagai PKN yang memiliki peran sebagai pusat koleksi dan distribusi skala internasional, nasional atau beberapa provinsi yaitu Kawasan Perkotaan Bodebek. Selain itu, Kota Bekasi juga diarahkan untuk menjadi simpul pelayanan dan jasa perkotaan, serta mengembangkan sektor perdagangan, jasa dan industri padat tenaga kerja.

Adapun berdasarkan Perda Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2024 tentang RTRW Kota Bekasi Tahun 2024-2044, Kota Bekasi diarahkan sebagai tempat hunian dan usaha kreatif yang nyaman dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan. Dalam rencana struktur ruang, sistem pelayanan perkotaan Kota Bekasi yaitu:

- (1) Penetapan PPK, yang berada di koridor Jalan Sudirman-Juanda-Cut Meutia-Ahmad Yani, koridor Jalan Siliwangi-Jalan Pekayon Jaya-Jalan Perjuangan-Jalan Noer Ali-Jalan Muchtar Thabrani dengan fungsi pusat pelayanan pemerintahan, kesehatan, pendidikan, pusat perdagangan dan jasa, pusat hiburan dan rekreasi dinamakan *Central Business District* (CBD) Kota Bekasi.
- (2) Penetapan SPPK meliputi:
 - a. SPPK Pondokgede berada di sekitar Kelurahan Jatiwaringin mencakup wilayah pelayanan Kelurahan Jaticempaka, Jatibening Baru, Jatibening, Jatiwaringin, Jatimakmur dengan fungsi pusat pemerintahan skala kecamatan, perdagangan skala grosir dan retail berkelompok, pusat jasa dan pusat pendidikan;
 - b. SPPK Bekasi Utara berada di sekitar di Kelurahan Perwira mencakup wilayah pelayanan Kelurahan Kaliabang Tengah, Harapanjaya, Perwira, Teluk Pucung, Harapanbaru, Margamulya dengan fungsi pusat pemerintahan skala kecamatan, pusat permukiman, pusat perdagangan dan jasa;
 - c. SPPK Jatisampurna berada di sekitar Kelurahan Jatikarya mencakup wilayah pelayanan Kelurahan Jatisampurna, Jatirangga, Jatiraden, Jatikarya, Jatiranggon dengan fungsi pelayanan utama sebagai pusat pemerintahan skala kecamatan, pusat permukiman skala besar, pusat perdagangan dan jasa;
 - d. SPPK Mustikajaya berada di sekitar Kelurahan Pedurenan mencakup wilayah pelayanan Kelurahan Mustikajaya, Mustikasari, Pedurenan, Cimuning dengan fungsi pusat pemerintahan skala kecamatan, pusat industri dan jasa pergudangan, pusat permukiman skala besar, pusat prasarana persampahan (TPST DKI Bantargebang).
 - e. Penetapan PPL yang merupakan pusat pelayanan pemerintahan dan perdagangan dengan skala pelayanan kelurahan dan/atau lingkungan perumahan tersebar di seluruh kecamatan.

Berdasarkan uraian di atas, lokasi Kota Bekasi yang strategis kemudian menyebabkan tingkat persaingan penggunaan lahan menjadi sangat tinggi. Dampak langsung dari tingginya penggunaan lahan adalah semakin langkanya ketersediaan lahan untuk pengembangan kota. Kerapatan bangunan pada tingkat sedang dan tinggi di Kota Bekasi berubah dari sekitar 54 persen pada tahun 2001 menjadi 73 persen pada tahun 2021 (Dewi, Taryana dan Astuti, 2023). Hal ini mengindikasikan bahwa kawasan terbangun di Kota Bekasi berkembang dengan sangat tinggi. Penggunaan lahan yang tinggi juga berdampak pada meningkatnya harga lahan di Kota Bekasi. Keterbatasan lahan disertai dengan tingginya harga lahan menjadi tantangan utama dalam hal penyediaan lahan untuk kebutuhan pelayanan publik.

2.1.3 POTENSI SUMBER DAYA ALAM

Dengan karakter perkotaan yang dominan, potensi sumber daya alam yang ada di Kota Bekasi sangat terbatas. Potensi sumber daya alam tersebut seperti pertambangan gas dengan luas kurang lebih 3,44 ha yang terletak di Kelurahan Jatiraden Kecamatan Jatisampurna.

Sumber daya air di Bekasi sangat vital, terutama untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat dan sektor pertanian. Kota Bekasi terletak pada zona Cekungan Air Bawah Tanah Bekasi Karawang dan pada 3 Daerah aliran Sungai (DAS) utama, yaitu DAS Bekasi, DAS Sunter, dan DAS Cakung. Potensi imbuhan air tanah bebas pada Cekungan Air Bawah Tanah (CABT) Bekasi Karawang adalah sebesar 47,0256 m³/detik. Potensi air permukaan (Sungai Bekasi) yang dapat diandalkan di Kota Bekasi saat ini adalah 9.16 m³/detik namun dengan adanya tambahan pasokan dari Jatiluhur melalui Saluran Induk Tarum Barat debit yang diandalkan dapat mencapai 44,62 m³/detik.

Di sisi lain, tanah di Kota Bekasi sebagian besar merupakan tanah aluvial yang terbentuk dari endapan sungai seperti Sungai Bekasi dan Sungai Cikarang. Tanah aluvial cenderung subur, gembur, dan kaya bahan organik, sangat cocok untuk tanaman pangan, terutama padi. Namun, konversi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian, seperti perumahan dan kawasan industri, menyebabkan penurunan kualitas tanah dan berdampak negatif bagi ketahanan pangan. Pemerintah Kota Bekasi telah menerapkan kebijakan zonasi untuk melindungi lahan pertanian yang masih ada. Sebagian lahan di pinggiran (terutama Bekasi Timur dan Selatan) masih bisa dikembangkan untuk pertanian. Kondisi ini perlu didukung dengan kebijakan pertanian perkotaan (*urban farming*) untuk mendukung ketahanan pangan kota seiring dengan alih fungsi lahan yang tidak bisa dihindari.

2.1.4 DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP

Daya dukung air merupakan kemampuan sumber daya air untuk memenuhi suatu kebutuhan dengan meninjau besarnya ketersediaan air. Hasil analisis potensi ketersediaan air di Kota Bekasi dengan menggunakan data ketersediaan berdasarkan data SK.147/2023, luasan tata guna lahan eksisting dan luasan guna lahan pola ruang RDTR Kota Bekasi, ketersediaan air tahun 2022 sebesar 130.844.849,84 m³/tahun.

Dengan kebutuhan air Kota Bekasi sebesar 301.284.051,97 m³/tahun, maka terdapat selisih yang cukup besar yaitu mencapai 170.456.164,16 m³/tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa daya dukung air/ketersediaan air pada tahun 2022 secara keseluruhan sudah melampaui ambang batas. Jika dilihat dari luasannya, luas wilayah yang belum melampaui ambang batas yaitu sebesar 1.560,61 ha sedangkan luas wilayah yang sudah melampaui sebesar 19.742,98 ha.

Luas sawah eksisting di Kota Bekasi yaitu seluas 276,78 ha. Dengan asumsi 1 kg = 1300 kkal, maka ketersediaan pangannya sebesar 2.610.799.620,01 kkal/tahun. Dari hasil perhitungan, kebutuhan pangan Kota Bekasi terus meningkat seiring dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk. Selisih ketersediaan pangan dan kebutuhan pangan di Kota Bekasi tahun 2022 dengan sebesar 2.030.095.735.379,97 kkal. Hal ini

mengindikasikan bahwa status daya dukung pangan Kota Bekasi sudah terlampaui.

2.1.5 JUMLAH DAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK

Pada tahun 2025 penduduk Kota Bekasi berdasarkan hasil proyeksi dari SP2020 sebanyak 2,648 juta jiwa. Di antara seluruh kabupaten/kota, jumlah penduduk tertinggi adalah Kabupaten Bogor (5,721 juta jiwa) dan Kabupaten Bandung (3,783 juta jiwa). Sementara di tingkat kota, Kota Bekasi menjadi kota dengan jumlah penduduk terbanyak melampaui Kota Bandung yang jumlah penduduknya sebesar 2,548 juta jiwa.

Jumlah penduduk kecamatan di Kota Bekasi tahun 2025 terbesar berada di Kecamatan Bekasi Utara yang dihuni sekitar 13,23 persen penduduk, diikuti Kecamatan Bekasi Barat dan Kecamatan Jatiasih, masing-masing 10,77 persen dan 10,35 persen. Sedangkan Kecamatan dengan populasi terkecil adalah Kecamatan Bantargebang dengan jumlah penduduk sekitar 4,26 persen.

Laju pertumbuhan penduduk Kota Bekasi periode 2020-2025 rata-rata sebesar 0,85 persen dengan laju pertumbuhan penduduk per kecamatan yang bervariasi. Terkait dengan kepadatan penduduk, sebagian besar wilayah Kecamatan di Kota Bekasi memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Dari 12 kecamatan, 9 diantaranya memiliki tingkat kepadatan penduduk lebih dari 10.000 jiwa/km². Kecamatan Bekasi Barat menjadi daerah terpadat dengan tingkat kepadatan mencapai 19 ribu jiwa/km².

Kepadatan penduduk tidak selalu berkorelasi langsung dengan jumlah penduduk, karena faktor luas wilayah juga mempengaruhi. Berdasarkan analisis kepadatan penduduk, terlihat bahwa beberapa kecamatan seperti Bekasi Barat, Bekasi Timur, Bekasi Utara dan Pondok Gede memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi, yaitu masing-masing sebesar 19,135; 17,829; 16,844 dan 14,488 ribu jiwa/km². Hal ini dimungkinkan karena perkembangan infrastruktur dan kegiatan ekonomi yang cukup pesat di wilayah-wilayah tersebut.

2.1.6 KOMPOSISI PENDUDUK

Komposisi penduduk Kota Bekasi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki selalu lebih banyak dari jumlah penduduk perempuan. Pada tahun 2025, jumlah penduduk laki-laki sebesar 1,328 juta jiwa dan perempuan 1,319 juta jiwa. Dengan demikian, angka *sex ratio* Kota Bekasi di tahun tersebut sebesar 100,69 yang artinya terdapat 101 penduduk laki-laki dalam setiap 100 penduduk perempuan.

Komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur Kota Bekasi cenderung muda, dengan mayoritas penduduk berada dalam rentang usia produktif. Kelompok usia 25-39 tahun memiliki jumlah penduduk tertinggi, dengan jumlah total 658.169 jiwa, atau sekitar 24,9 persen dari total penduduk. Selanjutnya, data menunjukkan adanya penurunan jumlah penduduk seiring bertambahnya kelompok usia. Ini mencerminkan tren global dalam proses penuaan penduduk juga terjadi di Kota Bekasi.

2.1.7 PENDUDUK KOMUTER

Kedekatan dengan Jakarta mengakibatkan banyak penduduk Kota Bekasi yang bekerja di Jakarta. Berdasarkan data BPS yang rilis setiap dua tahun sekali, pada tahun 2023, terdapat 466.260 penduduk Kota Bekasi (19,2 persen) yang melakukan komuter ke daerah lain di Metropolitan Jakarta. Dari angka tersebut, sebagian besar yaitu 68,24 persen penduduk komuter beraktivitas di Jakarta. Di antara komuter ini, 68,3 persen adalah laki-laki, sedangkan 31,7 persen adalah perempuan.

Tujuan utama dari kegiatan komuter adalah untuk bekerja yaitu sebesar 87,2 persen, sedangkan yang lainnya yaitu 12,8 persen untuk menempuh pendidikan (sekolah/kuliah/kursus). Dibandingkan dengan kota lainnya di sekitar Jakarta, persentase penduduk komuter Kota Bekasi adalah tertinggi kedua setelah Kota Depok. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Bekasi menjadi salah satu tujuan utama lokasi tempat tinggal bagi penduduk komuter di Metropolitan Jakarta.

Selain sebagai tempat tinggal, Kota Bekasi juga menjadi salah satu tujuan utama kegiatan komuter di Metropolitan Jakarta. Pada tahun 2023, terdapat 258.759 kegiatan komuter yang memasuki Kota Bekasi dari daerah-daerah lainnya di Metropolitan Jakarta. Kegiatan komuter tersebut terutama berasal dari Kabupaten Bekasi (55,2 persen) dan Kota Administrasi Jakarta Timur (20,3 persen). Angka komuter yang masuk ke Kota Bekasi merupakan tertinggi kedua setelah Kota Tangerang di antara kota-kota di sekitar Jakarta. Tingginya komuter masuk di Kota Bekasi menunjukkan bahwa Kota Bekasi saat ini sudah menjadi tujuan bekerja/pendidikan bagi daerah-daerah di sekitarnya.

2.2 CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN TEMATIK PEMBANGUNAN

2.2.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025

Secara keseluruhan, dari 22 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Bekasi Tahun 2025, sebanyak 18 indikator capaiannya >90 persen (sangat tinggi), 2 indikator capaiannya antara 76-90 persen (tinggi), 1 indikator capaiannya 66-75 persen, dan 1 indikator belum tersedia data capaiannya.

Berdasarkan tabel di atas, penjelasan capaian untuk masing-masing indikator diuraikan sebagai berikut:

1. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Kota Bekasi merupakan indikator baru yang mulai digunakan pada tahun 2025. Capaian IKLI Kota Bekasi sudah masuk dalam kategori capaian sangat tinggi, dengan capaian kinerja sebesar 103.66 persen dari target sebesar 68.00 poin dan terealisasi 70.49 poin. Jika dilihat dari Nilai Interval Konversi (NIK), nilai 70.49 masuk ke dalam mutu pelayanan C atau kinerja unit pelayanan kurang baik.

Pemerintah Kota Bekasi perlu melakukan upaya-upaya yang konsisten sesuai dengan arah kebijakan pembangunan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur Ke-PU-an. Upaya yang diprioritaskan terutama berkaitan dengan infrastruktur polder mengingat salah satu fungsinya dapat untuk mengendalikan banjir yang merupakan salah satu bencana yang sering melanda Kota Bekasi. Selain itu, peningkatan kerja sama dengan pemerintah

wilayah perbatasan seperti Jakarta, Bogor, Depok, dan Kabupaten Bekasi maupun pihak swasta perlu dilakukan.

2. Penurunan Intensitas Emisi GRK

Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan industri dan ekonomi tanpa harus menghentikan produksi. Semakin kecil intensitas emisi GRK, mengindikasikan kualitas pembangunan rendah karbon yang lebih baik. Penurunan intensitas emisi yang menurun menandakan aktivitas ekonomi yang dilakukan pada tahun tersebut menghasilkan emisi yang lebih rendah dibandingkan dengan kondisi awal/referensi.

Capaian Penurunan Intensitas Emisi GRK Kota Bekasi tahun 2025 belum dapat ditentukan karena belum adanya nilai realisasi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Namun demikian, langkah-langkah/kegiatan yang sudah dilakukan antara lain melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang mempunyai kontribusi terhadap penurunan emisi gas rumah kaca untuk menginput pada aplikasi AKSARA, untuk kemudian mendapatkan angka potensi penurunan emisi kumulatif.

3. Indeks Pembangunan Manusia

Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bekasi tahun 2025 mencapai 100.75 persen dari target sebesar 83,80 poin dan terealisasi sebesar 84,43 poin. Peningkatan IPM Kota Bekasi ini telah terjadi dalam kurun 5 tahun terakhir dan hal ini menunjukkan adanya komitmen dan upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Berbagai program pembangunan manusia yang diimplementasikan oleh Pemerintah Kota Bekasi dan pihak terkait, seperti peningkatan akses terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan yang lebih baik, serta peluang ekonomi yang lebih luas, kemungkinan besar telah berkontribusi dalam pencapaian ini.

Meskipun demikian, perbandingan dengan kota di sekitar Jakarta menunjukkan bahwa setiap kota memiliki tantangan dan potensi pembangunan manusia yang berbeda-beda. Oleh karena itu, perlu adanya kolaborasi antarwilayah dan pembelajaran bersama untuk terus meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh di seluruh wilayah sekitar Jakarta.

4. Prevalensi Stunting

Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) terakhir pada tahun 2024, prevalensi stunting pada balita secara nasional sekitar 19,8 persen. Sedangkan untuk capaian prevalensi stunting Kota Bekasi 9,20 persen. Namun realisasi capaian tahun 2025 belum ada data yang dikeluarkan oleh Kemenkes.

Kota Bekasi terus berupaya agar target zero stunting dapat tercapai. Upaya yang akan dilakukan tentunya memerlukan kesadaran kolektif, saling kolaborasi dari semua pihak, penyusunan strategi yang tepat komprehensif, dan bergerak dengan cepat turun ke wilayah berisiko. Beberapa hal yang menjadi tantangan penanganan stunting di Kota Bekasi seperti balita (bayi di bawah usia lima tahun) dan baduta (bayi di bawah usia dua tahun) tumbuh di dalam keluarga perokok aktif, sanitasi yang tidak layak, lingkungan rumah yang kumuh dengan ventilasi dan cahaya matahari buruk, serta pola makan

yang belum dapat dikategorikan sebagai makanan sehat dan bergizi seimbang.

5. Indeks Pembangunan Keluarga

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) di Kota Bekasi mengalami peningkatan signifikan dalam kurun 5 tahun terakhir. Dengan iBangga sebesar 64,96 di tahun 2024 dan meningkat menjadi 67,90 di tahun 2025 menandakan bahwa pembangunan kualitas keluarga di Kota Bekasi masuk dalam klasifikasi “berkembang”. Ke depannya, Kota Bekasi diharapkan dapat terus melanjutkan upaya-upaya pembangunan yang berkelanjutan untuk memastikan kesejahteraan dan kualitas hidup keluarga yang lebih baik sehingga dapat mencapai klasifikasi “tangguh”.

Untuk meningkatkan capaian iBangga Kota Bekasi, perlu dilakukan penguatan dan perluasan intervensi program/kegiatan, misalnya melalui Kampung Keluarga Berkualitas. Konvergensi program/kegiatan tersebut dapat berupa peningkatan cakupan pemenuhan administrasi kependudukan, advokasi dan komunikasi perubahan perilaku masyarakat, meningkatkan akses dan pelayanan kesehatan termasuk keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, pendampingan dan pelayanan pada keluarga yang rentan risiko kejadian stunting, meningkatkan cakupan layanan dan akses pendidikan, meningkatkan cakupan layanan jaminan dan perlindungan sosial pada keluarga dan masyarakat miskin serta rentan, dan lainnya.

6. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan gambaran tentang sejauh mana kesetaraan gender telah tercapai dalam suatu masyarakat. IKG Kota Bekasi tahun 2025 sebesar 0,181, menurun dibandingkan tahun 2024 yang masih berada di angka 0,273. Artinya, masih terdapat kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam hal akses terhadap pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan, peluang ekonomi, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Upaya untuk meningkatkan kualitas gender di Kota Bekasi perlu melibatkan berbagai pihak terkait, seperti pelaku ekonomi, politik, pendidikan, dan kesehatan. Dukungan berbagai pihak tersebut untuk memastikan bahwa pengaturan komitmen, penguatan kebijakan, penguatan kelembagaan, penguatan sumber daya manusia dan anggaran, penguatan data terpilah, penguatan instrumen perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) dan penguatan partisipasi masyarakat dapat berjalan maksimal.

7. Nilai Kota Layak Anak

Kota Layak Anak (KLA) Kota Bekasi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir selalu masuk dalam kategori “Nindya” dan nilai KLA berada pada angka 742,34 di tahun 2024. Namun pada tahun 2025, nilai KLA Kota Bekasi turun menjadi 501 sehingga masuk dalam kategori “Pratama”. Artinya Kota Bekasi belum memenuhi banyak indikator pemenuhan hak anak, terutama di sektor pemenuhan administrasi.

Upaya untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan khusus anak secara menyeluruh, terencana, dan berkelanjutan, Kota Bekasi perlu lebih melibatkan seluruh pemangku kepentingan seperti pemerintah, masyarakat, dunia usaha, serta lembaga lainnya. Fokusnya adalah pada pemenuhan hak anak seperti hak sipil dan kebebasan, kesehatan,

pendidikan, lingkungan keluarga yang layak, pemanfaatan waktu luang, serta perlindungan khusus dari kekerasan atau eksploitasi melalui kebijakan, program, dan layanan yang responsif kepada kebutuhan anak.

8. PDRB Per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita Kota Bekasi tahun 2025 sebesar Rp52.513.718,- artinya nilai rata-rata output barang dan jasa yang dihasilkan oleh setiap penduduk Kota Bekasi senilai 52,51 juta rupiah. Angka ini didapat dari total PDRB Kota Bekasi dibagi jumlah penduduk Kota Bekasi pada tahun 2025, angka ini naik dari besaran PDRB per Kapita Kota Bekasi pada tahun 2024 yang sebesar 48,92 juta rupiah.

Secara umum, peningkatan kinerja tersebut dapat lebih ditingkatkan dengan: melakukan penguatan ekonomi berbasis kerakyatan – pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan koperasi dengan mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi produktif di tingkat lokal, sehingga meningkatkan nilai tambah sektor perdagangan dan jasa -; peningkatan kapasitas dan daya saing usaha – perbaikan kualitas produk, peningkatan kompetensi pelaku usaha, serta perluasan akses pasar -; peningkatan kesempatan kerja dan kualitas tenaga kerja – fasilitasi di bidang ketenagakerjaan, termasuk peningkatan kompetensi dan perluasan akses kerja, turut mendorong terserapnya tenaga kerja secara lebih optimal -; dan menjaga stabilitas daya beli masyarakat - menjaga stabilitas harga dan pengendalian inflasi daerah.

9. Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kota Bekasi dari tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan peningkatan yang signifikan. IKP Kota Bekasi ini bahkan berada pada peringkat kedua secara Nasional dengan nilai 93,90 poin setelah Kota Denpasar. Namun pada tahun 2025, IKP Kota Bekasi turun secara signifikan menjadi 73,07 poin. Penurunan ini lebih disebabkan karena adanya perbedaan rumus penghitungan nilai IKP yang dilakukan sebelumnya dengan tahun 2025.

Upaya untuk meningkatkan IKP Kota Bekasi ke depan dapat dilakukan melalui program-program peningkatan produksi pangan lokal, diversifikasi pangan, dan aksesibilitas terhadap pangan yang berkualitas menunjukkan keberhasilan. Selain itu, upaya dalam memperkuat infrastruktur dan sistem distribusi pangan juga memainkan peran penting dalam meningkatnya IKP.

10. Tingkat Pengangguran Terbuka

Kualitas dan taraf hidup masyarakat Kota Bekasi dilihat dari indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Capaian kinerja indikator TPT Kota Bekasi tahun 2025 sebesar 104.56 persen dari target 7,06 – 7,68 persen dan terealisasi 7.33 persen. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi TPT, diantaranya pertumbuhan ekonomi, upah, inflasi dan investasi. Pengangguran Kota Bekasi tahun 2025 masih didominasi oleh lulusan SMA Umum dan SMA Kejuruan dengan masing-masing sebesar 23.384 orang dan 39.272 orang.

Dalam upaya menurunkan TPT di Kota Bekasi yang masih tinggi, Pemerintah Kota Bekasi berupaya melakukan berbagai langkah seperti: a) peningkatan keterampilan dan daya saing tenaga kerja lokal melalui

pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi pencari kerja agar sesuai dengan kebutuhan industri dan bersertifikasi; b) penguatan ekosistem ekonomi kreatif dan UMKM untuk mendorong penyerapan tenaga kerja mandiri dan mengurangi ketergantungan pada sektor formal tertentu; c) perluasan investasi dan penciptaan lapangan kerja baru melalui kemudahan perizinan dan insentif fiskal; dan d) optimalisasi penempatan tenaga kerja melalui layanan informasi pasar kerja melalui *job fair*.

11. Tingkat Kemiskinan

Upaya pengentasan kemiskinan di Kota Bekasi cenderung berkorelasi positif dengan kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang dicapai. Maksudnya yaitu, jika LPE Kota Bekasi menunjukkan peningkatan maka angka kemiskinan mengalami penurunan, begitu juga sebaliknya. Hal ini mengindikasikan bahwa salah satu upaya menurunkan angka kemiskinan yaitu dengan meningkatkan LPE melalui peningkatan produktivitas sektor-sektor unggulan dan potensial.

Tingkat Kemiskinan Kota Bekasi tahun 2025 belum mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 3,34 – 3,69 persen. Realisasi Tingkat Kemiskinan Kota Bekasi tahun 2025 sebesar 3.96 persen. Angka ini lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar 4,01 persen. Meskipun mengalami penurunan persentase, secara jumlah penduduk miskin Kota Bekasi mengalami peningkatan dari 128,84 ribu jiwa di tahun 2024 menjadi 129,54 ribu jiwa di tahun 2025. Mencermati hal ini, Pemerintah Kota Bekasi perlu melakukan langkah-langkah lanjutan dengan melakukan pemetaan per kecamatan bahkan hingga ke level terendah agar intervensi penanganan kemiskinan lebih tepat sasaran. Selain itu, penanganan lintas urusan juga perlu dikedepankan agar penanganan kemiskinan lebih komprehensif serta mendorong peningkatan aktivitas ekonomi rumah tangga serta perbaikan pendapatan masyarakat secara bertahap.

12. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi cenderung stabil dan positif. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bekasi tahun 2025 melebihi target yang ditentukan yaitu sebesar 101,32 persen dari target sebesar 5,15 – 5,50 persen dan terealisasi 5,39 persen. Beberapa sektor dengan pertumbuhan relatif tinggi pada 2025 antara lain Informasi dan Komunikasi (8,37 persen), Jasa Perusahaan (8,46 persen), Real Estate (7,84 persen), serta Transportasi dan Pergudangan (9,68 persen). Hal ini menunjukkan dinamika ekonomi yang semakin bertumpu pada sektor jasa dan aktivitas berbasis mobilitas serta teknologi.

Meskipun LPE Kota Bekasi mengalami fluktuasi namun kota ini berada dalam posisi yang cukup kompetitif dibandingkan dengan kota lainnya di sekitar Jakarta. Perbedaan dalam pertumbuhan ekonomi antarkota menunjukkan pentingnya faktor-faktor lokal dan kebijakan pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kota Bekasi juga sejalan dengan faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi dan Nasional. Ini menunjukkan pentingnya koordinasi dan sinergi antara kebijakan pemerintah di tingkat lokal, provinsi, dan Nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

13. Rasio Gini

Target pencapaian Rasio Gini Kota Bekasi pada tahun 2025 adalah 0,401 – 0,408 poin, sementara realisasinya 0,407 poin sehingga capaian kinerja tahun 2025 sebesar 100,25 persen. Ada beberapa penyebab masih tingginya angka Rasio Gini Kota Bekasi, antara lain disebabkan karena: masih tingginya angka kemiskinan yaitu 3,96 persen dari total jumlah penduduk sehingga membuat kesenjangan sosial terasa; masih rendahnya angka pertumbuhan nilai investasi yaitu sebesar Rp11.570.572.556.968,- atau sebesar - 7,17 persen dari target yang ditetapkan di awal tahun 2025; masih rendahnya rata-rata pengeluaran per kapita penduduk yaitu sebesar Rp2.827.217,- per bulan sehingga menyebabkan daya beli masyarakat tidak terlalu tinggi; sementara TPT serta persentase Laju Inflasi sudah berada di angka yang baik sehingga tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap capaian Rasio Gini Kota Bekasi.

Secara umum, intervensi Pemerintah Kota Bekasi untuk mengurangi Rasio Gini perlu difokuskan pada peningkatan pendapatan kelompok bawah dan menengah, perluasan kesempatan kerja, serta penguatan ekonomi lokal sehingga kesenjangan pendapatan dapat ditekan secara bertahap. Hal ini penting mengingat pengurangan ketimpangan pendapatan merupakan tujuan penting dalam pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ketimpangan pendapatan yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta menciptakan ketidakstabilan sosial dan politik.

14. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kota Bekasi tahun 2024 mencapai skor 4,18 menurun menjadi 4,09 di tahun 2025. Dalam konteks Provinsi Jawa Barat, IDSD Kota Bekasi ini tertinggi keempat setelah Kota Bandung, Kota Depok dan Kota Bogor. Sedangkan dalam konteks kota di sekitar Jakarta, IDSD Kota Bekasi pada tahun 2025 merupakan yang terendah. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Bekasi perlu meningkatkan kembali aspek daya saingnya, terutama pada kondisi ekonomi yang dinamis, infrastruktur yang memadai, dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan dan investasi.

Persaingan antara kota-kota di sekitar Jakarta dalam menarik investasi dan mengembangkan ekonomi dapat dikatakan cukup seimbang, dilihat dari skor pencapaiannya yang tidak terlampau jauh. Masing-masing kota memiliki keunggulan dan tantangan tersendiri dalam memperkuat daya saingnya. Tantangan dalam peningkatan daya saing daerah Kota Bekasi yaitu terkait dengan dinamisme bisnis. Dinamisme bisnis menggambarkan kemudahan untuk memulai dan melakukan bisnis dan kemudahan untuk melakukan divestasi dan keluar dari pasar (*market*) di suatu wilayah. Hal ini penting karena capaian nilai dinamisme bisnis di Kota Bekasi paling rendah dibandingkan dengan pilar-pilar lain yang membentuk IDSD.

15. Indeks Harmoni

Indeks Harmoni Kota Bekasi tahun 2025 capaiannya sangat tinggi, yaitu sebesar 108.19 persen didapat dari target 6.47 poin dan terealisasi 7.00 poin. Nilai Indeks Harmoni yang tinggi menunjukkan kondusifitas yang baik dari sisi ekonomi, sosial, budaya, dan kerukunan/keberagaman. Sebaliknya, nilai yang rendah dapat menjadi peringatan dini (*early warning system*) terhadap

potensi konflik. Implikasi kebijakan yang dapat diambil antara lain penguatan pendidikan toleransi dan moderasi beragama, dialog lintas agama dan budaya, penegakan hukum terhadap tindakan diskriminatif, serta pemberdayaan forum kerukunan umat beragama (FKUB).

16. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kota Bekasi pada tahun 2025 mencapai 89,28 poin, meningkat jika dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 83,46 poin. Dengan capaian tersebut, Kota Bekasi masuk dalam kategori “Sangat Baik”, yang menandakan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi.

Meskipun capaian Indeks RB sudah sangat baik, pada Pelaksanaan Kebijakan RB masih terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan terutama terkait pembangunan zona integritas, pembangunan statistik, implementasi kebijakan arsitektur SPBE, serta peningkatan Tingkat Maturitas SPIP dan peningkatan Nilai SAKIP.

17. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Bekasi pada tahun 2025 sebesar 88,83 poin, meningkat dari tahun 2024 yang sebesar 88,02 poin. Dari nilai IKM 101 unit pelayanan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (32 Perangkat Daerah, 12 Kecamatan, 4 RSUD Kelas D, dan 53 Puskesmas) sebesar 88.83 poin tersebut masuk dalam kategori mutu pelayanan “A” (Sangat Baik). Unit penyelenggara pelayanan yang memiliki nilai IKM tertinggi adalah Puskesmas Seroja yaitu sebesar 98.47 poin, sedangkan nilai IKM terendah adalah Puskesmas Jakasetia yaitu sebesar 75.90 poin.

Berdasarkan hasil pelaksanaan survei hasil kepuasan masyarakat yang telah dilaksanakan oleh 101 unit penyelenggara pelayanan, terdapat beberapa unsur pelayanan yang memiliki kelemahan atau dianggap kurang. Namun secara umum terdapat unsur penilaian yang memiliki nilai terendah yaitu unsur produk spesifikasi jenis layanan, unsur biaya/tarif, dan unsur sistem, mekanisme dan prosedur. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah Kota Bekasi dalam mencapai indikator ini sudah meningkat baik.

18. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Kota Bekasi berhasil mewujudkan tata kelola pemerintahan yang smart, bersih, dan akuntabel yang ditunjukkan dengan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP suatu instansi/unit kerja. Nilai AKIP Kota Bekasi pada tahun 2025 masuk dalam kategori B dengan capaian 100,22 persen dari target sebesar 67.83 poin dan terealisasi sebesar 67.98 poin. Angka tersebut meningkat jika dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 67,33 poin. Dari 44 Perangkat Daerah, sebanyak 13 Perangkat Daerah sudah masuk berpredikat A, sebanyak 25 Perangkat Daerah berpredikat BB, dan 6 Perangkat Daerah berpredikat B.

Tren positif Nilai SAKIP Kota Bekasi perlu ditingkatkan agar naik ke kategori BB atau A. Upaya peningkatan tersebut dapat dilakukan melalui perbaikan kualitas (bukan hanya capaian angka), penguatan integrasi sistem perencanaan-penganggaran-pelaporan, dan pembinaan spesifik pada Perangkat Daerah yang masih lemah.

19. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Pemerintah Kota Bekasi terus berkomitmen dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) untuk tahun anggaran 2024 Tahun Ukur 2025, Kota Bekasi berhasil meraih skor sebesar 66,7524 dengan predikat "Cukup Baik", namun secara kategorisasi performa nasional, Kota Bekasi mendapat nilai "C" dengan peringkat "Perlu Perbaikan".

Meskipun menunjukkan konsistensi dalam kepatuhan prosedur, skor tersebut mengindikasikan adanya deviasi antara realisasi kinerja dengan target standar nasional (ideal di atas 75,00), sehingga diperlukan langkah-langkah korektif yang lebih masif pada dimensi yang memiliki gap nilai cukup lebar terutama pada dimensi pelaksanaan anggaran dan dimensi pemenuhan belanja wajib.

20. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Capaian kinerja dan realisasi nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) Kota Bekasi Tahun 2025, belum dapat ditentukan karena belum ada nilai yang dikeluarkan oleh Kemendagri. Nilai EPPD Kota Bekasi Tahun 2024 sebesar 3,17, masuk dalam kategori "Sedang".

Untuk ke depannya, Kota Bekasi perlu meningkatkan capaian EPPD diantaranya melalui: integrasi sistem informasi yaitu mengintegrasikan EPPD dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SILPPD) untuk menjamin transparansi dan konsistensi data; penguatan data dukung dengan memastikan laporan EPPD didukung oleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan; peningkatan kapasitas SDM melalui pembinaan, supervisi, dan pelatihan intensif bagi tim daerah yang menyusun LPPD agar memenuhi standar kinerja; dan sinkronisasi perencanaan dengan menyelaraskan hasil evaluasi dengan proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

21. Nilai Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah Terintegrasi Kota Bekasi

Capaian Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah Terintegrasi Kota Bekasi tahun 2025 sebesar 107.50 persen, dari target 2.80 terealisasi 3.01. Capaian ini masuk dalam Level 3 (Terdefinisi), artinya proses pengendalian telah terdokumentasi dan dilaksanakan secara konsisten.

Capaian ini tentunya masih dapat ditingkatkan dan terutama perlu memperkuat manajemen risiko pembangunan agar pendekatan yang dilakukan lebih terstruktur dan terintegrasi untuk mengarahkan serta mengendalikan risiko yang dapat menghambat pencapaian sasaran pembangunan. Selain itu, manajemen risiko ini bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan proyek, proaktif terhadap perubahan, serta mencakup manajemen risiko internal dan lintas instansi untuk memitigasi berbagai potensi hambatan

22. Indeks Kota Cerdas

Indeks Kota Cerdas Kota Bekasi berhasil meraih posisi membanggakan dalam evaluasi Kota Cerdas oleh Kementerian Komunikasi dan Digital RI di tahun 2024. Capaian tersebut mengalami peningkatan dari tahun-tahun

sebelumnya yaitu mencapai skor 3,60 pada (skala 1-4) pada tahun 2024. Pada tahun 2025, Indeks Kota Cerdas Kota Bekasi meningkat menjadi 3.67 yang perhitungannya dilakukan secara mandiri.

Ke depannya, upaya peningkatan nilai Indeks Kota Cerdas Kota Bekasi masih tetap diperlukan terutama pada sisi peningkatan kualitas hidup (*Smart Living*) diantaranya dengan peningkatan persentase balita dengan imunisasi lengkap serta cakupan persalinan dengan tenaga kesehatan di Kota Bekasi. Pada sisi dimensi *Smart Society* diperlukan peningkatan terhadap pengembangan aplikasi pendukung *Smart City* serta peningkatan pada pengembangan literasi *Smart City*.

2.2.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DAERAH TAHUN 2025

Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup indikator makro pembangunan dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Sementara IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah. Capaian IKD Kota Bekasi Tahun 2025 disajikan sebagaimana pada tabel berikut.

Berdasarkan tabel di atas, kinerja IKD pada Aspek Geografi dan Demografi rata-rata capaiannya pada kategori sangat tinggi. Meski demikian, terdapat indikator yang perlu mendapat perhatian yaitu berkaitan dengan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan, yaitu proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Angka Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kota Bekasi dalam kurun waktu 2021-2024 terakhir masuk dalam kategori rendah, bahkan di tahun 2024, angkanya hanya 2,04 persen, lebih rendah dari Provinsi Jawa Barat yang mencapai 6 persen. Namun pada tahun 2025, angkanya meningkat menjadi 5,05 persen. Maknanya adalah terdapat 5 dari setiap 100 orang yang tidak mendapatkan cukup kalori dari makanan setiap harinya untuk menjalankan aktivitas normal dan hidup sehat.

Pada indikator Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaian, realisasinya masih dibawah target namun masih dalam kategori tinggi. Jika dibandingkan pada tahun sebelumnya, realisasi tahun 2025 ini meningkat. Penambahan akses masyarakat ini, di antaranya karena kinerja layanan dari Perumda Tirta Bhagasasi yang berada di wilayah Kota Bekasi yang meningkat melalui integrasi layanan kawasan perumahan besar, serta optimalisasi wilayah pelayanan eksisting. Hal ini juga sejalan dengan kapasitas produksi, yang meningkat dari 850 liter per detik menjadi 2.800 liter per detik.

Sementara pada indikator Indeks Risiko Bencana (IRB) Kota Bekasi menunjukkan penurunan yang signifikan. Jika pada tahun 2024 masuk dalam kategori “sedang” menjadi kategori "rendah" di tahun 2025. Meski demikian, jika dicermati per bencana, risiko bencana yang cukup besar yaitu terkait bencana banjir, kekeringan, dan cuaca ekstrem. Sebagai salah satu kota di sekitar Jakarta, penurunan IRB Kota Bekasi memiliki dampak yang

penting dalam konteks mitigasi risiko bencana regional. Dengan menurunnya IRB, Kota Bekasi dapat menjadi lebih tangguh dalam menghadapi berbagai bencana alam yang mungkin terjadi. Meskipun demikian, Kota Bekasi masih memerlukan upaya-upaya lanjutan dalam memperkuat infrastruktur, meningkatkan sistem peringatan dini, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta mengintegrasikan prinsip-prinsip mitigasi risiko bencana dalam perencanaan pembangunan.

Pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat sebagian indikator yang digunakan sama dengan indikator pada IKU Kota Bekasi yang telah diuraikan pada subbab sebelumnya. Indikator tersebut seperti Laju Pertumbuhan Ekonomi, Rasio Gini, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Kemiskinan, Stunting, dan Indeks Ketimpangan Gender.

Secara keseluruhan, indikator yang terkait dengan kesehatan rata-rata menunjukkan kinerja yang baik. Indikator Usia Harapan Hidup kriteria capaiannya pada kategori sangat tinggi. Capaian ini menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap kesehatan sudah baik. Hal ini juga sejalan dengan prioritas Kota Bekasi yang dalam beberapa tahun terakhir berupaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan melalui penambahan fasilitas dan perbaikan layanan. Sementara pada indikator Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional realisasinya sudah lebih dari 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa akses jaminan kesehatan sudah sangat luas, (*Universal Health Coverage*) sudah tercapai.

Namun demikian, terdapat indikator yang perlu menjadi perhatian serius mengingat kriteria capaiannya yang sangat rendah. Indikator tersebut yaitu Jumlah Kasus Kematian Ibu per Tahun. Realisasi indikator ini jauh dari yang ditargetkan yaitu nol. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, Jumlah Kasus Kematian Ibu per Tahun sebanyak 24 kasus turun menjadi 15 kasus di tahun 2025. Untuk itu, diperlukan upaya lanjutan dengan memastikan bahwa setiap ibu memiliki akses dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas, yang meliputi pelayanan kesehatan ibu hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih, perawatan masa nifas bagi ibu dan bayi, perawatan khusus dan rujukan apabila terdapat komplikasi, serta pelayanan KB.

Untuk kinerja terkait kualitas pendidikan, skor literasi dan numerasi SD/SMP Kota Bekasi secara umum dalam kategori sangat tinggi, terutama di jenjang SMP. Namun terdapat kelemahan mendasar pada numerasi SD. Jika hal ini tidak ditangani, akan berdampak pada kualitas pendidikan Kota Bekasi dalam jangka Panjang. Numerasi SD adalah fondasi semua jenjang berikutnya yang akan berdampak ke SMP/SMA jika tidak diperbaiki. Untuk itu, perlu adanya program “back to basic” (calistung), fokus intervensi kelas rendah (kelas 1–3), monitoring berbasis sekolah, pelatihan guru matematika SD, metode pembelajaran kontekstual, penguatan numerasi dalam semua mata pelajaran, dan replikasi keberhasilan pada jenjang SMP ke SD.

Sementara, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) yang realisasinya tahun 2025 (9,41) menurun signifikan jika dibandingkan tahun 2024 (59,36). Penurunan ini tidak hanya terjadi di Kota Bekasi, namun terjadi di banyak kabupaten/kota yang lain. Faktor yang menyebabkan penurunan lebih dikarenakan adanya perubahan penilaiannya. Data IPLM Kota Bekasi tahun 2025 mencakup indikator perpustakaan dan penyebaran informasi,

dengan skor pendukung lainnya yang tercatat sebesar 0,1500 dan 0,1310. Diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan IPLM seperti dengan mengoptimalkan perpustakaan digital, penguatan sarana prasarana perpustakaan, peningkatan budaya baca dan literasi, dan peningkatan kualitas pustakawan.

Perbaikan kualitas pendidikan juga sejalan perbaikan pada akses masyarakat terhadap pendidikan. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah yang kriteria capaiannya pada kategori sangat tinggi. Keberhasilan ini tentunya sejalan dengan prioritas Kota Bekasi yang dalam beberapa tahun terakhir yang berupaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan melalui penambahan sekolah terutama pada jenjang SMP serta pemerataan guru.

Dari sisi pembangunan keluarga yang ditunjukkan dengan Indeks Pembangunan Keluarga di Kota Bekasi menunjukkan kinerja sangat baik dan melampaui target. Hal ini mengindikasikan peningkatan kualitas hidup dan ketahanan keluarga. Ke depan, fokus intervensi perlu diarahkan pada pemerataan antarwilayah, penguatan ekonomi keluarga, dan keberlanjutan program yang telah berhasil dilaksanakan. Sementara pada sisi pembangunan gender, Indeks Pembangunan Gender di Kota Bekasi sangat baik dan telah melampaui target. Ini menunjukkan kesetaraan gender yang semakin kuat. Namun, ke depan fokus perlu diarahkan pada kualitas partisipasi perempuan, penguatan peran ekonomi dan kepemimpinan, serta pengurangan gap yang bersifat struktural.

Pada Aspek Daya Saing Daerah, beberapa indikator seperti Indeks Daya Saing Daerah dan Inovasi Daerah yang kriteria kinerjanya sangat tinggi tidak serta merta mendukung (menaikkan) nilai investasi yang masuk ke Kota Bekasi pada tahun 2025. Realisasi investasi (PMA dan PMDN) tahun 2024 mencapai Rp13,7 triliun turun menjadi Rp11,57 triliun di tahun 2025. Kondisi ini menandakan bahwa daya tarik investasi di Kota Bekasi melemah. Terdapat beberapa indikasi yang menunjukkan pelemahan tersebut seperti investor menahan ekspansi, perpindahan investasi ke daerah lain, perizinan belum cukup cepat/efisien, ketersediaan lahan terbatas, infrastruktur pendukung belum optimal, ketidakpastian ekonomi makro, dan UMK yang tinggi. Jika tren ini berlanjut maka pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi dapat melambat, penyerapan tenaga kerja terganggu, dan PAD berpotensi menurun. Untuk itu diperlukan langkah cepat dalam perbaikan iklim investasi, penyederhanaan perizinan serta penyediaan lahan dan insentif.

Sementara Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) menunjukkan sinyal positif (investasi tetap bergerak). Tapi belum cukup kuat untuk mendorong lonjakan ekonomi. PMTB naik artinya aktivitas investasi fisik (bangunan, mesin, infrastruktur) meningkat. Hal ini menunjukkan kepercayaan pelaku usaha masih terjaga. Walau nilai investasi turun (indikator sebelumnya), PMTB justru naik, artinya investasi yang terjadi lebih banyak pada penguatan aset eksisting, bukan ekspansi besar-besaran.

Dari sisi kinerja ekspor Kota Bekasi sangat kuat dan menjadi motor pertumbuhan ekonomi. Lonjakan signifikan (+272 juta USD) mencerminkan permintaan pasar ekspor kuat. Produk Kota Bekasi kompetitif di pasar global. Ini mengindikasikan ekspor ditopang sektor unggulan (kemungkinan

industri/manufaktur) dan ada peluang diversifikasi pasar serta produk. Namun, lonjakan bisa bersifat temporer (harga komoditas/permintaan global) dan ketergantungan pada sektor tertentu. Untuk itu, ekspor Kota Bekasi perlu dijaga agar berkelanjutan, tidak hanya momentum sesaat. Perluasan pasar ekspor (tidak bergantung negara tertentu), hilirisasi dan nilai tambah produk, dan pelibatan UMKM ekspor sangat penting untuk ditingkatkan.

Adapun Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Bekasi relatif stabil namun cenderung menurun dari 65,58 persen tahun 2024 menjadi 64,10 persen di tahun 2025. Ini menunjukkan sebagian penduduk usia kerja belum/tidak aktif di pasar kerja. Ada indikasi adanya penurunan pada minat/akses kerja, bertambahnya kelompok tidak bekerja dan tidak mencari kerja (misalnya pelajar dan ibu rumah tangga). TPAK pada dasarnya tidak hanya soal lapangan kerja, tapi juga akses dan kesiapan tenaga kerja kondisi sosial (pendidikan, gender, dan lainnya), perluasan kesempatan kerja (padat karya dan sektor jasa/digital), pelatihan dan *reskilling* tenaga kerja, serta partisipasi perempuan dan pemuda.

Mencermati kondisi di atas, Kota Bekasi perlu mendorong pengembangan ekonomi kreatif dan digital. Hal ini tentunya mempertimbangkan tren kontribusi industri pengolahan yang dalam kurun beberapa tahun terakhir mengalami penurunan. Penurunan kontribusi industri pengolahan biasanya dipicu oleh keterbatasan lahan dan biaya tinggi (sewa/tenaga kerja/logistik), relokasi industri ke wilayah yang lebih murah, otomatisasi (output naik, serapan tenaga kerja tidak). Penurunan industri pengolahan bukan hanya masalah, tapi tanda perubahan ekonomi. Kota Bekasi harus *shift* dari *economy of scale* ke *economy of creativity & innovation*. Masa depan ekonomi Kota Bekasi ada pada talenta, teknologi, dan jejaring digital.

Jika tidak melakukan perubahan, Kota Bekasi bisa “terjebak” sebagai kota penyangga tanpa keunggulan baru. Ekonomi kreatif dan digital lebih “ringan” tapi tumbuh cepat. Kota Bekasi punya modal kuat yaitu kedekatan dengan Jakarta (pasar dan ekosistem), demografi muda dan melek digital, dan basis UMKM besar. Selain itu, Adopsi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang mencerminkan ukuran tingkat difusi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di Kota Bekasi yang sudah pada angka maksimal (5). Untuk itu, transformasi ekonomi Kota Bekasi menjadi keniscayaan. Penguatan ekonomi kreatif dan digital adalah strategi adaptif terhadap penurunan industri pengolahan. Ke depan, fokus pada ekosistem kreatif, talenta digital, dan UMKM berbasis teknologi. Tujuannya tentu untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tetap tinggi meskipun struktur berubah.

Dalam mengembangkan ekonomi kreatif dan digital, tentunya diperlukan akses permodalan. Salah satu indikator yang menunjukkan akses permodalan yaitu Indeks Inklusi Keuangan Daerah, yaitu ukuran yang menunjukkan seberapa besar masyarakat di suatu daerah memiliki akses dan menggunakan layanan keuangan formal. Tujuannya untuk mendorong pemerataan akses keuangan, mengurangi ketimpangan ekonomi, mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif, dan mendorong UMKM berkembang (akses kredit). Indeks Inklusi Keuangan Daerah Kota Bekasi tahun 2024 sebesar 52,01. Artinya akses dan penggunaan layanan keuangan

formal belum merata. Masih banyak masyarakat belum punya rekening, belum akses kredit formal, dan masih bergantung pada sektor informal.

Pemerintah Kota Bekasi sendiri telah berkomitmen untuk mengembangkan ekosistem ekonomi syariah untuk mendukung inklusi keuangan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak pada bidang perbankan syariah. Sementara dari sisi masyarakat, telah terdapat wadah organisasi (Masyarakat Ekonomi Syariah) yang juga berupaya untuk membangun sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk mengembangkan ekosistem ekonomi syariah di Kota Bekasi. Dengan jumlah penduduk yang besar, potensi pengembangan ekonomi syariah di Kota Bekasi masih cukup besar. Hal ini juga diindikasikan dengan indikator Indeks Zakat yang sebesar 0,35. Artinya pengelolaan zakat di Kota Bekasi masih dalam kategori berkembang.

Pada Aspek Pelayanan Umum, rata-rata kriteria capaiannya sudah sangat tinggi. Meskipun capaian Indeks RB sudah sangat baik, pada Pelaksanaan Kebijakan RB masih terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan terutama terkait pembangunan zona integritas, pembangunan statistik, implementasi kebijakan arsitektur SPBE, serta peningkatan Tingkat Maturitas SPIP dan peningkatan Nilai SAKIP.

Pada Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), capaian Kota Bekasi tahun 2025 meningkat signifikan jika dibanding tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa implementasi digitalisasi pemerintahan berjalan baik dan meningkat. Layanan publik berbasis elektronik semakin efektif dan terintegrasi. Namun demikian tetap perlu dilakukan upaya penguatan tata kelola digital, integrasi aplikasi antar perangkat daerah, penguatan satu data dan keamanan informasi, peningkatan layanan digital *end-to-end* (tanpa tatap muka), dan penguatan SDM digital ASN.

Adapun untuk Indeks Kepuasan Masyarakat, berdasarkan hasil pelaksanaan survei hasil kepuasan masyarakat yang telah dilaksanakan oleh 101 unit penyelenggara pelayanan, terdapat beberapa unsur pelayanan yang memiliki kelemahan atau dianggap kurang. Namun secara umum terdapat unsur penilaian yang memiliki nilai terendah yaitu unsur produk spesifikasi jenis layanan, unsur biaya/tarif, dan unsur sistem, mekanisme dan prosedur. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah Kota Bekasi dalam mencapai indikator ini sudah meningkat baik.

Selain empat aspek yang sudah diuraikan diatas, terdapat IKK yang merupakan bagian dari IKD. IKK yang diuraikan di bawah ini didasarkan pada IKK yang tertuang dalam RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029. Pada saat penyusunan RPJMD, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.5-109 Tahun 2026 tentang Indikator Kinerja Kunci, Bobot, dan Penilaian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah belum terbit sehingga tidak termuat dalam RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

A. Urusan Pendidikan

Pada urusan pendidikan ini, rata-rata kriteria capaian kinerjanya sudah sangat tinggi. Tantangan utama ada pada pendidikan nonformal, kualitas sarana, dan mutu sekolah swasta. Fokus ke depan perlu pemerataan kualitas dan inklusivitas pendidikan. Untuk itu diperlukan perluasan PAUD dan

pendidikan kesetaraan, peningkatan sarana prasarana sekolah, pembinaan mutu sekolah swasta, dan intervensi anak putus sekolah.

B. Urusan Kesehatan

Layanan kesehatan di Kota Bekasi secara keseluruhan sudah sangat baik tapi belum didukung oleh sarana prasarana memadai dan ketersediaan SDM yang cukup. Ada gap antara kualitas layanan dan kapasitas sistem. Untuk itu diperlukan intervensi pada upaya pemenuhan SDM kesehatan, peningkatan sarana dan alat kesehatan Puskesmas, rehabilitasi gedung layanan kesehatan, dan penguatan sistem pendukung layanan. Penguatan ini merupakan prasyarat utama untuk menjaga keberlanjutan dan kualitas pelayanan kesehatan di Kota Bekasi.

C. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang relatif baik dan stabil, terutama pada infrastruktur jalan, drainase, sanitasi dan penegakan tata ruang. Namun masih ada kelemahan pada infrastruktur air minum dan bangunan gedung. Untuk ke depan perlu penguatan infrastruktur dasar yang berdampak langsung ke kualitas hidup. Prioritas penanganannya yaitu peningkatan akses air minum perpipaan, penataan dan pengawasan kualitas bangunan, percepatan dokumen teknis (PBG/SLF), dan optimalisasi RTH dan kualitas ruang kota.

D. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kinerja urusan perumahan dan kawasan permukiman dari sisi perlindungan sosial (rumah layak huni bagi korban bencana, relokasi warga terdampak program kota, dan ketersediaan rumah layak huni terjangkau) sudah sangat baik. Namun, peningkatan kualitas permukiman masih menjadi tantangan utama. Terdapat gap antara penyediaan rumah dengan kualitas lingkungan hunian. Untuk itu diperlukan penataan kawasan permukiman secara menyeluruh dan berkelanjutan. Upaya yang dapat dilakukan seperti percepatan penanganan kawasan kumuh, peningkatan PSU permukiman, integrasi program perumahan dan permukiman, dan penataan kawasan berbasis tata ruang.

E. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Kinerja urusan ketertiban dan ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat Kota Bekasi sudah sangat optimal. Namun masih terdapat tantangan pada kapasitas sarana prasarana dan keberlanjutan sistem layanan. Ke depan perlu fokus pada memperkuat kapasitas dan sistem agar tetap tangguh menghadapi risiko perkotaan. Intervensi yang dapat dilakukan seperti penguatan sarana prasarana (penambahan armada damkar, modernisasi alat proteksi dan penyelamatan), penguatan sistem pencegahan (edukasi masyarakat, deteksi dini kebakaran dan bencana), digitalisasi layanan darurat (*command center* terintegrasi dan sistem pelaporan cepat berbasis aplikasi), peningkatan kapasitas SDM, dan kolaborasi multipihak.

F. Urusan Sosial

Kinerja urusan sosial secara umum sudah baik yang mana hal ini menunjukkan layanan sosial sangat optimal dan responsif, kelompok rentan terlayani secara menyeluruh, dan sistem penanganan sosial berjalan efektif. Namun tantangan ke depan adalah meningkatkan kualitas dan dampak layanan dan mengurangi ketergantungan bantuan. Untuk itu diperlukan fokus penanganan pada transformasi dari layanan bantuan menuju pemberdayaan sosial berkelanjutan melalui penguatan data sosial terpadu, pendalaman intervensi kelompok rentan, dan penguatan peran PSKS.

G. Urusan Tenaga Kerja

Kinerja urusan tenaga kerja secara umum sudah baik dengan peningkatan signifikan pada pelatihan dan tata kelola kerja. Namun terdapat tantangan utama pada ketidakseimbangan antara pelatihan dan penyerapan kerja serta perencanaan tenaga kerja yang belum optimal. Ke depan perlu adanya sinkronisasi pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja dan peningkatan penyerapan tenaga kerja melalui pelatihan berbasis kebutuhan perusahaan, kerja sama langsung dengan industri, *job matching*, *job fair digital*, penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD), dan proyeksi kebutuhan tenaga kerja.

H. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kinerja pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak secara umum sudah baik, terutama dari sisi kebijakan, data, dan layanan. Namun masih terdapat tantangan pada perlindungan anak rentan dan kualitas implementasi kelembagaan. Untuk itu, ke depan perlu peningkatan kualitas layanan dan perlindungan yang lebih tepat sasaran. Upaya yang dapat dilakukan seperti intervensi pada anak rentan (*by name by address* dan pendampingan intensif), mendorong PUSPAGA lebih aktif (konseling dan edukasi keluarga), forum anak diberdayakan (bukan hanya formalitas), optimalisasi data gender dan anak, pencegahan kekerasan dan TPPO (edukasi masyarakat, sistem pelaporan cepat, dan perlindungan korban), dan memastikan anggaran untuk program prioritas gender dan anak.

I. Urusan Pangan

Kinerja urusan pangan Kota Bekasi sudah sangat baik dan menunjukkan perbaikan signifikan yang ditandai dengan pola konsumsi membaik, keamanan pangan tinggi, dan kerawanan pangan menurun. Fokus ke depan perlu untuk menjaga keberlanjutan dan ketahanan terhadap risiko eksternal. Upaya yang dapat dilakukan seperti penguatan sistem ketahanan pangan berkelanjutan (monitoring wilayah rawan pangan dan intervensi cepat berbasis data), diversifikasi sumber pangan (*urban farming* pangan lokal alternatif), penguatan distribusi dan stabilitas harga (kerja sama antar daerah pengendalian inflasi pangan), dan edukasi pola konsumsi sehat (kampanye gizi seimbang kurangi konsumsi pangan tidak sehat).

J. Urusan Pertanahan

Kinerja urusan pertanahan Kota Bekasi sangat baik, terutama dalam penyelesaian konflik dan pengadaan tanah. Namun masih terdapat tantangan pada kepastian hukum lahan dan potensi konflik berulang. Ke depan perlu fokus pada pencegahan konflik dan percepatan sertifikasi tanah. Upaya yang dapat dilakukan seperti percepatan sertifikasi tanah (kolaborasi dengan BPN dan program sertifikasi massal), penguatan mediasi dan pencegahan konflik

(sistem deteksi dini konflik lahan dan pendekatan partisipatif masyarakat), dan percepatan pengadaan tanah (penyederhanaan proses ganti rugi serta kepastian nilai dan transparansi).

K. Urusan Lingkungan Hidup

Kinerja lingkungan hidup Kota Bekasi sudah baik, terutama pada kualitas lingkungan dan partisipasi masyarakat. Namun terdapat kelemahan serius pada aspek pengawasan lingkungan serta pengelolaan limbah dan sampah. Untuk itu perlu penguatan pengawasan dan sistem pengelolaan lingkungan yang lebih terintegrasi. Upaya yang dapat dilakukan seperti penguatan pengawasan lingkungan (inspeksi rutin usaha, penegakan hukum lingkungan, dan digital monitoring), pengelolaan limbah B3 (wajib TPS B3 untuk usaha, pendampingan dan pengawasan ketat), optimalisasi sistem persampahan (peningkatan armada angkut, modernisasi TPA/TPS, dan penguatan sistem 3R), dan penguatan kolaborasi masyarakat (kampung iklim diperluas dan edukasi lingkungan berkelanjutan).

L. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kinerja urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kota Bekasi sangat baik, terutama pada kepemilikan dokumen dasar penduduk. Tantangan ke depan adalah optimalisasi pemanfaatan data dan menjaga kualitas serta validitas data. Untuk itu perlu menjadikan data kependudukan sebagai fondasi utama perencanaan dan pelayanan publik. Upaya yang dapat dilakukan meliputi penguatan satu data kependudukan (integrasi data antar OPD dan sinkronisasi real-time), optimalisasi pemanfaatan data (untuk bantuan sosial dan perencanaan pembangunan), digitalisasi layanan adminduk (layanan online *end-to-end* dan integrasi dengan aplikasi daerah), dan peningkatan kualitas data (*update* berkala dan validasi data lapangan).

M. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kinerja urusan pengendalian penduduk dan KB Kota Bekasi sudah sangat baik dan terkendali. Hal ini ditandai dengan keberhasilan program KB, penurunan fertilitas, dan peningkatan layanan sosial keluarga. Selain itu, fokus pada kualitas layanan lansia bahkan melampaui target dikarenakan semakin luas cakupan dan adanya kesadaran dari para lansia. Upaya yang dapat dilakukan ke depan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian meliputi peningkatan kualitas layanan (pendampingan lansia berbasis kebutuhan dan monitoring kualitas layanan KB), inovasi program KB (edukasi digital dan pendekatan generasi muda), penguatan ketahanan keluarga (program parenting serta edukasi keluarga sehat dan sejahtera), dan pendekatan berbasis data (identifikasi kelompok risiko tinggi dan intervensi *by name by address*).

N. Urusan Perhubungan

Kinerja urusan perhubungan Kota Bekasi sangat baik, terutama pada penyediaan infrastruktur dan pengendalian pelanggaran. Tantangan utama ada pada pemanfaatan angkutan umum, kemacetan perkotaan, dan integrasi sistem transportasi. Untuk itu, ke depan perlu fokus pada transformasi menuju sistem transportasi terintegrasi dan berkelanjutan. Upaya yang dapat dilakukan meliputi mendorong penggunaan angkutan umum (integrasi rute dan tarif serta peningkatan kenyamanan dan ketepatan waktu), manajemen lalu lintas (rekayasa lalu lintas dan *smart traffic system*), integrasi transportasi regional (konektivitas dengan Jakarta dan sekitarnya serta

penguatan transportasi massal), dan edukasi serta penegakan hukum (kampanye tertib lalu lintas dan penegakan hukum konsisten).

O. Urusan Komunikasi dan Informatika

Kinerja urusan komunikasi dan informatika Kota Bekasi sudah sangat baik dan stabil. Terdapat tantangan yang harus dihadapi terutama terkait risiko stagnasi dan kebutuhan integrasi dan inovasi. Fokus ke depan perlu dilakukan percepatan transformasi layanan digital yang terintegrasi dan inovatif. Upaya yang dapat dilakukan meliputi Integrasi layanan digital (*super apps* pelayanan publik dan *single sign-on*), inovasi layanan (otomatisasi (ai/chatbot) dan layanan berbasis kebutuhan warga), penguatan pengelolaan pengaduan (respons lebih cepat dan analisis data pengaduan untuk kebijakan), dan peningkatan literasi digital (edukasi masyarakat dan akses layanan yang inklusif).

P. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kinerja urusan koperasi dan UKM Kota Bekasi meningkat signifikan serta tumbuh sangat kuat dan menjadi motor ekonomi kota. Hal ini sejalan dengan adanya program pemerintah untuk menjadikan koperasi sebagai motor penggerak ekonomi di daerah. Tantangannya yaitu pada peningkatan kualitas usaha, keberlanjutan, dan daya saing. Untuk itu perlu transformasi KUMK menjadi usaha yang produktif, digital, dan berdaya saing tinggi. Upaya yang dapat dilakukan meliputi penguatan kualitas KUMK (pendampingan bisnis dan peningkatan produktivitas), digitalisasi KUMK (masuk *marketplace* serta branding dan pemasaran digital), penguatan koperasi modern (transparansi dan tata kelola serta digital koperasi), dan akses pembiayaan (kredit KUMK dan kemitraan dengan perbankan).

Q. Urusan Penanaman Modal

Kinerja urusan penanaman modal Kota Bekasi sangat baik dari sisi sistem dan kelembagaan. Namun belum optimal dari sisi realisasi investasi. Untuk itu perlu meningkatkan investasi riil yang masuk di Kota Bekasi. Upaya yang dapat dilakukan meliputi peningkatan realisasi investasi (pendampingan investor dan percepatan implementasi proyek), peningkatan daya tarik investasi (penyediaan lahan siap investasi dan kepastian tata ruang), promosi lebih terarah (fokus sektor unggulan dan target investor spesifik), dan integrasi dengan ekonomi lokal (link investasi dengan UMKM dan tenaga kerja serta hilirisasi sektor unggulan).

R. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Kinerja urusan kepemudaan dan olahraga Kota Bekasi sudah tercapai sesuai target. Namun masih menghadapi tantangan pada rendahnya partisipasi dan kewirausahaan pemuda dan aktivitas olahraga yang belum berkembang optimal. Fokus ke depan perlu untuk meningkatkan peran aktif dan produktivitas pemuda melalui penguatan kewirausahaan pemuda (inkubasi bisnis pemuda dan akses pembiayaan serta mentoring), peningkatan partisipasi pemuda (aktivasi komunitas pemuda serta program kreatif dan digital), pengembangan olahraga prestasi dan partisipatif (penambahan event olahraga dan pembinaan atlet berkelanjutan), dan penyediaan ruang ekspresi pemuda (creative hub serta event kreatif dan olahraga).

S. Urusan Statistik dan Urusan Persandian

Kinerja urusan statistik dan urusan persandian Kota Bekasi sangat baik dan sudah berada pada level matang. Namun tantangan ke depan terkait dengan pemanfaatan data secara optimal, integrasi sistem, dan antisipasi ancaman siber. Ke depan perlu transformasi dari “data tersedia” menjadi “data sebagai penggerak kebijakan”. Untuk itu upaya yang dapat dilakukan meliputi optimalisasi pemanfaatan data (data untuk perencanaan dan evaluasi serta dashboard kinerja daerah), integrasi satu data daerah, interoperabilitas antar OPD, dan satu portal data terpadu), penguatan keamanan siber (audit keamanan berkala dan peningkatan kapasitas SDM), dan pengembangan analitik data (big data & AI untuk kebijakan serta prediksi dan perencanaan berbasis data).

T. Urusan Kebudayaan

Kinerja urusan kebudayaan Kota Bekasi tercapai sesuai target, namun masih bersifat stagnan dan terbatas. Tantangan utamanya yaitu skala pelestarian dan pemanfaatan budaya sebagai potensi ekonomi. Ke depan perlu fokus pada pengembangan budaya menjadi aset ekonomi dan identitas kota. Upaya yang dapat dilakukan meliputi perluasan dan pendataan cagar budaya (inventarisasi situs baru dan penetapan kawasan budaya), pengembangan kesenian tradisional (pembinaan komunitas seni dan regenerasi pelaku budaya), integrasi dengan ekonomi kreatif dan pariwisata (event budaya serta festival dan promosi digital), dan digitalisasi budaya (arsip digital dan promosi melalui media sosial).

U. Urusan Perpustakaan

Kinerja urusan perpustakaan Kota Bekasi sudah cukup baik. Namun tingkat kegemaran membaca dan literasi masyarakat mengalami penurunan jika dibandingkan dengan *baseline* 2024 dikarenakan terjadi perubahan perhitungan. Terdapat gap antara akses dan minat membaca serta kemampuan literasi yang sesungguhnya. Ke depan perlu peningkatan kualitas literasi, bukan hanya fasilitas. Upaya yang dapat dilakukan meliputi transformasi perpustakaan (dari tempat baca menjadi pusat aktivitas literasi serta ruang kreatif, diskusi, komunitas), penguatan program literasi (gerakan membaca aktif serta literasi digital dan informasi), digitalisasi layanan perpustakaan (e-library dan akses buku digital), dan kolaborasi dengan sekolah serta komunitas (program literasi berbasis komunitas dan kegiatan literasi rutin).

V. Urusan Kearsipan

Kinerja urusan kearsipan Kota Bekasi masih rendah dan menjadi isu krusial dalam tata kelola pemerintahan. Hal ini berpotensi mengganggu akuntabilitas, efisiensi, dan pengambilan keputusan. Ke depan perlu transformasi kearsipan menjadi sistem digital yang tertib, terintegrasi, dan strategis. Upaya yang dapat dilakukan meliputi penguatan tata kelola kearsipan (standarisasi pengelolaan arsip di OPD serta monitoring dan evaluasi rutin), digitalisasi arsip (e-arsip terintegrasi dan sistem manajemen arsip elektronik), peningkatan kapasitas SDM (pelatihan arsiparis dan penempatan tenaga khusus), dan integrasi dengan SPBE dan Satu Data.

W. Urusan Kelautan dan Perikanan

Kinerja urusan perikanan Kota Bekasi stabil dan tercapai sesuai target. Namun belum menunjukkan pertumbuhan signifikan. Ke depan perlu peningkatan produktivitas dan nilai tambah (hilirisasi). Upaya yang dapat dilakukan meliputi peningkatan produktivitas (teknologi budidaya intensif dan urban aquaculture), penguatan hilirisasi (branding dan pemasaran), dukungan UMKM perikanan (pelatihan dan akses pembiayaan), dan integrasi dengan ekonomi lokal.

X. Urusan Pariwisata

Kinerja urusan pariwisata Kota Bekasi sudah tercapai sesuai target. Namun masih bersifat stabil, skala terbatas, dan belum berdampak besar secara ekonomi. Ke depan perlu fokus pada peningkatan daya tarik, promosi, dan integrasi dengan ekonomi kreatif. Upaya yang dapat dilakukan meliputi penguatan branding pariwisata (*city branding* Kota Bekasi serta promosi digital dan event), integrasi pariwisata dan ekonomi kreatif (festival, event budaya dan kuliner serta kolaborasi UMKM kreatif), pengembangan destinasi tematik (wisata urban, wisata kuliner, dan wisata komunitas), dan peningkatan daya tarik wisata.

Y. Urusan Pertanian

Urusan pertanian Kota Bekasi menunjukkan kinerja beragam dengan kekuatan pada peternakan. Namun terdapat kelemahan pada produksi tanaman pangan. Ke depan perlu fokus pada adaptasi pertanian perkotaan dan penguatan sub sektor unggulan. Upaya yang dapat dilakukan meliputi pengembangan pertanian perkotaan (urban farming serta hidroponik dan vertikultur), penguatan sub sektor peternakan (skala usaha dan hilirisasi produk), peningkatan produktivitas hortikultura (teknologi pertanian dan intensifikasi lahan), dan ketahanan pangan kota (kerja sama antar daerah dan diversifikasi pangan).

Z. Urusan Perdagangan dan Urusan Perindustrian

Kinerja urusan perdagangan dan urusan perindustrian Kota Bekasi secara umum baik, terutama pada ekspor dan tertib niaga. Namun terdapat tantangan utama pada pengendalian inflasi. Ke depan perlu fokus pada menjaga stabilitas harga tanpa mengganggu pertumbuhan perdagangan. Upaya yang dapat dilakukan meliputi pengendalian inflasi pangan (operasi pasar, kerja sama antar daerah, dan penguatan distribusi), penguatan rantai pasok (sistem logistik pangan dan ketersediaan stok), peningkatan daya saing IKM (digitalisasi serta akses pasar dan ekspor), dan penguatan perdagangan ekspor (diversifikasi pasar dan hilirisasi produk).

AA. Sekretariat Daerah

Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi sangat kuat dari sisi sistem, regulasi, dan administrasi. Namun masih terdapat tantangan pada kualitas data wilayah dan akuntabilitas kinerja. Ke depan perlu transformasi menuju pemerintahan berbasis data dan hasil (*outcome-oriented governance*). Upaya yang dapat dilakukan meliputi penguatan data wilayah (update profil kelurahan dan integrasi dengan Satu Data), peningkatan kualitas SAKIP (fokus pada outcome dan evaluasi kinerja berbasis hasil), transformasi tata Kelola (dari administratif menuju berbasis kinerja dan *data-driven decision*), dan integrasi sistem pemerintahan (sinkronisasi SPBE, SAKIP, dan data dashboard kinerja daerah).

BB. Sekretariat DPRD

Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi sangat baik dari sisi proses legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Namun tantangan ke depan adalah meningkatkan kualitas kebijakan dan memperkuat dampak pengawasan. Upaya yang dapat dilakukan antara lain peningkatan kualitas regulasi (Perda berbasis kebutuhan masyarakat dan kajian akademik yang kuat), penguatan fungsi pengawasan (monitoring implementasi kebijakan dan evaluasi dampak program), peningkatan partisipasi publik, dan penguatan kapasitas DPRD.

CC. Perencanaan

Kinerja perencanaan Kota Bekasi sudah sangat baik dan selaras. Namun implementasi program belum optimal. Terdapat gap antara perencanaan dan pelaksanaan. Ke depan perlu memperkuat pelaksanaan dan pengendalian program pembangunan. Upaya yang dapat dilakukan meliputi penguatan pengendalian dan evaluasi (monitoring berkala), peningkatan kualitas implementasi (pendampingan OPD dan evaluasi kinerja berbasis output dan outcome), integrasi perencanaan-penganggaran-pelaksanaan (sinkronisasi RKPD, APBD, dan realisasi), dan penguatan evaluasi kinerja (fokus pada hasil serta *reward* dan *punishment* OPD).

DD. Keuangan

Kinerja keuangan Kota Bekasi sangat baik dari sisi tata kelola dan disiplin anggaran. Namun masih terdapat kelemahan pada optimalisasi pendapatan daerah dan pengelolaan aset. Ke depan perlu fokus pada peningkatan PAD dan memaksimalkan pemanfaatan aset daerah. Upaya yang dapat dilakukan antara lain optimalisasi PAD (ekstensifikasi dan intensifikasi pajak serta digitalisasi pajak daerah), penagihan piutang pajak (sistem penagihan aktif serta insentif dan disinsentif wajib pajak), penguatan manajemen aset (inventarisasi dan sertifikasi aset serta pemanfaatan aset produktif), dan peningkatan kualitas laporan keuangan (pembinaan OPD dan penguatan akuntansi berbasis sistem).

EE. Kepegawaian

Kualitas administrasi dan kompetensi ASN Kota Bekasi sudah sangat baik. Namun masih terdapat tantangan pada kinerja dan disiplin ASN yang cenderung stagnan. Ke depan perlu mengubah kompetensi menjadi kinerja nyata (performance-driven ASN). Upaya yang dapat dilakukan meliputi penguatan manajemen kinerja (penilaian berbasis output dan outcome serta target kinerja individu yang jelas), link kompetensi dengan kinerja (pelatihan berbasis kebutuhan kerja dan evaluasi pasca pelatihan), sistem *reward* dan *punishment* (insentif berbasis kinerja dan disiplin ASN ditegakkan konsisten), dan digitalisasi manajemen ASN (e-kinerja dan monitoring kinerja real-time).

FF. Penelitian dan Pengembangan

Kinerja penelitian dan pengembangan Kota Bekasi sangat baik dengan peningkatan signifikan pada capaian inovasi. Peningkatan ini dikarenakan adanya perbaikan kualitas inovasi yang dilakukan. Namun perlu penguatan pada pemanfaatan hasil penelitian secara optimal dan keberlanjutan serta dampak inovasi. Untuk itu perlu menjadikan inovasi sebagai solusi nyata pembangunan, bukan sekadar capaian administratif. Upaya yang dapat dilakukan meliputi hilirisasi inovasi (memastikan inovasi diterapkan dalam program dan replikasi inovasi yang berhasil), penguatan ekosistem inovasi

(kolaborasi OPD, akademisi, dan swasta), integrasi dengan perencanaan (inovasi masuk dalam RKPD dan berbasis kebutuhan kota), dan monitoring dampak inovasi (mengukur manfaat nyata, bukan hanya jumlah inovasi).

GG. Pengawasan

Kinerja pengawasan Kota Bekasi sudah cukup baik dan matang. Namun terdapat kelemahan pada tindak lanjut temuan eksternal dan penurunan indikator pencegahan korupsi. Ke depan perlu memperkuat akuntabilitas eksternal dan sistem pencegahan korupsi. Upaya yang dapat dilakukan meliputi percepatan tindak lanjut temuan eksternal (monitoring khusus dan penegasan tanggung jawab OPD), penguatan pencegahan korupsi (peningkatan MCP KPK, dan transparansi serta digitalisasi proses), optimalisasi peran APIP (audit berbasis risiko dan pendampingan OPD), dan integrasi manajemen risiko (mitigasi risiko masuk dalam perencanaan).

HH. Kecamatan

Kinerja kecamatan Kota Bekasi sangat baik dengan capaian maksimal di seluruh indikator. Namun perlu perhatian pada kualitas layanan yang lebih mendalam dan akurasi pengukuran kinerja. Ke depan perlu untuk meningkatkan kualitas dan keberlanjutan pelayanan masyarakat di tingkat kecamatan. Upaya yang dapat dilakukan antara lain pendalaman kualitas layanan (survei kepuasan lebih detail dan indikator berbasis kualitas, bukan hanya kuantitas), penguatan peran LKM (pemberdayaan masyarakat dan kegiatan berbasis komunitas), sistem deteksi dini konflik (*early warning system* sosial dan pendekatan preventif), dan inovasi pelayanan kecamatan (digitalisasi layanan serta pelayanan cepat dan terintegrasi).

II. Pemerintahan Umum

Kinerja Kesbangpol Kota Bekasi sangat baik dengan stabilitas sosial-politik yang terjaga. Namun terdapat tantangan pada kualitas partisipasi masyarakat dan deteksi dini konflik. Fokus ke depan perlu untuk memperkuat ketahanan sosial yang adaptif dan partisipatif. Upaya yang dapat dilakukan meliputi penguatan deteksi dini konflik (*early warning system* dan pemetaan potensi konflik sosial), peningkatan kualitas pendidikan politik (literasi demokrasi dan partisipasi politik yang sehat), pemberdayaan organisasi masyarakat (peran aktif dalam pembangunan dan kolaborasi dengan pemerintah), dan penguatan ketahanan sosial (program lintas budaya dan agama serta pencegahan radikalisme dan narkoba).

Meskipun demikian, terdapat tantangan yang akan dihadapi terkait penerapan SPM Pendidikan ini, antara lain:

- Masih rendahnya capaian partisipasi sekolah PAUD usia 5–6 tahun, dimana capaian angka partisipasi sekolah tidak mencapai target 80 persen. Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan akses layanan, kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan anak usia dini, serta kondisi sosial ekonomi keluarga. Intervensi yang dapat dilaksanakan antara lain melakukan pendataan ulang layanan PAUD usia 5–6 tahun dengan memastikan semua satuan PAUD terdaftar dalam Dapodik/EMIS, meningkatkan advokasi dan sosialisasi kepada orang tua tentang pentingnya pendidikan usia dini, serta memperluas layanan PAUD berbasis komunitas di wilayah dengan partisipasi rendah.

- Masih belum meratanya mutu layanan pendidik PAUD, ditunjukkan dengan rendahnya proporsi guru PAUD berpendidikan S1/D-IV yang hanya sebesar 61,43 persen dan rendahnya tenaga pendidik bersertifikat (42,01 persen) serta proporsi PTK penggerak yang masih sangat rendah (0,92 persen). Hal ini diperlukan intervensi melalui peningkatan kualifikasi pendidik PAUD secara bertahap melalui fasilitasi program peningkatan kompetensi (RPL, beasiswa S1/D-IV, pelatihan profesi), serta mengoptimalkan kemitraan dengan perguruan tinggi dan lembaga pelatihan untuk meningkatkan proporsi PTK bersertifikat dan PTK penggerak.
- Masih rendahnya kecukupan dan distribusi pendidik tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP), ditunjukkan dengan rendahnya kecukupan formasi guru ASN pada jenjang SD dan SMP (30,65 persen) serta indeks distribusi guru di SD (19,02 persen) dan SMP (73,40 persen) yang menunjukkan ketidakseimbangan penempatan tenaga pendidik. Intervensi yang dapat dilakukan antara lain memperkuat strategi pemenuhan kebutuhan dan distribusi pendidik SD-SMP, dengan melakukan pemetaan kebutuhan guru per sekolah, redistribusi dini guru antar satuan pendidikan, serta mengajukan tambahan formasi ASN dan PPPK sesuai kekurangan riil pada satuan pendidikan dasar.
- Masih rendahnya capaian partisipasi sekolah pendidikan kesetaraan, di mana angka partisipasi kasar realisasinya sebesar 27,14 persen. Masih rendahnya capaian partisipasi sekolah pendidikan kesetaraan disebabkan oleh rendahnya minat masyarakat untuk kembali melanjutkan pendidikan, keterbatasan waktu belajar bagi peserta didik yang sudah bekerja, kurangnya sosialisasi mengenai program Paket A, Paket B, dan Paket C, serta faktor sosial ekonomi dan dukungan keluarga yang belum optimal. Untuk itu perlu mengoptimalkan penjangkauan pendidikan kesetaraan melalui pendataan ulang kelompok usia 7-18 tahun yang tidak/putus sekolah, kolaborasi dengan kelurahan/RT/RW, memfasilitasi layanan pendidikan kesetaraan berbasis komunitas, serta menyediakan biaya personal untuk memastikan siswa rentan dapat kembali belajar.

A. Kesehatan

Capaian pelayanan kesehatan yang harus dipenuhi Pemerintah Kota Bekasi pada tahun 2025 secara keseluruhan sudah mencapai target 100 persen. Pencapaian ini dilaksanakan melalui dukungan 1 program dan 1 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.5.457.185.632,00.

Namun demikian, terdapat tantangan yang akan dihadapi ke depannya, yaitu:

- Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil, kesehatan ibu bersalin dan kesehatan bayi baru lahir masih terkendala kemitraan dengan lintas program dan lintas sektor dalam hal pelaporan yang masih belum kuat sehingga diperlukan peningkatan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor tersebut.
- Pengelolaan pelayanan kesehatan balita terkendala masyarakat yang masih kurang memahami tentang pentingnya pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita dalam peningkatan kualitas

anak. Selain itu masih kurang kuatnya jejaring kemitraan pemangku kepentingan. Untuk itu diperlukan penguatan sosialisasi kepada masyarakat secara kontinyu, pembuatan MoU antara pemangku kepentingan terkait pelayanan bagi balita terutama dalam hal pencatatan dan pelaporan fasilitas kesehatan di kirim ke Puskesmas wilayah.

- Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar terkendala pengadaan buku rapor kesehatan yang masih sangat minim dibandingkan jumlah anak baru masuk sekolah di tiap tahunnya. Untuk itu diperlukan penambahan pengadaan buku rapor kesehatan dan pemantauan kesehatan anak usia pendidikan dasar.
- Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif perlu dukungan lintas sektor dalam pengumpulan massa pada kegiatan skrining kesehatan di wilayah. Oleh karena itu diperlukan peningkatan koordinasi dengan lintas sektor dalam penerapan SPM.
- Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut masih ditemui adanya keterbatasan lansia dan kesadaran untuk rutin memeriksakan diri yang masih rendah. Untuk mengatasi hal itu, perlu dilakukan jemput bola untuk pelayanan kesehatan lansia dan penambahan tenaga pelayanan kesehatan.
- Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi masih terkendala dengan banyaknya masyarakat penderita Hipertensi yang belum memanfaatkan pelayanan kesehatan secara rutin. Untuk itu perlu mengoptimalkan lagi edukasi kepada masyarakat tentang pemantauan kesehatan penderita hipertensi secara teratur.
- Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus terkendala aplikasi SIPTM yang terkadang bermasalah pada saat pengambilan data untuk pelaporan. untuk itu diperlukan upaya penyampaian keluhan secara berjenjang agar ada perbaikan.
- Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat masih terkendala dengan tingginya rasa malu di masyarakat dan keluarga yang memiliki orang dengan masalah kesehatan jiwa sehingga menghambat penanganan masalah jiwa sedini mungkin. Oleh karena itu diperlukan peningkatan edukasi pentingnya kesehatan jiwa kepada masyarakat dan keluarga yang memiliki ODMK, meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam penanganan masalah kesehatan jiwa.
- Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis terkendala dengan adanya stigma negatif dari masyarakat sehingga masyarakat yang menderita TBC enggan datang ke Puskesmas untuk berobat. Untuk itu diperlukan penyuluhan dan edukasi ke masyarakat tentang TBC dan bekerja sama dengan bidang kesehatan masyarakat dan OPD lain seperti Diskominfo standi dalam rangka penyebarluasan informasi terkait TBC.

B. Pekerjaan Umum

Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-sehari serta pengolahan air limbah domestik capaiannya pada tahun 2025 telah mencapai 100 persen. Pencapaian ini dilaksanakan melalui dukungan 2 program dan 2

kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.56,754,095,530,00. Hal ini perlu untuk tetap dipertahankan pada periode berikutnya.

Permasalahan yang sebelumnya terjadi perlu diantisipasi agar tidak terjadi kembali, seperti potensi adanya penolakan warga untuk diberikan akses air minum perpipaan karena sumber air minum dari air tanah dirasa masih layak, potensi adanya pelaksanaan kegiatan pembangunan yang tidak sejalan dengan kegiatan air minum, potensi diperlukannya ketersediaan lahan untuk pembangunan instalasi air minum baru, koordinasi dan integrasi pembangunan air minum antar OPD yang perlu dioptimalkan, kapasitas IPLT yang mungkin perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan ke depannya, serta perlunya meningkatkan kesadaran warga untuk pengelolaan air limbah domestik.

C. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana serta fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kota Bekasi capaiannya masing-masing yaitu 100 persen dan 0 persen. Capaian 0 persen ini maksudnya yaitu pada tahun 2025 tidak terdapat program pemerintah yang mengharuskan dilakukannya relokasi masyarakat. Untuk itu, tantangan untuk melaksanakan SPM ini lebih bagaimana memitigasi bencana yang mungkin terjadi dan memitigasi dampak program pemerintah. Adapun pencapaian SPM ini didukung dengan 1 program dan 2 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.555.000.000,00.

D. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Terdapat 5 (lima) pelayanan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang harus disediakan Pemerintah Kota Bekasi. Dari kelima pelayanan tersebut, 4 (empat) diantaranya sudah mencapai target 100 persen yaitu pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Adapun pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana capaiannya masih belum 100 persen. Keseluruhan capaian ini didukung melalui 3 program dan 12 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 5.105.617.000,00.

Secara keseluruhan tantangan penerapan SPM ini terkait dengan kurangnya SDM kebencanaan yang terlatih dan tersertifikasi, belum terpenuhinya fasilitas 3 pos sektor pada setiap kecamatan di Kota Bekasi (Bekasi Barat, Bekasi Timur, Pondok Melati), belum adanya Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP), serta belum semua sarana dan prasarana kesiapsiagaan pemadam kebakaran dan penyelamatan terpenuhi berdasarkan standar nasional.

E. Sosial

Dari 5 jenis pelayanan sosial yang harus dilaksanakan Pemerintah Kota Bekasi semuanya sudah mencapai target 100 persen. Capaian ini didukung melalui 1 program dan 2 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.8.736.503.960,00. Namun masih terdapat tantangan yang harus ditangani yaitu berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia teknis yang berkompeten dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial.

2.2.3 CAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Data termutakhir terkait dengan capaian indikator TPB yaitu tahun 2022 (Laporan KLHS RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029) dan hanya tersedia beberapa indikator saja. Akan tetapi, jika merujuk pada capaian indikator TPB tahun sebelumnya menunjukkan bahwa dari 199 indikator TPB yang menjadi kewenangan Kota Bekasi, terdapat 76,88 persen indikator yang diketahui capaiannya, sedangkan 23,12 persen sisanya masih belum dapat diketahui capaiannya karena tidak tersedianya data. Dari data tersebut, terdapat 43,72 persen yang telah mencapai target Nasional, 33,17 persen yang belum mencapai target Nasional dan 23,12 persen tidak tersedia datanya.

Berdasarkan identifikasi, pengumpulan, dan analisis data terhadap 199 indikator TPB kewenangan Kota Bekasi yang dibagi ke dalam 4 Pilar Pembangunan yaitu Pilar Pembangunan Sosial, Pilar Pembangunan Ekonomi, Pilar Pembangunan Lingkungan, dan Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola, berikut hasil capaian target indikator TPB Per Pilar di Kota Bekasi:

1. Pilar Sosial

Sebagian besar indikator TPB Pilar Sosial di Kota Bekasi sudah mencapai target Nasional, yaitu sebanyak 52 indikator atau sebesar 55,32 persen. Namun, masih terdapat 28 indikator atau sebesar 29,79 persen indikator yang belum mencapai target Nasional dan 14 indikator atau sebesar 14,89 persen yang belum ada data. Indikator TPB Pilar Sosial yang belum mencapai target Nasional dan belum ada data perlu menjadi perhatian karena merupakan gap/permasalahan di Kota Bekasi.

2. Pilar Ekonomi

Sebagian besar indikator TPB Pilar Ekonomi di Kota Bekasi sudah mencapai target Nasional, yaitu sebanyak 15 indikator atau sebesar 32,61 persen. Namun, masih terdapat 17 indikator atau sebesar 36,96 persen indikator yang belum mencapai target Nasional dan 14 indikator atau sebesar 30,43 persen yang belum ada data. Indikator TPB Pilar Ekonomi yang belum mencapai target Nasional dan belum ada data perlu menjadi perhatian karena merupakan gap/permasalahan di Kota Bekasi. Selain itu,

indikator TPB Pilar Ekonomi yang tidak tersedia data capaiannya perlu diperhatikan karena jumlahnya masih cukup besar sehingga kondisi ini tidak dapat diketahui secara utuh dan menyeluruh.

3. Pilar Lingkungan

Indikator TPB Pilar Lingkungan di Kota Bekasi sudah mencapai target Nasional yaitu sebanyak 14 indikator atau sebesar 36,84 persen. Namun, masih terdapat 13 indikator atau sebesar 34,21 persen indikator yang belum mencapai target Nasional dan 11 indikator atau sebesar 28,95 persen yang belum ada data. Indikator yang belum mencapai target Nasional dan belum ada data perlu menjadi perhatian karena merupakan gap/permasalahan di Kota Bekasi. Selain itu, indikator yang tidak tersedia data capaiannya perlu diperhatikan karena jumlahnya masih cukup besar sehingga kondisi terkait Pilar Lingkungan di Kota Bekasi tidak dapat diketahui secara utuh dan menyeluruh.

4. Pilar Tata Kelola dan Hukum

Indikator TPB Pilar Tata Kelola dan Hukum di Kota Bekasi sudah mencapai target Nasional yaitu sebanyak 6 indikator atau sebesar 28,57 persen. Namun, masih terdapat 8 indikator atau sebesar 38,10 persen indikator yang belum mencapai target Nasional dan 7 indikator atau sebesar 33,33 persen yang belum ada data. Indikator yang belum mencapai target Nasional dan belum ada data perlu menjadi perhatian karena merupakan gap/permasalahan di Kota Bekasi. Selain itu, indikator yang tidak tersedia data capaiannya perlu diperhatikan karena jumlahnya masih cukup besar sehingga kondisi terkait Pilar Tata Kelola dan Hukum di Kota Bekasi tidak dapat diketahui secara utuh dan menyeluruh.

Berdasarkan uraian di atas dan analisis capaian TPB yang dilakukan dengan menghitung selisih antara capaian indikator TPB di Kota Bekasi terhadap target capaian Nasional, beberapa rekomendasi yang perlu dipertimbangkan untuk perumusan isu strategis Kota Bekasi ke depannya, antara lain terkait dengan:

- Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan (TPB 11)
- Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia (TPB 3)
- Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua (TPB 6)
- Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi (TPB 9)
- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua (TPB 8)
- Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya (TPB 13)
- Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan (TPB 17)

2.2.4 CAPAIAN TERHADAP PRIORITAS KOTA BEKASI

Program prioritas pembangunan Kota Bekasi dihasilkan dari cascading kinerja yang dimulai dari visi sampai dengan outcome yang perumusannya memperhatikan program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi sebagaimana disampaikan saat mendaftar pencalonan kepala daerah di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi. Program unggulan tersebut diperkenalkan dengan “Sapta Program Kota Bekasi Keren”, yaitu 7 (tujuh) program unggulan percepatan pembangunan Kota Bekasi Keren yang dimaknai sebagai gambaran rasa bangga atas kemajuan dan perkembangan kondisi Kota Bekasi yang semakin nyaman kotanya dan semakin sejahtera masyarakatnya sesuai dengan visi yang ditetapkan.

Berdasarkan cascading tujuan, sasaran, dan outcome, diketahui bahwa program prioritas yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

1. Program prioritas dalam rangka mendukung Gerakan Kobe Cerdas terdiri dari 3 program;
2. Program prioritas dalam rangka mendukung Gerakan Kobe Sehat terdiri dari 4 program;
3. Program prioritas dalam rangka mendukung Gerakan Kobe Hijau terdiri dari 13 program;
4. Program prioritas dalam rangka mendukung Gerakan Kobe Berkarya terdiri dari 8 program;
5. Program prioritas dalam rangka mendukung Gerakan Kobe Menarik terdiri dari 9 program;
6. Program prioritas dalam rangka mendukung Gerakan Kobe Bersinergi terdiri dari 7 program; dan
7. Program prioritas dalam rangka mendukung Gerakan Kobe Berkinerja terdiri dari 11 program

Pelaksanaan prioritas pembangunan Kota Bekasi Tahun 2025 menunjukkan kinerja fisik yang sangat baik, dengan rata-rata realisasi fisik mencapai sekitar 95,41 persen. Hal ini menunjukkan sebagian besar program dan kegiatan prioritas telah terlaksana sesuai rencana. Sementara itu, rata-rata realisasi anggaran mencapai sekitar 79,71 persen, yang mengindikasikan bahwa capaian fisik relatif lebih tinggi dibandingkan tingkat penyerapan anggaran. Kondisi ini menunjukkan adanya efisiensi pelaksanaan program, namun juga perlu dicermati kemungkinan adanya kegiatan yang belum sepenuhnya terealisasi secara keuangan.

Prioritas dengan capaian terbaik adalah Gerakan Kobe Berkarya, Gerakan Kobe Bersinergi, dan Gerakan Kobe Cerdas, yang hampir seluruh targetnya berhasil direalisasikan. Namun demikian, Gerakan Kobe Menarik perlu menjadi perhatian karena memiliki capaian fisik dan penyerapan anggaran paling rendah dibandingkan prioritas lainnya. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap kesenjangan antara capaian fisik dan realisasi anggaran pada beberapa prioritas untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan program pembangunan daerah.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja, ke depan perlu dilakukan langkah-langkah seperti:

1. Mempertahankan praktik baik pada Gerakan Kobe Berkarya, Kobe Bersinergi, dan Kobe Cerdas
2. Mengoptimalkan perencanaan dan percepatan penyerapan anggaran terutama pada program dengan selisih fisik-anggaran yang tinggi
3. Memperkuat monitoring dan evaluasi triwulanan untuk memastikan keselarasan antara capaian fisik dan realisasi keuangan
4. Menjadikan capaian prioritas pembangunan sebagai dasar penyempurnaan RKPD Kota Bekasi Tahun 2027

2.2.5 CAPAIAN TERHADAP PRIORITAS JAWA BARAT

Selain berkontribusi terhadap pencapaian target nasional, Kota Bekasi juga berupaya untuk berkontribusi terhadap pencapaian prioritas Jabar Istimewa. Kontribusi Kota Bekasi terhadap pencapaian Jabar Istimewa tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

1. dengan strategi yang lebih kontekstual. Mengingat TPT Kota Bekasi termasuk tinggi di Jawa Barat, kontribusi Kota Bekasi pada Langkah 4 (Ekonomi dan Tata Ruang) harus didorong melampaui target Jabar Istimewa. Program vokasi, *link and match* industri, dan pengembangan wirausaha digital perlu diperkuat secara signifikan.
2. Menjadikan Langkah 6 dan Langkah 9 sebagai model replikasi internal. Kedua hal ini memiliki gap realisasi fisik dan anggaran yang relatif kecil. Ini menunjukkan bahwa Kota Bekasi mampu mengelola program dengan seimbang antara fisik dan keuangan. Praktik tata kelola terbaik dari dua program ini perlu didokumentasikan dan direplikasikan ke seluruh program lainnya.

2.2.6 CAPAIAN TERHADAP PRIORITAS NASIONAL

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045 perlu sinkronisasi perencanaan antara pusat dan daerah, prioritas daerah harus mendukung prioritas nasional. Prioritas nasional merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden, dimana Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas presiden yang mencakup rencana pembangunan diberbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC). Dukungan Kota Bekasi terhadap pencapaian Asta Cita Tahun 2025 menunjukkan kinerja “Sedang” (63,58 persen) untuk aspek anggaran dan “Tinggi” (89,51 persen) untuk aspek fisik. Hal ini menandakan pelaksanaan program berjalan baik secara substansial, namun masih memerlukan percepatan administrasi dan pembayaran.

Berdasarkan rekapitulasi, mayoritas program fisik telah berada pada kategori “Tinggi” hingga “Sangat Tinggi”, khususnya pada sektor pendidikan dan pelatihan, kesehatan masyarakat, lingkungan hidup dan pengendalian pencemaran, serta penanaman modal dan pelayanan perizinan.

Untuk meningkatkan kinerja capaian terhadap Asta Cita diperlukan upaya seperti percepatan penyelesaian administrasi keuangan dan SPJ pada program berpredikat SR dan R, memprioritaskan percepatan realisasi sektor infrastruktur dan ketahanan pangan, mempertahankan program unggulan berpredikat ST sebagai contoh praktik baik, mengintegrasikan monitoring

fisik dan keuangan melalui e-Monev dan e-SAKIP lintas OPD, memperkuat kolaborasi dengan kementerian/lembaga pusat untuk sinkronisasi data dan dukungan pendanaan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam program lingkungan dan sosial untuk meningkatkan keberlanjutan hasil pembangunan

2.2.7 CAPAIAN TEMATIK PEMBANGUNAN

Tematik pembangunan adalah pendekatan perencanaan yang berfokus pada isu-isu prioritas spesifik, holistik, dan integratif untuk menjawab kebutuhan daerah dan selaras dengan kebijakan nasional. Pendekatan ini mengarahkan alokasi sumber daya, kebijakan, dan program pada tema tertentu. Terdapat 5 (lima) tema pembangunan yang akan dibahas dalam subbab ini, yaitu penanganan stunting, penanggulangan kemiskinan, pengendalian inflasi, pengurangan pengangguran, dan ketahanan pangan.

A. PENANGANAN STUNTING

Kota Bekasi telah menunjukkan keseriusan dalam penanggulangan stunting dengan berbagai langkah yang dilaksanakan, termasuk langkah serius dalam melaksanakan 28 program utama dalam penanganan stunting. Secara agregat, kinerja fisik tahun 2025 mencapai 94,38 persen (Sangat Tinggi) dan kinerja keuangan tahun mencapai 83,76 persen (Tinggi). Hal ini menandakan bahwa pada akhir tahun pelaksanaan intervensi penanganan stunting tidak hanya aktif di lapangan, tetapi juga telah diikuti oleh realisasi anggaran yang relatif optimal. Berikut uraian kinerja masing-masing urusan dalam penanganan stunting:

- Urusan Pendidikan: program BOP PAUD, BOS sekolah, dan layanan pendidikan dasar mencapai kinerja fisik tinggi hingga sangat tinggi. Sebagian kegiatan pembangunan dan rehabilitasi sarana PAUD serta ruang kelas masih menunjukkan capaian fisik yang lebih rendah dibandingkan layanan operasional. Pendidikan usia dini merupakan intervensi sensitif stunting yang berperan dalam stimulasi tumbuh kembang anak, pembentukan pola asuh, literasi gizi keluarga. Namun, ketertinggalan sebagian sarana fisik PAUD mengindikasikan perlunya percepatan pembangunan pendukung agar dampak pendidikan terhadap pencegahan stunting lebih merata.
- Urusan Kesehatan: pelayanan ibu hamil, balita, gizi masyarakat, posyandu, dan puskesmas mencapai kinerja fisik sangat tinggi, sejalan dengan realisasi keuangan yang tinggi. Program gizi spesifik dan promotif-preventif berjalan konsisten hingga akhir tahun. Urusan kesehatan merupakan intervensi spesifik stunting paling krusial. Untuk itu pemeriksaan kehamilan, pemantauan tumbuh kembang balita, pencegahan penyakit infeksi dan kekurangan gizi perlu menjadi fokus perhatian dalam intervensi lanjutan.
- Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: SPAM (air minum) menunjukkan kinerja fisik tahun tinggi hingga sangat tinggi. SPALD dan sanitasi lingkungan masih berada di bawah capaian air minum. Akses air minum dan sanitasi merupakan determinasi lingkungan utama stunting. Meskipun air minum layak telah menunjukkan capaian tinggi secara fisik, ketertinggalan sanitasi berpotensi menurunkan keberlanjutan hasil

intervensi kesehatan, khususnya terkait diare dan infeksi berulang pada balita.

- Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB): Program Kampung Keluarga Berkualitas dan pelayanan KB mencapai kinerja fisik tahun sangat tinggi (>90 persen). Realisasi keuangan mendukung pelaksanaan program secara berkelanjutan. Program KB berperan strategis dalam pengaturan jarak kelahiran, pencegahan kehamilan berisiko tinggi, penguatan kesiapan keluarga. Untuk itu perlu penguatan intervensi pada tahun berikutnya.
- Urusan Sosial: program perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan kelompok rentan mencapai kinerja fisik dan keuangan tahun sangat tinggi. Sasaran program langsung menyentuh keluarga berisiko stunting. Kemiskinan merupakan akar struktural stunting. Tingginya capaian urusan sosial menunjukkan intervensi berjalan efektif dalam menjaga daya beli keluarga, menjamin akses pangan dan layanan dasar anak, melindungi kelompok rentan.
- Urusan Pangan: program cadangan pangan dan diversifikasi pangan menunjukkan capaian lebih rendah dibandingkan urusan lain. Dampak terhadap peningkatan konsumsi protein keluarga belum optimal. Ketahanan pangan merupakan intervensi sensitif stunting. Meskipun secara agregat keuangan tahun telah tinggi (83,76 persen), capaian program pangan belum sepenuhnya berdampak langsung pada keluarga berisiko stunting, sehingga kontribusinya masih terbatas.
- Urusan Lingkungan Hidup: pengelolaan persampahan dan infrastruktur lingkungan menunjukkan capaian fisik yang relatif tertinggal. Dampak langsung terhadap lingkungan sehat belum merata. Lingkungan bersih sangat menentukan keberlanjutan hasil intervensi kesehatan. Rendahnya capaian pada sektor ini berpotensi menjadi hambatan penurunan stunting jangka panjang, meskipun intervensi kesehatan sudah sangat kuat.

B. PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Penanggulangan kemiskinan di Kota Bekasi tahun 2025 diintervensi melalui 26 program utama yang tersebar di berbagai urusan. Rekapitulasi kinerja penanggulangan kemiskinan pada tahun 2025 menunjukkan capaian yang sangat kuat dari sisi fisik dan relatif efektif dari sisi keuangan. Secara agregat kinerja fisik tahunan mencapai 94,04 persen (kategori Sangat Tinggi/ST) dan kinerja anggaran tahunan mencapai 81,63 persen (kategori Tinggi/T).

Realisasi anggaran tahunan tersebut menunjukkan bahwa secara umum alokasi anggaran telah mampu menopang pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, terutama pada kegiatan layanan langsung kepada masyarakat. Interpretasi: Program bantuan sosial, pelayanan dasar, dan pemberdayaan masyarakat menunjukkan realisasi anggaran relatif stabil; Kegiatan berbasis infrastruktur dasar dan sarana ekonomi produktif masih menunjukkan realisasi yang lebih rendah, meskipun fisiknya telah berjalan. Sementara pada capaian fisik, mayoritas kegiatan mencapai ≥90 persen hingga 100 persen fisik. Program yang bersifat layanan, bantuan sosial, dan pemberdayaan ekonomi lebih cepat diselesaikan dibandingkan

program infrastruktur. Sehingga output kegiatan telah direalisasikan dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat miskin dan rentan.

Adapun uraian kinerja urusan dalam penanggulangan kemiskinan, sebagai berikut:

- Urusan Pendidikan: program BOS, BOP PAUD, serta layanan pendidikan dasar mencapai kinerja fisik tahunan tinggi hingga sangat tinggi. Bantuan operasional pendidikan menjadi kontributor utama terhadap capaian tersebut. Pendidikan berperan sebagai intervensi tidak langsung penanggulangan kemiskinan, melalui pengurangan beban pengeluaran rumah tangga miskin dan peningkatan kualitas sumber daya manusia jangka panjang. Tingginya capaian fisik tahunan menunjukkan kontribusi pendidikan yang konsisten terhadap upaya memutus rantai kemiskinan struktural.
- Urusan Kesehatan: pelayanan kesehatan ibu dan anak, puskesmas, jaminan kesehatan, dan gizi masyarakat mencapai kinerja fisik tahunan sangat tinggi. Realisasi keuangan relatif sejalan dengan capaian fisik. Intervensi kesehatan menurunkan kemiskinan dilakukan melalui pengurangan beban biaya kesehatan rumah tangga miskin serta pencegahan kemiskinan baru akibat sakit kronis dan penurunan produktivitas.
- Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman: penyediaan air minum, sanitasi, perumahan, dan PSU menunjukkan peningkatan fisik yang signifikan. Sebagian kegiatan infrastruktur masih diselesaikan secara bertahap. Infrastruktur dasar berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin serta akses terhadap layanan dasar dan aktivitas ekonomi. Namun, karena dampaknya bersifat jangka menengah, kontribusinya terhadap penurunan kemiskinan belum sepenuhnya tercermin pada tahun 2025.
- Urusan Sosial: program perlindungan fakir miskin, rehabilitasi sosial, lansia, dan disabilitas mencapai kinerja fisik dan keuangan tahunan sangat tinggi. Sasaran program langsung menyentuh rumah tangga miskin. Program sosial merupakan intervensi langsung penanggulangan kemiskinan ekstrem, dengan dampak cepat terhadap daya beli dan ketahanan rumah tangga miskin.
- Urusan Ketenagakerjaan dan Urusan UMKM: pelatihan kerja, fasilitasi UMKM, dan bantuan usaha mikro menunjukkan capaian fisik tahunan tinggi. Program bersifat produktif dan berorientasi pendapatan. Sektor ini berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga serta pengurangan kemiskinan struktural dan kerentanan ekonomi.
- Urusan Pangan: program ketahanan pangan menunjukkan capaian fisik dan dampak yang relatif lebih rendah dibanding urusan lain. Keterbatasan integrasi sasaran rumah tangga miskin menjadi faktor utama rendahnya kontribusi sektor pangan terhadap penurunan kemiskinan secara langsung.

C. PENGENDALIAN INFLASI

Rekapitulasi kinerja penanganan inflasi Kota Bekasi pada tahun 2025 menunjukkan perbaikan yang sangat signifikan, baik dari sisi fisik maupun keuangan. Secara agregat, melalui 13 program intervensi, kinerja fisik

mencapai 94,86 persen dengan kategori Sangat Tinggi (ST). Kinerja anggaran mencapai 86,89 persen dengan kategori Tinggi (T). Capaian ini menunjukkan bahwa hingga akhir tahun 2025, sebagian besar intervensi pengendalian inflasi telah terealisasi secara nyata di lapangan, dan diikuti oleh realisasi anggaran yang relatif optimal. Adapun kinerja urusan dalam pengendalian inflasi, sebagai berikut:

- Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: pembangunan dan rekonstruksi jalan menunjukkan capaian fisik tinggi. Beberapa kegiatan rehabilitasi jembatan dan pelebaran jalan masih tertahan. Infrastruktur jalan berperan penting dalam kelancaran distribusi barang. Keterlambatan sebagian pekerjaan fisik menyebabkan dampak pengendalian inflasi belum sepenuhnya optimal, meskipun tren perbaikan terlihat jelas pada TW IV.
- Urusan Sosial: bantuan sosial kesejahteraan keluarga dan pengembangan ekonomi masyarakat terealisasi >95 persen fisik. Realisasi keuangan mendukung langsung kelompok rentan. Intervensi sosial terbukti efektif dalam menahan tekanan inflasi dari sisi daya beli, terutama bagi rumah tangga berpendapatan rendah.
- Urusan Perdagangan: operasi pasar, monitoring harga, dan penguatan distribusi barang pokok mencapai >90 persen fisik. Stabilisasi harga berjalan efektif pada TW IV. Perdagangan dan distribusi menjadi penopang utama keberhasilan pengendalian inflasi jangka pendek, terutama pada komoditas strategis.
- Urusan UMKM: program pemberdayaan UMKM menunjukkan fisik sangat tinggi. UMKM lokal berperan dalam menjaga pasokan barang konsumsi. Penguatan UMKM membantu stabilisasi inflasi dari sisi penawaran lokal, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi daerah.
- Urusan Perhubungan: beberapa kegiatan transportasi menunjukkan realisasi rendah. Angkutan umum antar daerah belum optimal. Transportasi merupakan titik lemah struktural yang memengaruhi distribusi barang dan biaya logistik, sehingga berpotensi menahan efektivitas pengendalian inflasi.

D. PENGURANGAN PENGANGGURAN

Total anggaran program penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Bekasi pada Tahun 2025 tercatat sebesar Rp1.347.345.100, dengan target Triwulan IV sebesar 100 persen dari total rencana tahunan. Berdasarkan realisasi hingga Triwulan IV, capaian anggaran mencapai Rp1.323.931.000 atau 98,26 persen dari target anggaran tahunan. Sementara itu, capaian fisik tercatat 100 persen, menunjukkan bahwa seluruh output kegiatan utama telah terlaksana di lapangan.

Secara keseluruhan, kinerja penurunan TPT Kota Bekasi pada tahun 2025 yang diintervensi melalui 2 program utama berada pada kategori “Sangat Tinggi (ST)”. Kondisi ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program, ketepatan sasaran, serta kontribusi nyata terhadap peningkatan kesempatan kerja dan penguatan pasar kerja daerah. Secara khusus, beberapa kegiatan yang menopang kinerja meliputi:

- Pelatihan kerja berbasis unit kompetensi terbukti efektif dalam meningkatkan daya saing dan keterampilan tenaga kerja lokal. Pelaksanaan pelatihan berdasarkan klaster kompetensi memungkinkan

peserta memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri, sehingga peluang penyerapan kerja menjadi lebih besar.

- *Job Fair* dan bursa kerja berperan sebagai jembatan langsung antara pencari kerja dan dunia usaha. Kegiatan ini mempercepat proses *matching* tenaga kerja dan memberikan kontribusi nyata dalam menurunkan angka pengangguran terbuka, khususnya bagi lulusan baru dan pencari kerja aktif.
- Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) meskipun capaian fisik tercatat 100 persen, realisasi anggaran masih berada pada kisaran menengah. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan koordinasi lintas wilayah dan lintas sektor dalam pelaksanaan perlindungan PMI agar manfaat program dapat dirasakan lebih merata.

E. KETAHANAN PANGAN

Rekapitulasi kinerja ketahanan pangan Kota Bekasi pada tahun 2025 menunjukkan capaian yang relatif baik dari sisi fisik, namun masih menyisakan ketimpangan pada kinerja anggaran. Secara umum, kinerja ketahanan pangan Kota Bekasi yang diintervensi melalui 5 program pembangunan berada pada kategori “Tinggi (T)” dengan capaian realisasi fisik sebesar 79,95 persen. Capaian tersebut terutama didukung dari sektor keamanan pangan dan kesehatan hewan dan veteriner. Sementara total anggaran program ketahanan pangan Kota Bekasi Tahun 2025 tercatat sebesar Rp5.671.122.000 dan hingga Triwulan IV, realisasi anggaran mencapai Rp4.110.052.537 atau 72,47 persen. Uraian kinerja masing-masing program adalah sebagai berikut:

- Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat: kegiatan pencapaian target konsumsi pangan dan pemberdayaan masyarakat berbasis sumber daya lokal mencatat capaian fisik 73,9 persen. Program ini seharusnya menjadi pilar utama peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat. Namun, capaian yang masih moderat menunjukkan bahwa dampaknya terhadap ketahanan pangan rumah tangga belum sepenuhnya optimal.
- Program Penanganan Kerawanan Pangan: penyusunan peta ketahanan dan kerawanan pangan kecamatan menunjukkan capaian sangat rendah. Sebaliknya, penanganan kerawanan pangan kewenangan kota telah mencapai 90,17 persen anggaran dan fisik. Intervensi berbasis bantuan dan penanganan langsung berjalan baik, namun aspek perencanaan dan pemetaan jangka panjang belum sepenuhnya mendukung keberlanjutan kebijakan ketahanan pangan.
- Program Pengawasan Keamanan Pangan: pengawasan keamanan pangan segar daerah mencatat capaian fisik dan anggaran 92,99 persen. Program ini menjadi kontributor utama stabilitas ketahanan pangan Kota Bekasi. Tingginya capaian menunjukkan koordinasi lintas OPD dan efektivitas pengawasan lapangan berjalan sangat baik.
- Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian: kegiatan pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian tidak terealisasi (0 persen). Namun, kegiatan penyediaan benih, bibit ternak, dan pakan ternak mencapai capaian 94–98 persen. Rendahnya realisasi sarana

pendukung pertanian menunjukkan lemahnya dukungan hulu terhadap petani, meskipun bantuan langsung berjalan cukup baik.

- Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner: pengawasan peredaran hewan dan produk hewan mencapai capaian 93–95 persen. Kinerja tinggi sektor veteriner berperan penting dalam menjaga ketersediaan protein hewani yang aman dan stabil bagi masyarakat.

2.3 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.3.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Rumusan permasalahan pembangunan Kota Bekasi didasarkan pada analisis deskriptif dan diagnosis dari capaian IKU dan IKD. Rumusan permasalahan pembangunan Kota Bekasi tersebut disajikan ke dalam 4 (empat) aspek pembangunan.

2.3.1.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

Berdasarkan kondisi umum daerah, permasalahan geografi di Kota Bekasi, antara lain:

- a. Daya dukung/ketersediaan air secara keseluruhan telah melewati ambang batas dan luasannya mencapai 19.742,98 ha;
- b. Daya dukung pangan sudah melampaui batas dengan selisih (kekurangan) mencapai 2.030.095.735.379,97 kkal;
- c. Alih fungsi lahan untuk perumahan, industri, dan jasa menyebabkan lahan pertanian yang tersisa hanya 15 persen dari luas lahan total;
- d. Intensitas pembangunan yang tinggi menyebabkan kepadatan bangunan pada tingkat sedang dan tinggi mencapai 73 persen sehingga ketersediaan lahan semakin terbatas dan mahal;
- e. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kota Bekasi menurun secara signifikan dari 93,9 poin di tahun 2024 menjadi 73,07 poin di tahun 2025;
- f. Kualitas lingkungan semakin menurun dalam kurun waktu 5 tahun dengan capaian IKLH tahun 2024 hanya 50,70 poin dan masuk kategori “waspada”;
- g. Kota Bekasi mengalami persentase akses sanitasi aman dengan gap yang cukup tinggi yaitu dari 28,49 persen pada tahun 2020 menjadi 21,41 persen pada tahun 2024;
- h. Ancaman bencana banjir masih besar mengingat kondisi DAS, saluran drainase, dan kondisi tanah tidak mendukung untuk menyalurkan air di saat hujan; dan
- i. Normalisasi dan naturalisasi sungai belum dilakukan secara optimal, sehingga belum mampu mengatasi permasalahan banjir dan genangan di Kota Bekasi.

Adapun permasalahan demografi di Kota Bekasi, antara lain:

- a. Tekanan jumlah penduduk yang semakin besar hingga mencapai 2,648 juta jiwa pada tahun 2025 dengan distribusi yang belum merata;
- b. Beberapa kecamatan memiliki kepadatan penduduk yang tinggi melebihi 16 ribu jiwa/km²;

- c. Tren usia produktif (15-64 tahun) tahun 2025-2030 menunjukkan penurunan dan jumlah penduduk usia lanjut yang cenderung meningkat dan diprediksi mencapai 252.160 jiwa di tahun 2030;
- d. Jumlah penduduk didominasi kelompok umur produktif namun belum optimal terserap dalam pasar kerja mengingat TPT masih 7,33 persen di tahun 2025; dan
- e. Penduduk komuter cenderung meningkat hingga mencapai 19,2 persen di tahun 2023 dan Kota Bekasi juga menjadi salah satu tujuan komuter wilayah sekitar;
- f. Adanya potensi lonjakan jumlah penduduk Kota Bekasi akibat urbanisasi sehingga perlu mengantisipasi penyediaan lapangan pekerjaan serta ruang dan lahan untuk tempat tinggal, sarana prasarana, serta aktivitas perekonomian lainnya; dan
- g. Adanya fenomena *aging population* dimana jumlah masyarakat lansia relatif banyak sehingga diperlukan kebijakan pro lansia.

2.3.1.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Berdasarkan kondisi umum daerah, permasalahan kesejahteraan masyarakat di Kota Bekasi, antara lain:

- a. LPE sebesar 5,39 persen belum mampu mengurangi tingginya ketimpangan pendapatan secara signifikan karena angkanya masih berada di 0,407 poin pada tahun 2025;
- b. Tingginya TPT yang mencapai 7,33 persen di tahun 2025 menyebabkan bonus demografi belum dapat dioptimalkan;
- c. Angka kemiskinan menunjukkan penurunan hingga mencapai 3,96 persen di tahun 2025, namun jumlah penduduk miskinnya meningkat dari 128,84 ribu jiwa di tahun 2024 menjadi 129,54 ribu jiwa di tahun 2025;
- d. Masih adanya stunting yang mayoritas berada di dalam keluarga perokok aktif, sanitasi yang tidak layak, lingkungan rumah yang kumuh, serta pola makan yang belum dapat dikategorikan sebagai makanan sehat dan bergizi berimbang;
- e. Masih diperlukan upaya untuk meningkatkan pendidikan SDM Kota Bekasi paling tidak hingga ke level D3 ataupun S1 mengingat RLS masih 12,11 atau setara kelas 3 SMA;
- f. Masih rendahnya tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan yang ditunjukkan dengan unsur UPLM 4 bernilai terendah dari keseluruhan unsur pembentuk IPLM;
- g. Infrastruktur sektor pendidikan masih perlu ditambah dan dioptimalkan, terutama pada jenjang SMP;
- h. Masih banyaknya masyarakat pekerja informal di Kota Bekasi yang belum mendapatkan program jaminan sosial ketenagakerjaan;
- i. Pengaruh budaya luar yang masif serta gaya hidup urban dapat menggerus upaya-upaya pelestarian budaya lokal;
- j. Perlu adanya kebijakan yang kuat untuk dapat mempertahankan dan melestarikan kearifan lokal di Kota Bekasi dalam posisinya sebagai kota metropolitan yang mendukung akulturasi budaya;
- k. Perlunya optimalisasi dan penyediaan pusat seni dan budaya;
- a. Masih maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Kota Bekasi dan kerap tidak terakomodasi;

- b. Dengan iBangga sebesar 67,90 di tahun 2025 menandakan bahwa pembangunan kualitas keluarga masuk dalam klasifikasi “Berkembang” sehingga perlu peningkatan agar mencapai “Tangguh”;
- c. Nilai Kota Layak Anak menurun signifikan dari 742,34 di tahun 2024 menjadi 501 di tahun 2025; dan

2.3.1.3 ASPEK DAYA SAING DAERAH

Berdasarkan kondisi umum daerah, permasalahan daya saing daerah di Kota Bekasi, antara lain:

- a. Perlunya penguatan kebijakan penyerapan tenaga kerja lokal bagi investor;
- b. TPAK yang tinggi tidak dibarengi dengan penyerapan tenaga kerja mengingat TPT masih berada di angka 7,33 persen di tahun 2025;
- c. IDSD Kota Bekasi nilainya relatif tidak berbeda jauh dengan kota-kota lain di kawasan sekitar Jakarta sehingga persaingan antara kota-kota tersebut dalam menarik investasi dan mengembangkan ekonomi cukup seimbang;
- d. Pilar dinamisme bisnis dari IDSD masih belum menggambarkan kemudahan untuk memulai dan melakukan bisnis dan kemudahan untuk melakukan divestasi dan keluar dari pasar (*market*) di suatu wilayah;
- e. Perlunya meningkatkan sektor potensial (ekonomi kreatif dan digital) sebagai mesin pertumbuhan ekonomi baru selain sektor industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan, dan konstruksi;
- f. Pengembangan ekonomi kreatif masih memerlukan dukungan faktor transportasi dan aksesibilitas serta faktor SDM, talenta dan pendidikan karena kedua faktor ini menunjukkan penurunan;
- g. Belum optimalnya literasi digital masyarakat (Indeks Masyarakat Digital Indonesia untuk Kota Bekasi hanya 53,23 di tahun 2025) meskipun adopsi TIK sudah tinggi;
- h. Perlunya mitigasi risiko terhadap keamanan data dan privasi sehingga perlu langkah adaptif dalam menghadapi potensi kebocoran data dan pelanggaran privasi dalam implementasi transformasi digital;
- i. Realisasi investasi mengalami penurunan di tahun 2025 sehingga diperlukan upaya perluasan investasi selain berbasis lahan;
- j. Kota Bekasi raih predikat Upah Minimum Kota tertinggi di Indonesia tahun 2025 sehingga perlu diwaspadai pengaruhnya terhadap investasi serta inflasi;
- k. Pengelolaan infrastruktur perkotaan memerlukan peningkatan kolaborasi dengan wilayah sekitar;
- l. Belum optimalnya pembangunan infrastruktur pengendali banjir seperti polder, kolam retensi, dan tanggul mengingat Kota Bekasi memiliki tingkat risiko banjir yang tinggi;
- m. Belum optimalnya pemasangan fasilitas lalu lintas, penempatan petugas pengatur lalu lintas, penataan median, pelebaran simpang, dan perbaikan radius serta manajemen rekayasa lalu lintas sistem satu arah;
- n. Belum optimalnya pengelolaan air bersih, penyediaan lahan untuk pembangunan PSU, dan penyusunan *database* ketersediaan serta kebutuhan pemenuhan PSU;

- o. Belum optimalnya penanganan pengelolaan persampahan mengingat timbunan sampah yang dihasilkan cenderung meningkat tetapi kapasitas pengolahannya terbatas;
- p. Estetika kota perlu peningkatan untuk mendukung kenyamanan dan keindahan kota;
- q. Belum terpenuhinya luasan RTH sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam RTRW yaitu 30 persen;
- r. Kemantapan jalan di Kota Bekasi sudah mencapai 97,85 persen, namun di beberapa ruas jalan masih belum pada kondisi kemantapan baik;
- s. Penetapan beberapa titik TOD yang berbasis LRT di Kota Bekasi perlu didukung adanya Integrasi antar angkutan publik pada area pendukungnya agar banyak daerah yang terlayani angkutan *feeder*;
- t. Masih terdapat beberapa wilayah yang masuk dalam kategori Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) oleh karena itu, perlu dukungan pemerintah dalam penyediaan rumah layak huni di Kota Bekasi;
- u. Belum optimalnya kolaborasi antar perangkat daerah dalam mengendalikan inflasi karena angka inflasi dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir cenderung fluktuatif;
- v. Belum optimalnya langkah preventif guna menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif serta peningkatan kolaborasi antara penegak hukum dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban; dan
- w. Belum optimalnya pelayanan perizinan dan nonperizinan yang mudah, murah, cepat, transparan dan akuntabel.

2.3.1.4 ASPEK PELAYANAN UMUM

Berdasarkan kondisi umum daerah, permasalahan pelayanan umum di Kota Bekasi, antara lain:

- a. Kualitas RB di Kota Bekasi pada sisi perencanaan memerlukan keselarasan antara *Roadmap* RB Kota Bekasi dengan RB Jawa Barat dan RB Nasional dan peningkatan kualitas RB pada sisi pelaksanaan memerlukan keterpaduan kinerja antara PD;
- b. Pelayanan Publik di Kota Bekasi menunjukkan tren peningkatan tiap tahun, akan tetapi masih memerlukan peningkatan secara berkelanjutan;
- c. Perlunya meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah mengingat nilai SAKIP berada pada angka 67,98 di tahun 2025; dan
- d. Belum optimalnya layanan publik berbasis digital.

2.3.2 ISU STRATEGIS

2.3.2.1 ISU GLOBAL

Terdapat beberapa isu global yang diperkirakan akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan Kota Bekasi baik secara langsung atau tidak langsung. Pada tahun 2027, dunia berada di persimpangan yang penuh tantangan dan peluang strategis. Dinamika global tidak lagi hanya ditentukan oleh kekuatan militer dan ekonomi semata, melainkan juga oleh transformasi teknologi, krisis iklim, ketegangan geopolitik yang meningkat, serta ketimpangan sosial yang makin mencolok. Di tengah dunia yang semakin saling terhubung, aktor-aktor negara maupun non-negara dituntut untuk merumuskan kebijakan yang adaptif, kolaboratif, dan berkelanjutan.

- a) Ketegangan Geopolitik dan Multipolaritas Baru. Salah satu isu utama yang mendominasi lanskap strategis global adalah perubahan tatanan geopolitik dari unipolaritas pasca-Perang Dingin menuju multipolaritas. Amerika Serikat, Tiongkok, Uni Eropa, India, dan kekuatan regional lainnya memainkan peran yang semakin signifikan dalam membentuk kebijakan global. Di tahun 2027, persaingan strategis antara AS dan Tiongkok diperkirakan akan tetap menjadi poros utama geopolitik dunia. Persaingan ini tidak hanya terbatas pada kekuatan militer atau ekonomi, tetapi juga meluas ke ranah teknologi (seperti kecerdasan buatan, semikonduktor, dan ruang angkasa), diplomasi digital, dan pengaruh budaya. Sementara itu, perang yang berlangsung di berbagai kawasan telah menyebabkan krisis energi yang belum dapat diketahui selesainya.
- b) Krisis Iklim dan Perubahan Lingkungan. Perubahan iklim tetap menjadi isu strategis yang mendesak dan lintas batas negara. Tahun 2027 diprediksi menjadi salah satu tahun terpanas dalam sejarah, dengan kejadian cuaca ekstrem seperti kekeringan, banjir besar, dan kebakaran hutan yang makin sering terjadi. Negara-negara di *Global South* menjadi yang paling terdampak, meskipun kontribusi emisi mereka secara historis lebih kecil dibanding negara-negara maju. Konferensi iklim global yang diadakan setiap tahun kini berfokus pada implementasi nyata dari janji pengurangan emisi karbon, transisi energi bersih, dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara komitmen dan aksi nyata. Investasi dalam teknologi ramah lingkungan, pengembangan energi terbarukan seperti tenaga surya dan hidrogen hijau, serta diplomasi iklim akan menjadi faktor strategis yang menentukan posisi dan reputasi negara-negara di panggung global.
- c) Transformasi Teknologi dan Tantangan AI. Percepatan adopsi teknologi disruptif yang mengubah lanskap sosial, ekonomi, dan politik juga diperkirakan akan berjalan dalam jangka pendek. Kecerdasan buatan generatif, *Internet of Things* (IoT), teknologi kuantum, dan bioteknologi menjadi sektor-sektor kunci yang tidak hanya menciptakan efisiensi, tetapi juga membawa risiko serius. Persoalan keamanan siber, penyalahgunaan data pribadi, serta potensi disinformasi akibat teknologi *deepfake* dan AI akan menjadi tantangan nyata bagi negara-negara dan masyarakat sipil. Perlu regulasi global yang tidak hanya mengatur penggunaan teknologi ini, tetapi juga melindungi hak asasi manusia dan keadilan sosial.
- d) Ketimpangan Ekonomi dan Mobilisasi Sosial. Ketimpangan ekonomi global semakin mencolok pada 2027 karena dipicu dampak perang di berbagai kawasan, inflasi global, dan dampak perubahan iklim terhadap sektor pangan dan energi. Negara-negara berkembang menghadapi beban utang yang berat, sedangkan negara maju cenderung mempertahankan dominasi dalam rantai nilai global dan kepemilikan teknologi. Ketimpangan ini juga terlihat dalam akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur digital. Akibatnya, gerakan sosial dan protes rakyat yang menuntut keadilan ekonomi, sosial, dan lingkungan semakin meningkat. Tuntutan akan sistem ekonomi yang lebih adil dan inklusif,

seperti pengenaan pajak kekayaan global dan perlindungan pekerja digital, akan menjadi bagian penting dari diskusi kebijakan publik global.

- e) Kesehatan Global dan Ancaman Pandemi Baru. Pandemi COVID-19 telah meninggalkan warisan penting dalam sistem kesehatan global. Pada 2027, meskipun dunia lebih siap dalam menghadapi wabah, ancaman pandemi baru masih menghantui. Perubahan iklim dan deforestasi meningkatkan risiko *zoonosis* (penularan penyakit dari hewan ke manusia), sementara mobilitas manusia yang tinggi mempercepat penyebaran penyakit. Isu strategis di bidang ini mencakup penguatan sistem peringatan dini, distribusi vaksin yang adil, dan pendanaan untuk riset medis lintas negara. WHO dan lembaga-lembaga kesehatan global lainnya dituntut untuk lebih tanggap dan transparan dalam menangani potensi krisis kesehatan di masa depan.

2.3.2.2 ISU NASIONAL

Selain isu global, beberapa isu nasional diperkirakan akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan Kota Bekasi baik secara langsung atau tidak langsung. Beberapa isu nasional yang akan timbul atau masih terus menghangat antara lain seperti gambar berikut.

- a) Transformasi Ekonomi dan Tantangan Produktivitas. Pembangunan ekonomi Indonesia pada tahun 2027 masih menghadapi tantangan struktural. Meskipun pertumbuhan ekonomi nasional berada di 5,11 persen di tahun 2025, kualitas pertumbuhan menjadi sorotan. Pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya inklusif dan belum cukup kuat untuk mendorong Indonesia naik kelas menjadi negara berpendapatan tinggi. Salah satu isu utama pembangunan Indonesia adalah stagnasi produktivitas sektor-sektor utama, terutama industri manufaktur. Industri manufaktur masih menghadapi tantangan dari sisi daya saing, adopsi teknologi, dan ketergantungan pada bahan baku impor. Di sisi lain, sektor informal masih mendominasi pasar tenaga kerja dengan kontribusi lebih dari 55 persen, yang menyebabkan rendahnya jaminan sosial dan perlindungan kerja bagi jutaan pekerja. Upaya hilirisasi sumber daya alam, terutama di sektor pertambangan dan energi, menjadi strategi pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Namun, pelaksanaan kebijakan ini memerlukan perbaikan iklim investasi, kepastian hukum, dan peningkatan kapasitas teknologi dalam negeri.
- b) Kontinuitas Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Kelanjutan pembangunan IKN merupakan salah satu isu penting di Indonesia. Pemerintah menargetkan pemindahan sebagian pusat pemerintahan akan dilakukan pada tahun 2026, termasuk beberapa kementerian dan lembaga negara. Pembangunan IKN membawa harapan pemerataan pembangunan, namun juga memunculkan berbagai tantangan. Pertama, isu keberlanjutan lingkungan menjadi sorotan. Pembangunan kota pintar dan hijau harus memperhatikan keseimbangan ekosistem Kalimantan yang kaya akan keanekaragaman hayati. Kedua, pembiayaan proyek IKN sebagian besar mengandalkan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), yang menuntut efektivitas dalam manajemen proyek dan kepercayaan investor. Kedua, Pembangunan IKN bukan

sekadar pemindahan fisik, tetapi transformasi cara berpikir pembangunan kota yang berorientasi masa depan. Oleh karena itu, IKN akan menjadi laboratorium pembangunan berkelanjutan yang akan diuji efektivitasnya.

- c) **Kualitas Pendidikan dan Sumber Daya Manusia.** Indonesia tengah mengalami bonus demografi, di mana proporsi penduduk usia produktif sangat tinggi. Namun, potensi ini bisa menjadi beban apabila tidak diiringi dengan kualitas pendidikan dan pelatihan yang memadai. Tahun 2026 menjadi periode penting dalam memastikan sistem pendidikan mampu menyiapkan tenaga kerja yang adaptif terhadap perubahan zaman. Masalah utama yang dihadapi adalah rendahnya capaian literasi dan numerasi di berbagai daerah, serta ketimpangan kualitas antara sekolah di kota dan desa. Kurikulum Merdeka, yang telah diperkenalkan sebelumnya, masih dalam proses evaluasi dan adaptasi. Tantangan lainnya adalah digitalisasi pendidikan yang belum merata dan pelatihan guru yang belum optimal. Di sisi lain, pendidikan vokasi dan pelatihan kerja perlu ditingkatkan agar sesuai dengan kebutuhan industri, terutama di sektor teknologi, energi baru dan terbarukan, serta manufaktur cerdas. Kolaborasi antara dunia pendidikan dan industri menjadi kunci untuk menghasilkan tenaga kerja yang relevan dan kompeten.
- d) **Infrastruktur dan Konektivitas.** Pemerintah Indonesia terus melanjutkan pembangunan infrastruktur sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi. Tahun 2026 menjadi momen evaluasi sejauh mana proyek-proyek infrastruktur yang telah dicanangkan memberikan dampak nyata terhadap konektivitas dan distribusi ekonomi antarwilayah. Pada sisi lain, tantangan besar masih terjadi, terutama dalam hal pemeliharaan infrastruktur yang telah dibangun, keberlanjutan finansial proyek-proyek KPBU, serta kapasitas teknis di daerah. Di beberapa wilayah, pembangunan infrastruktur belum disertai dengan peningkatan kapasitas ekonomi lokal, sehingga potensi infrastruktur belum dimanfaatkan secara optimal. Isu pemerataan pembangunan wilayah timur Indonesia dan kawasan perbatasan juga masih menjadi perhatian. Keberadaan infrastruktur harus mampu mendorong tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru di luar Pulau Jawa.
- e) **Lingkungan dan Perubahan Iklim.** Indonesia sebagai negara megabiodiversitas dan penghasil emisi karbon cukup besar, menghadapi tantangan besar dalam pembangunan berkelanjutan. Tahun 2026 menjadi titik krusial dalam upaya pencapaian target *net zero emission* pada tahun 2060 atau lebih cepat, sebagaimana diklaim oleh pemerintah. Namun, realisasi transisi energi masih menghadapi tantangan dari sisi investasi, kesiapan teknologi, dan kepentingan politik. Penggunaan batu bara masih tinggi dalam bauran energi nasional, sementara adopsi energi terbarukan belum melampaui 15 persen. Selain itu, deforestasi, degradasi lahan gambut, dan kebakaran hutan masih menjadi isu utama, khususnya di Sumatera dan Kalimantan. Implementasi program FOLU Net Sink 2030 (*Forestry and Other Land Use*) harus dipercepat untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakat lokal dalam pelestarian lingkungan sangat penting. Program-

program seperti pertanian berkelanjutan, ekonomi hijau, dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat harus diperkuat.

- f) Tata Kelola Pemerintahan dan Digitalisasi Layanan Publik. Tahun 2026 juga merupakan tahun penting dalam penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien, dan transparan. Pemerintah terus mendorong digitalisasi layanan publik sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) telah diterapkan di berbagai instansi, namun pelaksanaannya masih belum merata. Isu korupsi, tumpang tindih regulasi, dan lemahnya koordinasi antarinstitusi masih menjadi tantangan serius. Reformasi regulasi dan penyederhanaan birokrasi harus terus dilanjutkan, terutama di tingkat pemerintah daerah. Selain itu, partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan harus diperkuat. Transparansi anggaran, akses data publik, dan keterlibatan masyarakat sipil akan menjadi indikator utama keberhasilan tata kelola di era digital.

2.3.2.3 ISU REGIONAL JAWA BARAT

Pada konteks regional Jawa Barat, terdapat beberapa isu yang diperkirakan akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan Kota Bekasi baik secara langsung atau tidak langsung. Kota Bekasi, sebagai bagian dari kawasan megapolitan Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), memainkan peran strategis dalam pembangunan regional Jawa Barat. Letaknya yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta membuat Bekasi menjadi salah satu kota penyangga utama ibu kota negara. Seiring dengan pesatnya urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi, Kota Bekasi menghadapi tantangan pembangunan yang kompleks, mulai dari tekanan infrastruktur, tata ruang, hingga kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pembangunan Jawa Barat secara keseluruhan, isu-isu pembangunan Provinsi Jawa Barat seperti pada gambar berikut.

- a) Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia. Perkembangan penduduk menciptakan sumber daya manusia yang perlu disiapkan untuk dapat berdaya saing dalam menghadapi peluang dan tantangan global dan regional. Kondisi ini perlu dilakukan antara lain dengan mempersiapkan penguatan ketahanan sosial masyarakat dari aspek pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan norma sosial-budaya masyarakat.
- b) Pembangunan Ekonomi Berkualitas dan Berkelanjutan. Tantangan yang dihadapi Provinsi Jawa Barat dalam mencapai *green* dan *blue economy* serta pembangunan inklusif diantaranya adalah masih tingginya angka kemiskinan, pengangguran terbuka dan ketimpangan pendapatan serta belum optimalnya penerapan *green* dan *blue economy*.
- c) Pemerataan Pembangunan Wilayah yang Didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan. Pemerataan dan pembangunan wilayah dan infrastruktur dasar dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan menjadi tantangan yang cukup besar bagi Provinsi Jawa Barat. Kesenjangan ekonomi antarwilayah kabupaten/kota dan ketimpangan antara jalur Utara, Tengah dan Selatan di Jawa Barat serta ketergantungan terhadap sektor industri pengolahan masih menjadi permasalahan di Jawa Barat.

- d) Peningkatan Kehidupan Berdemokrasi serta Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Provinsi Jawa Barat ditunjukkan dengan Indeks Reformasi Birokrasi dengan predikat A pada tahun 2024. Meskipun capaian sudah tinggi, permasalahan utama reformasi birokrasi adalah masih perlunya upaya peningkatan penataan dan penguatan organisasi, deregulasi peraturan perundang-undangan daerah dan kebijakan lainnya serta budaya birokrasi dengan ASN yang profesional, penataan sistem manajemen SDM aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan serta peningkatan pelayanan publik untuk mengoptimalkan sistem tata kelola pemerintahan yang terpadu, adaptif, responsif, dan akuntabel.

2.3.2.4 ISU KOTA BEKASI

Mempertimbangkan berbagai isu sesuai konteks (global, nasional, dan regional) seperti yang telah diuraikan di atas, isu strategis yang akan dihadapi Kota Bekasi sepanjang tahun 2027, antara lain:

Infrastruktur Pendukung Perekonomian

Dengan jumlah penduduk yang telah melampaui 2,5 juta jiwa pada tahun 2025, kepadatan yang tinggi telah menimbulkan tekanan besar terhadap ruang kota, perumahan, transportasi, dan layanan dasar di Kota Bekasi. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa: 1) banjir masih terus berulang terjadi; 2) kemacetan lalu lintas makin meluas pada titik-titik krusial; 3) sanitasi aman belum menjangkau seluruh wilayah; 4) kawasan kumuh dan rutilahu belum sepenuhnya tertangani; dan 5) pengelolaan sampah belum terintegrasi dari hulu ke hilir.

Mutu Pendidikan dan Kesehatan

Kota Bekasi menghadapi tantangan sosial yang signifikan, seperti ketimpangan akses layanan publik. Meskipun secara makro pertumbuhan ekonomi cukup tinggi, kesenjangan antarwilayah dan antarpenduduk masih terlihat jelas, terutama di wilayah pinggiran yang minim akses transportasi dan fasilitas umum. Kondisi ini didasarkan pada fakta bahwa: 1) aksesibilitas dan kualitas sekolah belum optimal; 2) sistem layanan kesehatan dasar dan rujukan belum maksimal; dan 3) masih adanya penyakit menular dan kasus stunting pada balita.

SDM Ekonomi Kreatif dan Digital

Kota Bekasi yang berkembang menjadi pusat jasa, perdagangan dan hunian berperan signifikan dalam mendukung pelaku industri di kawasan sekitar Kota Bekasi. Hanya saja perkembangan di Kota Bekasi masih belum bersifat inklusif. Hal ini dapat dilihat dari masih tingginya jumlah kemiskinan dan pengangguran terbuka. Untuk itu, Pemerintah Kota Bekasi perlu memperkuat sektor UMKM dengan mendorong ekonomi digital dan ekonomi kreatif sehingga jumlah pelaku ekonomi tersebut dapat meningkat.

Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Jumlah penduduk Kota Bekasi yang cukup besar merupakan sebuah potensi bagi peningkatan daya tarik investasi, terutama pada sektor jasa dan perdagangan serta permukiman. Keberadaan infrastruktur yang terus berkembang, seperti jalan tol dan transportasi umum, dapat berpotensi memperkuat daya tarik Bekasi sebagai lokasi strategis bagi investasi.

Layanan Publik Berbasis Digital

Pembangunan Kota Bekasi tidak dapat berjalan sendiri. Dibutuhkan tata kelola pemerintahan yang kuat, akuntabel, dan sinergis dengan pemerintah provinsi dan pusat. Pemerintah Kota Bekasi juga perlu memperkuat *Smart City* dengan memanfaatkan teknologi digital dalam pelayanan publik, sistem pengaduan masyarakat, pengawasan pembangunan, serta manajemen transportasi. Inisiasi *smart governance* yang berfokus pada efisiensi, keterbukaan data, dan pelayanan publik yang responsif berbasis teknologi perlu segera didorong di Kota Bekasi.

2.4 TELAAH MUSRENBANG DAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD

2.4.1 MUSRENBANG

Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah. Musrenbang RKPD Kota Bekasi Tahun 2027 juga berupaya menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan yang diselaraskan dengan prioritas kota dan prioritas nasional. Hasil rekapitulasi usulan masyarakat dalam Musrenbang kecamatan terhimpun sebanyak 6.574 usulan yang terdistribusi seperti pada gambar di bawah ini.

Berdasarkan gambar di atas, usulan Musrenbang terkonsentrasi pada tiga kecamatan, yaitu Pondok Gede, Jatiasih, dan Bekasi Utara. Jika ditelusuri lebih dalam, usulan yang masuk masih didominasi terkait infrastruktur seperti perbaikan dan pembangunan jalan, pengelolaan persampahan, perbaikan drainase, dan pembangunan polder.

2.4.2 POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD

Dalam penyusunan RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Berdasarkan usulan yang masuk, terdapat usulan DPRD Kota Bekasi sebanyak 6.181 usulan.

INOVASI DAERAH

Pemerintah Kota Bekasi kembali mencatatkan prestasi membanggakan. Kota Bekasi berhasil meraih predikat Kota Terinovatif Peringkat ke-3 tingkat nasional pada ajang *Innovative Government Award* (IGA) 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri RI.

Penghargaan tersebut diraih melalui proses penilaian komprehensif yang mencakup aspek kebaruan inovasi, manfaat bagi masyarakat, replikasi, keberlanjutan, serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Terdapat tiga aspek utama yang menjadi faktor kunci keberhasilan Kota Bekasi, yaitu:

1. Ekosistem Inovasi Daerah yang Kuat

Ekosistem inovasi daerah yang dikoordinasikan oleh Bapperida (Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah) dinilai memiliki tata kelola yang solid dan terintegrasi. Hal ini ditandai dengan:

- adanya regulasi dan kebijakan pendukung inovasi daerah;
- mekanisme pembinaan, inkubasi, dan kompetisi inovasi perangkat daerah;
- integrasi inovasi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran;
- pelibatan multi-pihak (perangkat daerah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat).

Ekosistem ini mendorong lahirnya inovasi secara sistematis dan berkelanjutan, bukan sekadar inisiatif parsial.

2. Inovasi Digital Unggulan: SISVALEN (Bapenda)

SISVALEN (Sistem Validasi Elektronik) merupakan inovasi layanan digital dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang berfokus pada pelayanan validasi SSPD BPHTB secara online. Inovasi ini memberikan dampak signifikan berupa:

- percepatan proses layanan dan pengurangan waktu tunggu;
- peningkatan transparansi dan akuntabilitas;
- kemudahan akses bagi masyarakat dan pelaku usaha;
- peningkatan potensi pendapatan asli daerah (PAD).

Inovasi ini mentransformasi proses validasi SSPD BPHTB menjadi layanan berbasis online yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel, sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dan pelaku usaha serta berkontribusi terhadap optimalisasi pendapatan asli daerah. Transformasi digital ini juga tercermin dalam pengembangan layanan publik terintegrasi melalui inisiatif *smart city*, termasuk pemanfaatan pusat kendali (*command center*), sistem pengaduan masyarakat berbasis aplikasi, serta integrasi data untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih responsif dan berbasis bukti. Digitalisasi layanan ini juga mendukung agenda transformasi pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

3. Inovasi Non-Digital: BIG HUG (DPMPTSP)

BIG HUG (*Bekasi Investment Growth and Hub*) yang dikembangkan oleh DPMPTSP merupakan inovasi non-digital yang berfokus pada penguatan ekosistem investasi daerah. Program ini mencakup:

- fasilitasi dan pendampingan investor;
- penyederhanaan proses perizinan;
- promosi potensi investasi daerah;
- penguatan jejaring kemitraan antara pemerintah dan dunia usaha.

Melalui pendekatan fasilitasi, pendampingan, dan kemitraan, inovasi ini mampu meningkatkan kepercayaan investor sekaligus mendorong realisasi investasi secara berkelanjutan. Pendekatan serupa juga terlihat dalam berbagai inovasi pelayanan publik lainnya, seperti layanan administrasi kependudukan yang semakin mudah diakses melalui sistem daring dan layanan jemput bola, penguatan layanan kesehatan berbasis digital dan respons cepat, serta pengembangan pembelajaran berbasis teknologi di sektor pendidikan.

Selain itu, inovasi berbasis partisipasi masyarakat juga terus dikembangkan, khususnya dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui program pengurangan sampah dari sumber dan penguatan peran komunitas. Pendekatan ini menunjukkan bahwa inovasi daerah di Kota Bekasi tidak

hanya bertumpu pada teknologi, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat sebagai aktor utama pembangunan.

Secara keseluruhan, capaian inovasi daerah Kota Bekasi mencerminkan adanya sinergi yang kuat antara kepemimpinan daerah, kapasitas kelembagaan, serta kolaborasi lintas sektor. Inovasi tidak hanya diposisikan sebagai instrumen peningkatan kinerja pemerintahan, tetapi juga sebagai strategi utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Ke depan, penguatan inovasi diarahkan pada pemanfaatan data secara lebih optimal (*data-driven innovation*), perluasan replikasi inovasi unggulan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia guna memastikan keberlanjutan dan dampak inovasi yang semakin luas bagi masyarakat.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Arah kebijakan ekonomi daerah merupakan landasan bagi Pemerintah Kota Bekasi dalam merumuskan kebijakan pembangunan tahunan yang responsif terhadap dinamika perekonomian lokal, regional, nasional, maupun global. Kerangka ekonomi daerah disusun melalui analisis kondisi perekonomian tahun sebelumnya (2025) sebagai pijakan, perkiraan kondisi ekonomi tahun berjalan (2026), serta proyeksi dan strategi untuk tahun rencana (2027). Kebijakan ekonomi ini diarahkan untuk memperkuat struktur perekonomian Kota Bekasi yang bertumpu pada tiga sektor utama, yaitu industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta transportasi dan pergudangan, sekaligus mengakselerasi pertumbuhan sektor-sektor potensial yang dapat menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru.

3.1.1 TANTANGAN PEREKONOMIAN KOTA BEKASI TAHUN 2027

Perekonomian Kota Bekasi pada tahun 2027 tidak dapat dilepaskan dari dinamika lingkungan strategis yang bergerak di berbagai tataran — global, nasional, regional, hingga lokal. Pemahaman atas tantangan dan peluang yang melingkupi setiap tataran tersebut menjadi dasar bagi Pemerintah Kota Bekasi dalam merumuskan arah kebijakan ekonomi yang adaptif, realistis, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara inklusif.

A. Tantangan dan Peluang Lingkup Global

Pada tahun 2027, lanskap ekonomi global ditandai oleh pergeseran tatanan geopolitik dari unipolaritas menuju multipolaritas, di mana persaingan strategis antara Amerika Serikat, Tiongkok, Uni Eropa, dan kekuatan-kekuatan regional lainnya semakin intensif. Persaingan ini tidak hanya mencakup dimensi militer dan ekonomi, tetapi juga merambah ke arena teknologi — termasuk kecerdasan buatan, semikonduktor, dan ruang siber — yang berdampak langsung pada rantai pasok global dan pola investasi dunia. Bagi Kota Bekasi sebagai bagian dari ekosistem industri manufaktur dan perdagangan nasional, disrupsi rantai pasok global berpotensi memengaruhi keberlanjutan sektor industri pengolahan yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian kota.

Krisis iklim juga menjadi tantangan struktural yang makin mendesak. Kejadian cuaca ekstrem yang semakin sering dan intens — termasuk banjir yang menjadi persoalan tahunan Kota Bekasi — mengancam produktivitas ekonomi, keselamatan jiwa, dan kualitas infrastruktur. Di sisi lain, tekanan global terhadap transisi energi dan penerapan standar keberlanjutan menciptakan tuntutan baru bagi sektor industri di Kota Bekasi untuk beradaptasi dengan regulasi lingkungan yang makin ketat, terutama dari mitra dagang di pasar ekspor.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, akselerasi transformasi teknologi — khususnya kecerdasan buatan generatif, *Internet of Things*, dan ekonomi digital — membuka peluang nyata bagi Kota Bekasi untuk mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif dan digital yang selama ini masih dalam tahap rintisan. Posisi Kota Bekasi sebagai kota dengan tingkat adopsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang tinggi menjadi modal penting dalam memanfaatkan peluang ini.

B. Tantangan dan Peluang Lingkup Nasional

Di tingkat nasional, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2027 diproyeksikan berada dalam kisaran 5,8 hingga 6,3 persen sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029. Meskipun capaian ini mencerminkan optimisme, tantangan utama yang dihadapi Indonesia adalah bahwa pertumbuhan belum sepenuhnya inklusif. Sektor informal masih mendominasi pasar tenaga kerja dengan kontribusi lebih dari 55 persen, sementara stagnasi produktivitas manufaktur dan ketergantungan pada bahan baku impor menjadi hambatan struktural yang berdampak langsung pada daya saing kawasan industri di sekitar Jakarta, termasuk Kota Bekasi.

Kebijakan hilirisasi sumber daya alam dan dorongan investasi berbasis inovasi yang digalakkan pemerintah pusat membuka peluang bagi Kota Bekasi untuk memposisikan diri sebagai pusat jasa industri dan logistik yang melengkapi kawasan manufaktur di Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang. Sementara itu, tema RKP Tahun 2027 yaitu "Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri" sejalan dengan arah kebijakan Kota Bekasi yang menitikberatkan pada penguatan iklim investasi dan pengembangan sektor ekonomi berbasis jasa dan perdagangan.

Kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) juga berdampak ganda bagi Kota Bekasi. Di satu sisi, pemindahan sebagian aparatur pemerintah pusat ke IKN berpotensi menggeser permintaan hunian dan jasa komersial dari kawasan Jabodetabek. Di sisi lain, Kota Bekasi yang telah memiliki basis industri, tenaga kerja terampil, dan infrastruktur yang lebih matang, justru dapat memperkuat perannya sebagai pusat produksi dan distribusi dalam ekosistem ekonomi nasional yang lebih terdesentralisasi.

C. Tantangan dan Peluang Lingkup Regional Jawa Barat

Sebagai bagian dari kawasan megapolitan Jabodetabek dan secara administratif berada di wilayah Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi dipengaruhi secara langsung oleh dinamika pembangunan regional. Provinsi Jawa Barat menghadapi tantangan ketimpangan antarwilayah yang signifikan, di mana kawasan utara — termasuk Kota Bekasi — cenderung lebih maju dibanding kawasan selatan dan timur. Kondisi ini mengandung peluang sekaligus tantangan: di satu sisi Kota Bekasi berperan sebagai lokomotif ekonomi

regional, namun di sisi lain harus bersaing dengan daerah lain dalam menarik investasi.

Persaingan menarik investasi dengan Kabupaten Subang dan Kabupaten Purwakarta yang tengah mengembangkan kawasan industri baru menjadi ancaman konkret. Pada triwulan kedua 2025, peringkat realisasi investasi Kota Bekasi turun ke posisi ketujuh di Jawa Barat dari sebelumnya posisi keempat pada 2024. Pergeseran ini mengindikasikan bahwa daerah-daerah yang menawarkan lahan lebih luas dengan biaya lebih kompetitif mulai menjadi pilihan alternatif bagi investor, khususnya di sektor manufaktur padat lahan. Respons Kota Bekasi terhadap tantangan ini harus bergeser dari investasi berbasis lahan menuju investasi berbasis jasa, teknologi, dan nilai tambah.

D. Tantangan Spesifik Kota Bekasi

Di tingkat lokal, Kota Bekasi menghadapi sejumlah tantangan struktural yang perlu ditangani secara serius dan terencana. Pertama, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2025 masih berada di angka 7,33 persen, menurun dari tahun 2024 yang sebesar 7,82 persen — termasuk yang tertinggi di Provinsi Jawa Barat — meskipun Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mencapai 64,10 persen. Ketidakseimbangan ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara kualifikasi angkatan kerja dan kebutuhan pasar kerja yang ada.

Kedua, Upah Minimum Kota (UMK) Bekasi tahun 2025 sebesar Rp5.690.725,- per bulan meningkat menjadi Rp5.999.443,- per bulan di tahun 2026, yang merupakan tertinggi di Indonesia memberikan dampak ganda. Meski mencerminkan tingginya standar kesejahteraan pekerja, angka UMK yang tinggi ini juga meningkatkan beban biaya produksi bagi industri dan berpotensi mengurangi daya tarik Kota Bekasi bagi investor di sektor manufaktur padat karya. Pengelolaan dampak UMK tinggi terhadap iklim investasi menjadi salah satu tantangan kebijakan yang harus diantisipasi secara cermat.

Ketiga, ketimpangan pendapatan yang tercermin dari Rasio Gini sebesar 0,407 pada tahun 2025 — menurun dari 0,435 pada tahun 2025— menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi (LPE 5,39 persen pada 2025) belum secara signifikan mendistribusikan manfaatnya secara merata ke seluruh lapisan masyarakat. Pertumbuhan inklusif menjadi agenda mendesak yang harus menjadi prioritas kebijakan pembangunan ekonomi Kota Bekasi ke depan.

Keempat, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025 mencapai Rp3.507,71 miliar, meningkat sekitar 31,3 persen dari tahun 2024. Peningkatan ini membutuhkan perhatian mengingat kondisi lingkungan dinamis sangat kompleks sehingga menuntut strategi pengelolaan keuangan yang lebih efisien sekaligus upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah yang terukur.

E. Prospek Perekonomian Kota Bekasi Tahun 2027

Di tengah berbagai tantangan tersebut, terdapat sejumlah prospek dan peluang yang menjadi modal optimisme bagi perekonomian Kota Bekasi pada tahun 2027. Sektor transportasi dan pergudangan yang mencatat laju pertumbuhan tertinggi sebesar 9,68 persen pada tahun 2025, menurun jika dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 11,35 persen, masih menunjukkan

momentum yang kuat sejalan dengan berkembangnya ekosistem logistik dan perdagangan di kawasan Jabodetabek. Pengembangan simpul transportasi berbasis Transit Oriented Development (TOD) yang terintegrasi dengan jaringan LRT Jabodebek membuka peluang pertumbuhan ekonomi kawasan yang lebih merata dan terkoneksi.

Pada tahun 2025, sektor penyediaan akomodasi makan minum (tumbuh 5,56 persen), jasa lainnya (9,24 persen), jasa perusahaan (8,46 persen), informasi dan komunikasi (8,37 persen), serta jasa pendidikan (6,28 persen) mencerminkan potensi diversifikasi ekonomi yang semakin kuat ke arah sektor jasa. Keempat sektor ini, meskipun kontribusinya terhadap PDRB masih relatif kecil, memiliki laju pertumbuhan yang lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi kota. Dengan penguatan ekosistem pendukung — terutama SDM, infrastruktur digital, dan kemudahan berusaha — sektor-sektor ini berpotensi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru yang melengkapi tiga sektor dominan yang ada.

Jumlah penduduk Kota Bekasi yang mencapai lebih dari 2,6 juta jiwa merupakan kekuatan pasar konsumsi domestik yang signifikan. Daya beli masyarakat yang terus meningkat, yang tercermin dari kenaikan pengeluaran per kapita dari tahun ke tahun, menjadi fondasi kuat bagi pertumbuhan sektor perdagangan, jasa, dan ekonomi kreatif. Posisi strategis Kota Bekasi yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta dan dilalui oleh koridor logistik utama menjadikannya tetap relevan sebagai pusat aktivitas ekonomi perkotaan yang kompetitif di kawasan Jabodetabek.

Dengan mempertimbangkan seluruh faktor tersebut, LPE Kota Bekasi pada tahun 2027 ditargetkan berada dalam kisaran 5,70 hingga 6,20 persen — sebuah target yang ambisius namun dapat dicapai apabila didukung oleh kebijakan yang tepat sasaran, penguatan kapasitas fiskal, dan sinergi yang kuat antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

3.1.2 TARGET EKONOMI MAKRO TAHUN 2027

Target ekonomi makro merupakan tolok ukur yang mencerminkan arah dan ambisi pembangunan Kota Bekasi dalam satu tahun rencana. Penetapan target tahun 2027 mengacu pada RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025–2029 sebagai dokumen induk, dengan mempertimbangkan capaian realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) tahun 2025, evaluasi kinerja RKPD Tahun 2025, serta dinamika lingkungan strategis yang berkembang.

A. Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bekasi pada tahun 2025 terealisasi sebesar 5,39 persen, melampaui target yang ditetapkan sebesar 5,32 persen, dengan capaian kinerja sebesar 101,32 persen. Capaian ini lebih tinggi dari realisasi tahun 2024 yang sebesar 5,19 persen dan menunjukkan tren pemulihan yang menguat. Bertumpu pada momentum pertumbuhan ini, LPE Kota Bekasi pada tahun 2026 ditargetkan meningkat signifikan menjadi 6,38 persen, dan selanjutnya pada tahun 2027 ditargetkan berada dalam kisaran 5,70 hingga 6,20 persen.

Penetapan rentang target LPE 2027 yang bersifat interval — bukan angka tunggal — mencerminkan kehati-hatian dalam mengantisipasi

ketidakpastian lingkungan ekonomi global dan nasional. Batas bawah 5,70 persen merupakan skenario moderat yang mempertimbangkan tekanan eksternal, sedangkan batas atas 6,20 persen mencerminkan skenario optimistis yang dapat dicapai apabila investasi menguat, sektor jasa berkembang pesat, dan konsumsi domestik terjaga.

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita Kota Bekasi pada tahun 2025 terealisasi sebesar Rp52,51 juta — melampaui target Rp49,16 juta dengan capaian kinerja 106,82 persen. Lompatan ini menempatkan target PDRB per kapita tahun 2026 pada angka Rp54,94 juta dan selanjutnya meningkat menjadi Rp56,89 juta hingga Rp58,64 juta pada tahun 2027. Peningkatan PDRB per kapita ini diharapkan mencerminkan tidak hanya pertumbuhan agregat, tetapi juga peningkatan produktivitas dan nilai tambah yang dirasakan oleh penduduk Kota Bekasi secara lebih merata.

Kontribusi PDRB Kota Bekasi terhadap Provinsi Jawa Barat ditargetkan tetap stabil di angka 4,5 persen pada tahun 2027, konsisten dengan capaian beberapa tahun terakhir. Stabilitas kontribusi ini harus dipertahankan di tengah persaingan yang semakin ketat dari daerah-daerah lain di Jawa Barat yang juga tengah mempercepat pembangunan ekonominya.

B. Kemiskinan dan Ketimpangan

Tingkat kemiskinan Kota Bekasi pada tahun 2025 terealisasi sebesar 3,96 persen, belum mencapai target 3,69 persen (capaian 92,68 persen). Meskipun demikian, angka ini masih lebih baik dibanding beberapa kota lain di kawasan penyangga Jakarta dan menunjukkan tren penurunan jangka panjang yang konsisten. Pada tahun 2026, tingkat kemiskinan ditargetkan turun menjadi 3,55 persen, dan pada tahun 2027 ditetapkan dalam kisaran 3,12 hingga 3,40 persen. Pencapaian target ini mensyaratkan intervensi yang lebih tepat sasaran berbasis data mikro per kecamatan, penguatan perlindungan sosial adaptif, dan peningkatan akses terhadap lapangan kerja berkualitas.

Rasio Gini Kota Bekasi pada tahun 2025 terealisasi sebesar 0,407, sedikit lebih baik dari target 0,408 — artinya ketimpangan pendapatan mulai menunjukkan perbaikan setelah sempat memburuk ke angka 0,435 pada tahun 2024. Perbaikan ini perlu dipertahankan dan dipercepat. Pada tahun 2026, Rasio Gini ditargetkan berada di angka 0,414, dan pada tahun 2027 ditetapkan dalam kisaran 0,391 hingga 0,414. Penurunan Rasio Gini yang signifikan ini hanya dapat dicapai apabila pertumbuhan ekonomi benar-benar bersifat inklusif — menjangkau kelompok masyarakat berpenghasilan rendah melalui penguatan UMKM, ekonomi kreatif, dan perluasan akses keuangan.

C. Ketenagakerjaan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Bekasi pada tahun 2025 terealisasi sebesar 7,33 persen, melampaui target 7,68 persen dengan capaian kinerja 104,56 persen. Pencapaian positif ini menunjukkan bahwa upaya perluasan lapangan kerja dan peningkatan kompetensi tenaga kerja mulai membuahkan hasil. Pada tahun 2026, TPT ditargetkan menurun tipis menjadi 7,32 persen, dan pada tahun 2027 ditetapkan dalam kisaran 6,77 hingga 7,4 persen. Rentang target yang cukup lebar ini mencerminkan kompleksitas tantangan ketenagakerjaan Kota Bekasi, di mana tingginya

TPAK belum sepenuhnya diimbangi oleh penyerapan tenaga kerja yang memadai di sektor formal.

D. Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bekasi pada tahun 2025 terealisasi sebesar 84,43, melampaui target 83,80 dengan capaian kinerja 100,75 persen. Capaian ini menunjukkan kinerja pembangunan manusia yang konsisten meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2026, IPM ditargetkan mencapai 84,47, dan pada tahun 2027 ditetapkan sebesar 85,14. Peningkatan IPM ini didorong oleh perbaikan pada tiga komponen utamanya: Indeks Pendidikan melalui peningkatan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah; Indeks Kesehatan melalui peningkatan angka harapan hidup; serta Indeks Pengeluaran melalui peningkatan pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Prevalensi stunting yang pada tahun 2026 ditargetkan 10,55 persen, selanjutnya ditetapkan turun menjadi 7,99 persen pada tahun 2027. Penurunan prevalensi stunting yang signifikan ini memerlukan pendekatan lintas sektor yang melibatkan bidang kesehatan, ketahanan pangan, sanitasi, dan pemberdayaan keluarga secara terpadu.

E. Lingkungan dan Keberlanjutan

Dua indikator lingkungan yang menjadi bagian dari target ekonomi makro tahun 2027 mencerminkan komitmen Kota Bekasi terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan. Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) ditargetkan sebesar 1,77 Ton CO₂eq per Miliar pada tahun 2027, meningkat dari target 1,31 pada tahun 2026. Sementara Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) ditargetkan mencapai 47,75 pada tahun 2027 dari 47,46 pada tahun 2026. Kedua target ini sejalan dengan agenda transisi hijau nasional dan menjadi pertimbangan penting dalam arah kebijakan investasi serta pengembangan infrastruktur kota.

Secara keseluruhan, target makro Kota Bekasi Tahun 2027 disajikan pada tabel berikut.

3.1.3 POKOK-POKOK KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Pokok-pokok kebijakan keuangan daerah merupakan kerangka arahan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi Tahun 2027. Kebijakan ini dirancang untuk memastikan bahwa alokasi sumber daya keuangan daerah benar-benar mencerminkan prioritas pembangunan, bersandar pada prinsip kehati-hatian fiskal, dan selaras dengan kebijakan keuangan nasional sebagaimana diarahkan dalam Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2027. Secara keseluruhan, kebijakan keuangan Kota Bekasi Tahun 2027 mencakup tiga ranah utama, yaitu kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah.

A. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah Kota Bekasi Tahun 2027 diarahkan pada peningkatan kapasitas fiskal secara berkelanjutan melalui penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan optimalisasi pendapatan transfer. Penguatan PAD menjadi prioritas mengingat rata-rata derajat ketergantungan keuangan daerah Kota Bekasi terhadap transfer pusat masih berada pada

kategori Sangat Tinggi, yakni di atas 50 persen dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini mencerminkan masih terbatasnya diskresi fiskal daerah dalam mendanai prioritas pembangunan secara mandiri.

Total Pendapatan Daerah Kota Bekasi Tahun 2027 diproyeksikan sebesar Rp7,03 triliun, meningkat dari proyeksi Rp6,89 triliun pada tahun 2026. Komponen PAD ditargetkan tumbuh menjadi Rp4,34 triliun atau meningkat sekitar 5,0 persen dari target PAD tahun 2026 sebesar Rp4,13 triliun. Peningkatan PAD ini bertumpu pada optimalisasi empat komponen utamanya, yaitu pajak daerah yang ditargetkan Rp3,74 triliun, retribusi daerah Rp531,78 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp29,20 miliar, dan lain-lain PAD yang sah Rp37,83 miliar.

Strategi peningkatan PAD pada tahun 2027 dilakukan melalui dua pendekatan yang saling melengkapi. Pertama, intensifikasi pendapatan daerah, yang mencakup penyempurnaan sistem dan regulasi pajak daerah dan retribusi daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; digitalisasi pengelolaan pajak dan retribusi untuk meminimalkan potensi kebocoran (*potential loss*); pembaruan dan pemeliharaan basis data objek dan subjek pajak secara berkala dengan melibatkan unit teknis dan kecamatan; serta penagihan piutang pajak secara aktif melalui kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kota Bekasi. Fokus intensifikasi diarahkan pada pos pajak restoran, pajak penerangan jalan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang secara historis menjadi kontributor terbesar pajak daerah.

Kedua, ekstensifikasi pendapatan daerah, yang dilakukan melalui pendataan objek dan subjek pajak baru; perluasan kerja sama dengan institusi keuangan dan sektor swasta dalam rangka penerimaan pajak dan retribusi; serta peningkatan pelayanan retribusi pasar melalui sistem pembayaran digital untuk mengoptimalkan penerimaan dan menekan kebocoran. Selain itu, peningkatan kinerja BUMD juga menjadi salah satu strategi memperkuat komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, termasuk melalui penguatan tata kelola dan ekspansi usaha Perusahaan Umum Daerah dan Perseroan Daerah yang ada.

Terkait pendapatan transfer, proyeksi transfer pemerintah pusat dan transfer antardaerah pada tahun 2027 ditetapkan sebesar Rp2,69 triliun, sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2026 sebesar Rp2,75 triliun. Penyesuaian ini mencerminkan kehati-hatian dalam memproyeksikan komponen transfer yang bersifat spesifik seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID), mengingat penetapan besarnya sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat dan belum dapat dipastikan pada saat penyusunan RKPD.

B. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun 2027 dilandasi oleh prinsip efisiensi, efektivitas, keadilan, dan keberlanjutan. Belanja daerah disusun berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang mencerminkan kapasitas riil fiskal, dengan tetap mengutamakan pemenuhan belanja yang bersifat mengikat dan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar sebelum mengalokasikan anggaran untuk program-program prioritas pembangunan.

Penentuan prioritas alokasi belanja daerah dikelompokkan menjadi dua lapis. Prioritas pertama dialokasikan untuk belanja yang bersifat mengikat — termasuk belanja pegawai, belanja operasional yang wajib, serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) — yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Prioritas kedua dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan yang secara langsung mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Bekasi Tahun 2027 sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025–2029.

Dalam kerangka keselarasan dengan kebijakan nasional, alokasi belanja daerah Kota Bekasi Tahun 2027 juga memperhatikan dua prioritas *mandatory spending* yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pertama, alokasi belanja di bidang pendidikan yang diprioritaskan untuk pemenuhan SPM pendidikan, pelaksanaan program Wajib Belajar 13 Tahun, pembangunan dan revitalisasi sarana prasarana satuan pendidikan, digitalisasi pembelajaran, serta revitalisasi pendidikan vokasi. Kedua, alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik yang sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 147 ditetapkan paling rendah 40 persen dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan transfer kepada daerah lainnya. Alokasi infrastruktur ini diarahkan pada penguatan tata kelola air minum dan sanitasi, peningkatan konektivitas jalan, pengendalian banjir, serta penyediaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada peningkatan kesempatan kerja dan pengurangan kemiskinan.

Secara substantif, arah kebijakan belanja daerah Kota Bekasi Tahun 2027 difokuskan pada lima agenda utama. Pertama, peningkatan infrastruktur pendukung perekonomian sebagai upaya lanjutan pada tahun 2026 yang fokus pada infrastruktur dasar. Kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan yang inklusif dan merata. Ketiga, peningkatan SDM digital dan ekonomi kreatif untuk mendorong pertumbuhan inklusif. Keempat, pemantapan ketentraman dan ketertiban masyarakat untuk meningkatkan kondusivitas kota. Kelima, penguatan pelayanan publik berbasis digital dalam kerangka menuju Kota Bekasi *smart city*.

Di samping itu, belanja daerah juga diarahkan untuk mendukung pencapaian program prioritas nasional, meliputi penurunan prevalensi stunting menuju target 7,99 persen pada tahun 2027, penurunan tingkat pengangguran terbuka, penghapusan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, serta pelestarian lingkungan dan pengelolaan sampah. Indikator penyerapan belanja daerah pada tahun 2027 ditargetkan minimal sebesar 86,7 persen dari total pagu, mencerminkan komitmen terhadap kualitas pelaksanaan anggaran yang tidak hanya efisien namun juga tepat sasaran.

C. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah Kota Bekasi Tahun 2027 ditujukan untuk menjaga keseimbangan fiskal antara pendapatan dan belanja daerah, serta memastikan pengelolaan sumber-sumber pembiayaan dilakukan secara prudent dan bertanggung jawab. Pada sisi penerimaan pembiayaan, sumber utamanya adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang diproyeksikan sebesar Rp200,00 miliar. Meskipun adanya SiLPA merupakan cerminan dari belum optimalnya penyerapan anggaran pada tahun sebelumnya, besaran SiLPA yang terencana ini dimanfaatkan sebagai bantalan fiskal untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya defisit

anggaran di tahun berjalan. Pemerintah Kota Bekasi berkomitmen untuk secara bertahap mengurangi ketergantungan pada SiLPA sebagai sumber penerimaan pembiayaan, sejalan dengan upaya meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Pada sisi pengeluaran pembiayaan, alokasi difokuskan pada penyertaan modal daerah kepada BUMD sebesar Rp27,00 miliar. Penyertaan modal ini dilaksanakan berdasarkan analisis kelayakan investasi dan rencana bisnis BUMD yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah, dengan tujuan memperkuat kapasitas layanan BUMD kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kontribusi BUMD terhadap PAD Kota Bekasi dalam jangka menengah. Dengan mempertimbangkan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tersebut, pembiayaan netto tahun 2027 diproyeksikan sebesar Rp173,00 miliar yang berfungsi menutup proyeksi defisit anggaran pada pos pendapatan dan belanja daerah.

Secara keseluruhan, kebijakan keuangan daerah Kota Bekasi Tahun 2027 berpegang pada prinsip keseimbangan antara kemampuan fiskal dan kebutuhan pembangunan, dengan menjadikan peningkatan kemandirian daerah dan kualitas pelayanan publik sebagai muara dari seluruh kebijakan pengelolaan keuangan yang ditempuh.

3.2 KINERJA KEUANGAN

Pemerintah Kota Bekasi terus berkomitmen dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) untuk tahun anggaran 2024 Tahun Ukur 2025, Kota Bekasi berhasil meraih skor sebesar 66,7524 dengan predikat "Cukup Baik", namun secara kategorisasi performa nasional, Kota Bekasi mendapat nilai "C" dengan peringkat "Perlu Perbaikan". Meskipun menunjukkan konsistensi dalam kepatuhan prosedur, skor tersebut mengindikasikan adanya deviasi antara realisasi kinerja dengan target standar nasional (ideal di atas 75,00), sehingga diperlukan langkah-langkah korektif yang lebih masif pada dimensi yang memiliki gap nilai cukup lebar terutama pada dimensi pelaksanaan anggaran dan dimensi pemenuhan belanja wajib.

Analisis kinerja pelaksanaan APBD merupakan basis empiris yang tidak dapat diabaikan dalam penyusunan proyeksi keuangan daerah untuk tahun rencana. Kinerja APBD selama lima tahun terakhir mencerminkan kapasitas fiskal riil Kota Bekasi, pola penghimpunan pendapatan, kualitas penyerapan belanja, serta kemampuan daerah dalam mengelola pembiayaan secara prudent. Analisis ini dilakukan atas tiga komponen utama APBD — pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah — dengan menggunakan data realisasi APBD tahun 2021 hingga 2025 yang bersumber dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi, serta data realisasi APBD tahun 2025 yang bersumber dari LKPJ Kota Bekasi Tahun 2025.

3.2.1 REALISASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2021-2025

Pendapatan Daerah Kota Bekasi dalam periode 2021–2025 menunjukkan tren pertumbuhan yang positif secara absolut, meskipun

kinerja pencapaian target cenderung berada di bawah 100 persen dan bersifat fluktuatif. Total Pendapatan Daerah Kota Bekasi tumbuh dari Rp5.767,65 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp6.620,94 miliar pada tahun 2025, atau meningkat sebesar 14,8 persen selama lima tahun dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 3,5 persen per tahun.

Dari sisi pencapaian target, hanya pada tahun 2021 Kota Bekasi berhasil melampaui target pendapatan dengan kinerja sebesar 101,44 persen. Pencapaian ini ditopang oleh pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19 yang mengangkat realisasi PAD dan transfer di atas proyeksi awal tahun. Pada tahun-tahun berikutnya, kinerja pendapatan konsisten berada di bawah 100 persen: 98,96 persen pada 2022, 94,95 persen pada 2023, 89,97 persen pada 2024, dan 91,26 persen pada 2025. Rata-rata kinerja pendapatan selama periode 2021–2025 adalah 95,32 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa penetapan target pendapatan daerah secara rata-rata cenderung lebih optimistis dari kapasitas penghimpunan yang dapat dicapai.

A. Pendapatan Asli Daerah

PAD merupakan komponen pendapatan yang paling strategis karena mencerminkan kemandirian fiskal daerah. Realisasi PAD Kota Bekasi secara agregat menunjukkan tren peningkatan dari Rp2.536,71 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp3.507,71 miliar pada tahun 2025. Namun demikian, perjalanan menuju angka tersebut diwarnai oleh sejumlah dinamika yang perlu dicermati.

Pada periode 2021–2023, PAD tumbuh secara konsisten: dari Rp2.536,71 miliar (2021) menjadi Rp2.598,63 miliar (2022), lalu meningkat ke Rp2.729,78 miliar (2023). Namun pada tahun 2024, realisasi PAD justru mengalami penurunan menjadi Rp2.671,24 miliar, atau turun sekitar 2,1 persen dari tahun sebelumnya. Penurunan ini terjadi di tengah target yang justru meningkat signifikan menjadi Rp3.350,24 miliar, sehingga kinerja PAD tahun 2024 hanya mencapai 79,7 persen dari target — capaian terendah selama periode 2021–2025. Komponen pajak daerah, yang secara historis menjadi penyumbang terbesar PAD, mengalami tekanan dari perlambatan transaksi properti yang tercermin dari menurunnya realisasi BPHTB dan PBB.

Lonjakan PAD terjadi pada tahun 2025, di mana realisasinya mencapai Rp3.507,71 miliar — meningkat 31,3 persen dibandingkan tahun 2024. Peningkatan ini tidak terlepas dari implementasi Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai turunan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang memperluas jenis dan tarif retribusi daerah secara signifikan. Hal ini tercermin dari realisasi retribusi daerah tahun 2025 yang mencapai Rp587,80 miliar atau 106,71 persen dari target, serta lain-lain PAD yang sah yang melampaui target dengan kinerja 126,32 persen (Rp108,47 miliar). Di sisi lain, komponen pajak daerah masih menjadi titik lemah dengan realisasi Rp2.795,58 miliar atau hanya 80,54 persen dari target Rp3.470,97 miliar — menandakan bahwa potensi pajak daerah, khususnya dari sektor properti dan restoran, masih jauh dari teroptimalkan.

B. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan komponen terbesar dalam struktur Pendapatan Daerah Kota Bekasi. Selama periode 2021–2025, realisasi pendapatan transfer bergerak dalam kisaran Rp3,02 triliun hingga Rp3,62 triliun. Tren kenaikan yang berlangsung dari 2021 hingga 2024 (dari Rp3.021,52 miliar menjadi Rp3.617,35 miliar) mengalami pembalikan pada tahun 2025 menjadi Rp3.113,22 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh bervariasinya besaran Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi DKI Jakarta yang bersifat tidak rutin dan tidak dapat diproyeksikan kepastiannya dari tahun ke tahun.

Meskipun realisasi transfer selalu mendekati atau melebihi targetnya (kinerja di atas 99 persen pada tahun 2024 dan 2025), tingginya proporsi transfer dalam total pendapatan mencerminkan ketergantungan fiskal yang masih perlu diatasi. Rata-rata proporsi pendapatan transfer terhadap total pendapatan daerah selama 2021–2025 masih berada di kisaran 47–53 persen.

C. Perubahan Struktur Pendapatan

Sebuah perubahan struktural yang signifikan terjadi mulai tahun 2022 ketika pos "Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah" menghilang dari struktur pendapatan daerah. Hal ini merupakan konsekuensi dari berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang mereklasifikasikan beberapa jenis pendapatan yang sebelumnya masuk dalam pos tersebut — seperti dana bagi hasil pajak dari provinsi — menjadi bagian dari Pendapatan Transfer. Perubahan klasifikasi ini perlu diperhitungkan dalam membaca tren longitudinal komponen pendapatan agar tidak menimbulkan kesimpulan yang menyesatkan.

Pada tahun 2025, proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah mencapai 53,0 persen — meningkat tajam dari kisaran 42–45 persen pada 2021–2023. Lompatan proporsi PAD ini mencerminkan perluasan basis pendapatan asli daerah yang ditopang oleh penambahan jenis retribusi baru. Namun perlu dicatat bahwa peningkatan proporsi ini juga dipengaruhi oleh penurunan realisasi transfer di tahun 2025, sehingga perbaikan kemandirian fiskal harus dikonfirmasi pada periode berikutnya.

Secara keseluruhan, realisasi Pendapatan Daerah Kota Bekasi selama periode 2021–2025 terus bertumbuh secara nilai absolut dan mencerminkan kapasitas ekonomi daerah yang berkembang. Namun demikian, pencapaian terhadap target yang ditetapkan belum berjalan konsisten — hanya sekali melampaui target, selebihnya selalu berada di bawah. Kondisi ini mengisyaratkan dua tantangan struktural yang perlu ditangani secara serius. Pertama, penetapan target PAD perlu dilandasi oleh data potensi pajak dan retribusi yang lebih akurat dan mutakhir, agar tidak terjadi deviasi yang berulang antara target dan realisasi. Kedua, diversifikasi sumber PAD perlu diperkuat agar pendapatan daerah tidak terlalu rentan terhadap fluktuasi pajak properti maupun variasi pendapatan transfer yang sepenuhnya berada di luar kendali daerah. Kedua hal ini menjadi pelajaran penting sekaligus landasan dalam menyusun proyeksi pendapatan yang realistis untuk tahun 2027.

3.2.2 REALISASI BELANJA DAERAH TAHUN 2021-2025

Belanja Daerah merupakan instrumen utama pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik dan mewujudkan prioritas pembangunan. Kinerja realisasi Belanja Daerah Kota Bekasi selama periode 2021–2025 secara konsisten berada di bawah pagu yang ditetapkan, dengan kisaran penyerapan antara 85 hingga 89 persen. Tidak ada satu tahun pun dalam periode ini di mana realisasi belanja mencapai atau melampaui 100 persen dari target, berbeda dengan komponen pendapatan yang setidaknya pernah melampaui target pada tahun 2021.

Secara absolut, total realisasi Belanja Daerah tumbuh dari Rp5.704,88 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp6.451,43 miliar pada tahun 2025, atau bertumbuh sebesar 13,1 persen selama lima tahun dengan rata-rata pertumbuhan 3,1 persen per tahun. Kinerja realisasi belanja tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 88,91 persen, dan terendah pada tahun 2025 sebesar 85,38 persen. Rata-rata kinerja realisasi Belanja Daerah selama periode 2021–2025 adalah 86,88 persen.

A. Belanja Operasi

Belanja Operasi secara konsisten mendominasi struktur Belanja Daerah Kota Bekasi dan menunjukkan tren peningkatan proporsi yang perlu dicermati secara kritis. Realisasi Belanja Operasi tumbuh dari Rp4.204,03 miliar (2021) menjadi Rp5.418,28 miliar (2025), dengan proporsi terhadap total belanja yang terus meningkat dari 73,7 persen pada 2021 menjadi 84,0 persen pada 2025. Komponen belanja pegawai dan belanja barang dan jasa menjadi dua pos terbesar, yang secara bersama-sama menyerap lebih dari 95 persen dari total Belanja Operasi.

Pada tahun 2025, kinerja Belanja Operasi tercatat 88,32 persen dari pagu Rp6.134,81 miliar. Realisasi belanja pegawai mencapai Rp2.533,34 miliar (88,53 persen) — angka ini meningkat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya karena pembayaran gaji dan tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi tahun 2025 yang mulai aktif bekerja. Belanja barang dan jasa terealisasi Rp2.454,22 miliar (86,82 persen), belanja hibah Rp266,46 miliar (95,27 persen), dan belanja bantuan sosial Rp162,85 miliar (99,68 persen). Belanja subsidi hanya terealisasi 37,83 persen dari pagu karena penyesuaian kebutuhan yang jauh lebih rendah dari perkiraan awal.

B. Belanja Modal

Temuan yang paling kritis dalam analisis Belanja Daerah periode 2021–2025 adalah tren penurunan yang konsisten pada Belanja Modal, baik dari sisi realisasi absolut maupun proporsinya terhadap total belanja. Realisasi Belanja Modal bergerak menurun dari Rp1.189,30 miliar (2021) menjadi Rp1.014,77 miliar (2025), dengan fluktuasi pada tahun 2023 yang sempat sedikit meningkat ke Rp1.153,11 miliar sebelum kembali turun. Lebih mengkhawatirkan, proporsi Belanja Modal terhadap total belanja terus menyusut dari 20,8 persen pada 2021 menjadi hanya 15,7 persen pada 2025.

Kinerja Belanja Modal tahun 2025 hanya mencapai 73,58 persen dari pagu Rp1.379,12 miliar — capaian terendah dalam lima tahun terakhir. Rendahnya serapan ini terutama disebabkan oleh kompleksitas dan lamanya proses pengadaan lahan untuk berbagai proyek infrastruktur kota, termasuk perluasan Tempat Pemakaman Umum (TPU) dan simpang jalan, serta proses

administrasi yang melibatkan sumber pendanaan dari Bantuan Keuangan Khusus Provinsi DKI Jakarta. Penyusutan porsi Belanja Modal secara konsisten mengindikasikan bahwa kapasitas investasi pembangunan fisik daerah semakin tergerus oleh meningkatnya beban belanja operasi yang bersifat rutin dan mengikat. Kondisi ini perlu mendapat perhatian serius dalam perencanaan belanja tahun 2027 agar akselerasi pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik tidak terhambat.

C. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga (BTT) mencerminkan fleksibilitas fiskal daerah dalam merespons keadaan darurat dan kejadian luar biasa. Pada tahun 2021, realisasi BTT masih relatif tinggi di angka Rp311,55 miliar — merupakan sisa dampak penanganan COVID-19 yang masih memerlukan belanja darurat. Sejak tahun 2022 hingga 2025, realisasi BTT turun drastis ke kisaran Rp3,70 miliar hingga Rp21,54 miliar, mencerminkan normalnya kondisi dan tidak adanya bencana skala besar di Kota Bekasi selama periode tersebut. Pada tahun 2025, BTT hanya terealisasi Rp18,38 miliar atau 44,06 persen dari pagu Rp41,72 miliar — penyerapan yang rendah namun wajar mengingat sifat belanja ini yang memang hanya digunakan apabila benar-benar diperlukan.

D. Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan komponen yang relatif baru dan nilainya berfluktuatif. Pada tahun 2022 dan 2023, realisasi Belanja Transfer masing-masing sebesar Rp1,00 miliar dan Rp50,00 miliar. Lonjakan signifikan terjadi pada tahun 2024 dengan realisasi Rp105,34 miliar yang sepenuhnya terserap 100 persen — komponen ini mencerminkan Bantuan Keuangan kepada pihak lain yang telah ditetapkan dan bersifat mengikat. Pada tahun 2025, tidak terdapat realisasi Belanja Transfer.

Secara keseluruhan, kinerja Belanja Daerah Kota Bekasi selama 2021–2025 mencerminkan dua kondisi yang kontradiktif. Di satu sisi, penyerapan belanja yang stabil di kisaran 85–89 persen menunjukkan adanya disiplin fiskal yang terkelola. Di sisi lain, meningkatnya dominasi belanja operasi yang bersifat konsumtif — disertai penyusutan berkelanjutan proporsi belanja modal — mengindikasikan berkurangnya ruang fiskal untuk investasi pembangunan yang produktif dan berdampak jangka panjang. Tren ini menjadi catatan serius dalam penyusunan kebijakan belanja tahun 2027, di mana penguatan alokasi belanja modal dan efisiensi belanja operasi harus menjadi komitmen yang terukur dan terlaksana.

3.2.3 REALISASI PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2021-2025

Pembiayaan Daerah merupakan komponen APBD yang berfungsi menjaga keseimbangan fiskal antara pendapatan dan belanja daerah. Struktur pembiayaan Kota Bekasi selama periode 2021–2025 didominasi oleh penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, sementara pengeluaran pembiayaan terutama dialokasikan untuk penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kinerja realisasi pembiayaan secara keseluruhan menunjukkan tingkat yang sangat tinggi dan konsisten — berkisar antara 95 hingga 100 persen — mencerminkan bahwa pelaksanaan pembiayaan relatif sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

A. Penerimaan Pembiayaan

Sumber tunggal penerimaan pembiayaan Kota Bekasi selama periode 2021–2025 adalah penggunaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya. Tidak terdapat penerimaan dari pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, maupun penerimaan pinjaman daerah dalam periode ini — sebuah kondisi yang mencerminkan kehati-hatian Pemerintah Kota Bekasi dalam menjaga posisi utang daerah yang bersih.

Nilai SiLPA yang digunakan sebagai penerimaan pembiayaan menunjukkan tren yang menarik untuk dicermati. Nilainya meningkat dari Rp776,52 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp893,70 miliar pada tahun 2023, kemudian menurun tajam ke Rp591,84 miliar pada tahun 2024, dan berlanjut turun ke Rp358,85 miliar pada tahun 2025. Penurunan SiLPA yang digunakan ini sesungguhnya tidak selalu merupakan sinyal negatif. Justru sebaliknya, penurunan SiLPA mencerminkan perbaikan dalam kualitas penyerapan anggaran pada tahun-tahun sebelumnya — artinya semakin sedikit anggaran yang tersisa tidak terserap di akhir tahun. Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah Kota Bekasi untuk terus meningkatkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Namun demikian, penurunan SiLPA yang signifikan dari Rp893,70 miliar (penerimaan 2023) menjadi Rp358,85 miliar (penerimaan 2025) juga berarti berkurangnya bantalan fiskal yang tersedia untuk menutup defisit anggaran pada tahun-tahun mendatang. Kondisi ini menjadi sinyal penting bahwa Kota Bekasi semakin tidak dapat mengandalkan SiLPA sebagai sumber utama pembiayaan defisit, dan mendorong perlunya peningkatan kemampuan penghimpunan PAD secara riil serta efisiensi belanja yang lebih terukur.

B. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan Kota Bekasi selama periode 2021–2025 terdiri dari penyertaan modal daerah kepada BUMD, investasi non-permanen, dan pembentukan dana cadangan. Penyertaan modal menjadi komponen pengeluaran pembiayaan yang paling dominan dan konsisten hadir di setiap tahun anggaran.

Pada tahun 2021, pengeluaran pembiayaan hanya sebesar Rp12,60 miliar — sangat rendah dibandingkan tahun-tahun berikutnya — karena penyertaan modal masih sangat terbatas dalam periode pemulihan pascapandemi. Pengeluaran pembiayaan meningkat signifikan pada tahun 2022 menjadi Rp75,88 miliar, di mana selain penyertaan modal sebesar Rp45,88 miliar, juga terdapat pembentukan dana cadangan sebesar Rp30,00 miliar. Pembentukan dana cadangan berlanjut pada tahun 2023 sebesar Rp37,47 miliar, sehingga total pengeluaran pembiayaan mencapai Rp99,97 miliar — tertinggi selama periode 2021–2025. Dana cadangan yang dibentuk pada 2022–2023 ini dialokasikan untuk mendukung kebutuhan belanja yang bersifat strategis dan terencana dalam jangka menengah.

Pada tahun 2024, pengeluaran pembiayaan kembali menyederhanakan strukturnya menjadi hanya penyertaan modal sebesar Rp43,00 miliar. Sementara pada tahun 2025, penyertaan modal meningkat menjadi Rp57,50 miliar dan terealisasi 100 persen sesuai target, menunjukkan komitmen yang terencana dalam memperkuat kapasitas BUMD sebagai salah satu sumber PAD di masa mendatang.

C. Pembiayaan Neto dan SiLPA

Pembiayaan Neto — selisih antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan — mencerminkan kemampuan pembiayaan daerah dalam menutup defisit anggaran. Nilai Pembiayaan Neto menunjukkan tren penurunan yang konsisten sejak 2023: dari Rp793,73 miliar (2023) menjadi Rp548,84 miliar (2024) dan Rp301,35 miliar (2025). Penurunan ini merupakan akibat langsung dari menyusutnya SiLPA yang tersedia sekaligus meningkatnya pengeluaran pembiayaan. Meskipun nilai Pembiayaan Neto yang lebih rendah mencerminkan berkurangnya ketergantungan pada sumber pembiayaan lama, hal ini juga mensyaratkan bahwa defisit anggaran di tahun mendatang harus dapat ditutup oleh sumber yang lebih terencana dan terstruktur.

Secara keseluruhan, kinerja pembiayaan daerah Kota Bekasi selama 2021–2025 tergolong sangat baik dari sisi realisasi. Namun yang lebih penting untuk dicermati adalah perubahan struktural yang terjadi: ketergantungan pada SiLPA sebagai sumber pembiayaan semakin berkurang, dan ruang fiskal yang tersedia untuk menutup defisit semakin menyempit. Kondisi ini menuntut perencanaan yang lebih cermat dalam penetapan defisit dan sumber pembiayaannya pada tahun 2027, serta menjadi dorongan kuat untuk mempercepat peningkatan kinerja PAD agar kapasitas fiskal daerah dapat tumbuh dari sumber yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

3.3 PROYEKSI KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2027

Proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2027 disusun berdasarkan tiga sumber acuan utama: pertama, proyeksi dalam RPJMD Kota Bekasi 2025–2029 sebagai kerangka perencanaan jangka menengah; kedua, kinerja keuangan daerah tahun 2021–2025 yang telah dianalisis pada sub-bab sebelumnya; dan ketiga, kebijakan keuangan terbaru yang mencakup perubahan regulasi desentralisasi fiskal, kebijakan transfer pusat, dan kondisi lingkungan ekonomi yang dinamis. Sesuai dengan Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2027, proyeksi keuangan ini tidak harus identik dengan angka yang tertuang dalam RPJMD, melainkan disesuaikan berdasarkan evaluasi kinerja dan pertimbangan kondisi terkini untuk akurasi proyeksi.

3.3.1 PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2027

Total Pendapatan Daerah Kota Bekasi Tahun 2027 diproyeksikan sebesar Rp6,70 triliun, meningkat sekitar Rp16,5 miliar dari proyeksi APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp6,68 triliun dan menurun jika dibandingkan dengan proyeksi dalam RPJMD tahun 2025-2029 yang sebesar Rp7,027 triliun. Perbedaan ini sangat dipengaruhi oleh dinamisme global, nasional, dan regional. Pertumbuhan yang relatif moderat ini mencerminkan kehati-hatian dalam memproyeksikan pendapatan dengan mempertimbangkan kinerja realisasi historis yang secara rata-rata hanya mencapai 95,32 persen dari target, ketidakpastian besaran dana transfer dari pemerintah pusat, serta tekanan ekonomi yang masih membayangi aktivitas perpajakan daerah.

A. Proyeksi Pendapatan Asli Daerah

PAD tahun 2027 diproyeksikan sebesar Rp4,019 triliun, meningkat sebesar Rp17 miliar dari proyeksi PAD tahun 2026 sebesar Rp4,002 triliun. Proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah pada tahun 2027 diproyeksikan mencapai 59,95 persen — di atas rata-rata proporsi PAD periode 2021–2024 yang berkisar 42–45 persen. Peningkatan proporsi PAD ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Bekasi dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah, seiring ekspansi basis pendapatan yang ditopang oleh berlakunya Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak daerah tetap menjadi komponen PAD terbesar dengan proyeksi Rp3,44 triliun, meningkat sekitar Rp20 miliar dari proyeksi tahun 2026 yang sebesar Rp3,42 triliun. Proyeksi ini mempertimbangkan dua faktor utama. Pertama, penerapan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagai implikasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang menambah aliran penerimaan pajak daerah dari sektor kendaraan bermotor. Kedua, upaya intensifikasi penagihan piutang pajak properti — terutama BPHTB dan PBB — yang pada tahun 2025 masih hanya terealisasi 80,54 persen dari target. Potensi perbaikan kinerja pajak daerah melalui pembaruan data wajib pajak, penegakan Perda, dan kolaborasi dengan Kejaksaan menjadi faktor pendorong pertumbuhan yang diperhitungkan dalam proyeksi ini.

Retribusi daerah diproyeksikan tumbuh moderat menjadi Rp537,59 miliar dari Rp516,91 miliar pada 2026. Proyeksi ini mempertimbangkan realisasi retribusi 2025 yang justru melampaui target (106,71 persen), sehingga penetapan target 2027 dilakukan secara konservatif untuk menghindari penetapan angka yang terlalu ambisius namun tidak dapat dicapai.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diproyeksikan menurun menjadi Rp17,82 miliar dari Rp22,75 miliar pada 2026. Sementara lain-lain PAD yang Sah diproyeksikan menurun dari Rp40,09 miliar di tahun 2026 menjadi Rp23,27 miliar di tahun 2027.

B. Proyeksi Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer Tahun 2027 diproyeksikan tetap dengan tahun 2026 sebesar Rp2,685 triliun. Kondisi ini mempertimbangkan kebijakan pengurangan transfer dari pemerintah pusat pada periode sebelumnya serta sebagai konsekuensi dari pendekatan konservatif dalam memproyeksikan jenis-jenis transfer yang bersifat specific grant — seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID), dan Bantuan Keuangan yang bersifat khusus — yang penetapan besarnya sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat dan tidak dapat dipastikan pada tahap penyusunan RKPD. Proyeksi transfer hanya mencakup komponen yang dapat diperkirakan secara lebih terukur, yakni Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Transfer dari Pemerintah Pusat diproyeksikan sebesar Rp2,312 triliun, sedangkan Transfer Antar Daerah diproyeksikan tetap sebesar Rp373,43 miliar — meningkat jika dibandingkan proyeksi tahun 2026 — yang mencerminkan estimasi bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diproyeksikan meningkat.

Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2027 sebesar Rp6,704 triliun ini disusun dengan mempertimbangkan asumsi bahwa upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD berjalan sesuai rencana, tidak terjadi guncangan ekonomi yang signifikan yang dapat menekan basis pajak, serta kebijakan transfer dari pemerintah pusat tidak mengalami perubahan yang drastis. Apabila terdapat perubahan signifikan pada salah satu asumsi tersebut, proyeksi pendapatan nantinya akan disesuaikan kembali melalui mekanisme Perubahan RKPD Tahun 2027.

3.3.2 PROYEKSI BELANJA DAERAH TAHUN 2027

Total Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun 2027 diproyeksikan sebesar Rp6,792 triliun, turun sekitar Rp146 miliar dari proyeksi belanja tahun 2026 sebesar Rp6,938 triliun dan menurun jika dibandingkan dengan proyeksi dalam RPJMD tahun 2025-2029 yang sebesar Rp7,027 triliun. Proyeksi ini didasarkan pada prinsip keseimbangan fiskal di mana pertumbuhan belanja diselaraskan dengan pertumbuhan pendapatan daerah, dengan mempertimbangkan defisit yang direncanakan sebesar Rp291 miliar yang akan ditutup melalui pembiayaan neto.

Pada tahap penyusunan Rancangan Akhir RKPD ini, rincian proyeksi belanja per komponen — yakni Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga — untuk tahun 2027 belum dapat diuraikan karena proses penyusunan rencana kerja dan anggaran indikatif per perangkat daerah masih dalam tahap konsolidasi. Proyeksi belanja tahun 2027 akan diperinci per komponen dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2027 yang disusun setelah RKPD ini ditetapkan. Namun demikian, arah kebijakan alokasi belanja daerah tahun 2027 dapat dirumuskan secara jelas berdasarkan evaluasi kinerja belanja tahun-tahun sebelumnya, kebijakan nasional yang mengikat, serta prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD 2025–2029. Selain itu, sebagai tindak lanjut arahan dari Provinsi Jawa Barat, alokasi belanja infrastruktur jalan akan dianggarkan minimal 7 persen dari APBD TA 2027.

A. Proyeksi Belanja Operasi

Belanja Operasi diproyeksikan tetap menjadi komponen belanja terbesar pada tahun 2027, mengikuti tren yang telah berlangsung selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2026, Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp5,893 triliun atau 84,9 persen dari total belanja. Proporsi ini tidak semestinya terus meningkat pada tahun 2027 mengingat risiko yang telah diidentifikasi dari tren 2021–2025, di mana meningkatnya dominasi belanja operasi secara konsisten telah menggerus ruang fiskal untuk investasi produktif.

Komponen belanja pegawai pada tahun 2027 diproyeksikan mengalami peningkatan moderat sejalan dengan proses rekrutmen dan pengangkatan PPPK formasi baru serta penyesuaian tunjangan kinerja daerah yang terencana. Belanja barang dan jasa diarahkan untuk lebih selektif dengan menerapkan prinsip efisiensi yang terukur, termasuk pembatasan belanja perjalanan dinas, rapat di luar kantor, dan kegiatan seremonial yang tidak langsung berdampak pada peningkatan pelayanan publik. Sementara belanja hibah dan bantuan sosial diarahkan untuk mendukung program prioritas nasional seperti pemenuhan jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak

mampu, percepatan penurunan stunting, dan perlindungan sosial bagi kelompok rentan.

B. Proyeksi Belanja Modal

Kebijakan Belanja Modal Tahun 2027 diarahkan untuk membalikkan tren penyusutan yang terjadi selama periode 2021–2025, di mana proporsi Belanja Modal terhadap total belanja terus menurun dari 20,8 persen (2021) menjadi hanya 15,7 persen (2025). Pembalikan tren ini mutlak diperlukan mengingat masih besarnya kebutuhan investasi infrastruktur Kota Bekasi — mulai dari infrastruktur pengendali banjir, kemantapan jalan, penyediaan fasilitas pelayanan publik, hingga revitalisasi sarana prasarana pendidikan dan kesehatan.

Pada tahun 2026, Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp1,014 triliun dengan empat komponen terbesar yaitu belanja modal jalan, jaringan dan irigasi (Rp368,30 miliar); belanja modal gedung dan bangunan (Rp320,20 miliar); belanja modal peralatan dan mesin (Rp178,64 miliar); serta belanja modal tanah (Rp142,43 miliar). Pola alokasi yang serupa dipertahankan pada tahun 2027 dengan penekanan pada pemenuhan kewajiban *mandatory spending* infrastruktur minimal 40 persen dari total belanja di luar belanja bagi hasil dan transfer, sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 147 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Untuk meningkatkan efektivitas realisasi Belanja Modal — yang pada tahun 2025 hanya terserap 73,58 persen — Pemerintah Kota Bekasi berkomitmen mempercepat proses perencanaan teknis, penetapan lokasi, dan pengadaan lahan sejak awal tahun anggaran. Selain itu, koordinasi lintas perangkat daerah dan dengan instansi vertikal terkait perlu diperkuat untuk memastikan proyek-proyek infrastruktur prioritas dapat terlaksana sesuai jadwal.

C. Proyeksi Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga Tahun 2027 ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi risiko bencana alam dan kejadian luar biasa yang dapat terjadi di Kota Bekasi, termasuk risiko banjir yang secara historis menjadi ancaman tahunan. Alokasi BTT dirancang secara proporsional — cukup untuk mengantisipasi keadaan darurat tanpa menggerus ruang fiskal untuk program pembangunan yang terencana. Kinerja BTT yang sangat rendah dalam beberapa tahun terakhir (realisasi jauh di bawah pagu) menunjukkan bahwa penetapan pagu BTT sebelumnya terlalu besar dan perlu dikalibrasi dengan lebih realistis berdasarkan tingkat risiko yang teridentifikasi.

Proyeksi total Belanja Daerah Tahun 2027 sebesar Rp6,996 triliun ini disusun dengan asumsi bahwa pendapatan daerah terealisasi sesuai proyeksi dan defisit anggaran ditutup melalui pembiayaan neto yang tersedia. Komitmen untuk menjaga keseimbangan antara pemenuhan belanja operasi yang efisien dan penguatan belanja modal yang produktif menjadi kunci utama dalam memastikan APBD Tahun 2027 benar-benar berpihak pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan percepatan pembangunan Kota Bekasi yang nyaman dan sejahtera.

3.3.3 PROYEKSI PEMBIAYAAN DAERAH

Proyeksi pembiayaan daerah Kota Bekasi Tahun 2027 disusun dengan memperhatikan dua fungsi utama: menutup defisit anggaran yang direncanakan, serta memastikan alokasi penyertaan modal kepada BUMD tetap terlaksana sebagai bagian dari strategi penguatan pendapatan daerah jangka menengah. Struktur pembiayaan tahun 2027 mencerminkan kesinambungan pola yang telah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir, dengan SiLPA tahun sebelumnya sebagai satu-satunya sumber penerimaan pembiayaan dan penyertaan modal daerah sebagai komponen pengeluaran pembiayaan utama.

A. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan Kota Bekasi Tahun 2027 bersumber sepenuhnya dari penggunaan SiLPA Tahun Anggaran 2026 yang diproyeksikan sebesar Rp115 miliar. Besaran SiLPA ini merupakan hasil dari selisih penerimaan dan pengeluaran pada APBD 2026 yang dirancang secara terencana untuk mencukupi kebutuhan pembiayaan defisit tahun 2027.

Proyeksi SiLPA sebesar Rp115 miliar ini perlu dibaca dalam konteks tren penurunan SiLPA yang telah berlangsung selama lima tahun terakhir. Realisasi SiLPA yang digunakan sebagai penerimaan pembiayaan bergerak menurun dari Rp776,52 miliar pada 2021 menjadi Rp893,70 miliar pada 2023, lalu turun tajam ke Rp591,84 miliar pada 2024 dan Rp358,85 miliar pada 2025. Proyeksi Rp155 miliar untuk 2027 melanjutkan tren penurunan ini — sebuah kondisi yang di satu sisi menunjukkan perbaikan kualitas penyerapan anggaran, namun di sisi lain mengisyaratkan bahwa bantalan fiskal dari SiLPA semakin tipis. Kota Bekasi tidak lagi dapat mengandalkan SiLPA yang besar sebagai penyangga fiskal sebagaimana yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

Tidak terdapat proyeksi penerimaan pembiayaan dari sumber lain seperti pinjaman daerah, pencairan dana cadangan, maupun hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2027. Kondisi ini mencerminkan komitmen Kota Bekasi untuk menjaga posisi utang daerah tetap bersih dan tidak membebani APBD masa mendatang dengan kewajiban cicilan pokok dan bunga pinjaman.

B. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan tahun 2027 diproyeksikan sebesar Rp27,00 miliar, seluruhnya dialokasikan untuk penyertaan modal daerah kepada BUMD. Besaran ini sama dengan proyeksi pengeluaran pembiayaan tahun 2026, mencerminkan konsistensi komitmen Pemerintah Kota Bekasi dalam memperkuat permodalan BUMD secara bertahap dan terencana.

Penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal yang telah ditetapkan, dengan mempertimbangkan analisis kelayakan investasi dan rencana bisnis BUMD penerima modal. Tujuan utama penyertaan modal ini adalah memperluas kapasitas pelayanan BUMD kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kontribusi BUMD terhadap PAD Kota Bekasi dalam jangka menengah. Penyertaan modal juga harus dipastikan bersumber dari surplus APBD yang terencana, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Pembiayaan Neto dan Keseimbangan Akhir

Dengan proyeksi penerimaan pembiayaan sebesar Rp115 miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp27,00 miliar, pembiayaan neto Tahun 2027 diproyeksikan sebesar Rp88 miliar. Besaran ini dirancang tepat untuk menutup defisit anggaran yang direncanakan pada pos pendapatan dan belanja daerah, sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pada akhir tahun 2027 ditargetkan sebesar nol — mencerminkan perencanaan anggaran yang seimbang dan terukur.

Secara keseluruhan, proyeksi pembiayaan daerah Tahun 2027 mencerminkan kondisi fiskal yang semakin ketat namun terkelola. Penyusutan SiLPA yang tersedia sebagai penerimaan pembiayaan dari Rp776,52 miliar pada 2021 menjadi Rp115 miliar pada proyeksi 2027 merupakan sinyal yang harus dibaca secara konstruktif: bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak lagi dapat mengandalkan akumulasi sisa anggaran tahun lalu, melainkan harus bertumpu pada kemampuan meningkatkan pendapatan secara riil dan membelanjakan anggaran secara lebih efektif dan tepat sasaran. Proyeksi pembiayaan yang berimbang pada akhir tahun 2027 menegaskan komitmen Pemerintah Kota Bekasi untuk menjalankan fiskal yang disiplin, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang optimal.

3.4 PENDANAAN NON APBD

Keterbatasan kapasitas fiskal APBD menjadikan sumber pendanaan di luar anggaran pemerintah daerah sebagai komponen penting dalam mendukung pencapaian target pembangunan Kota Bekasi Tahun 2027. Pendanaan non APBD meliputi pendanaan dari swasta, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) serta Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Sektor swasta di Kota Bekasi berperan penting dalam mendukung pembangunan kota, baik secara langsung melalui investasi maupun tidak langsung melalui kemitraan dan program tanggung jawab sosial. Bentuk investasi langsung dalam mendukung pembangunan kota seperti pembangunan pusat perbelanjaan, kawasan perumahan, fasilitas wisata, dan lainnya. Bentuk pembangunan seperti ini sangat berpengaruh terhadap daya tarik kota yang secara tidak langsung berkontribusi dalam menggerakkan perekonomian kota.

Investasi swasta yang masuk ke Kota Bekasi dalam bentuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan sumber pendanaan non-APBD terbesar yang secara langsung mendorong pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan penguatan basis pajak daerah. Realisasi investasi Kota Bekasi selama lima tahun terakhir bersifat fluktuatif. Pada tahun 2024, realisasi investasi mengalami peningkatan yang antara lain ditopang oleh masuknya investasi besar dari pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jatiluhur 1. Namun pada triwulan kedua 2025, peringkat realisasi investasi Kota Bekasi di Provinsi Jawa Barat turun ke posisi ketujuh dari sebelumnya posisi keempat pada tahun 2024 — mencerminkan meningkatnya tekanan persaingan dari daerah-daerah lain.

Tiga faktor struktural utama yang menjadi penghambat pertumbuhan investasi Kota Bekasi adalah keterbatasan ketersediaan lahan akibat tingkat urbanisasi yang sudah sangat tinggi, Upah Minimum Kota yang merupakan tertinggi di Indonesia, serta berkembangnya kawasan industri baru di Kabupaten Subang dan Purwakarta yang menawarkan pilihan yang lebih kompetitif bagi investor berbasis lahan dan manufaktur padat karya. Menghadapi kondisi ini, strategi peningkatan investasi Kota Bekasi diarahkan pada optimalisasi lahan yang masih tersedia, penguatan layanan perizinan yang lebih cepat dan mudah, serta perluasan promosi investasi untuk menarik sektor-sektor yang tidak bergantung pada ketersediaan lahan luas.

Nilai investasi PMDN dan PMA Kota Bekasi pada tahun 2027 ditargetkan sebesar Rp15.419 miliar, meningkat Rp593 miliar atau 4,00 persen dari target tahun 2026 sebesar Rp14.826 miliar. Laju pertumbuhan investasi sebesar 4,00 persen ini sama dengan target tahun 2026, mencerminkan proyeksi yang realistis dan konsisten dengan kapasitas daya tarik investasi daerah yang ada.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mencerminkan keseluruhan investasi dalam aset tetap produktif yang dilakukan oleh seluruh pelaku ekonomi — pemerintah dan swasta — di wilayah Kota Bekasi dalam satu tahun anggaran. PMTB Kota Bekasi menunjukkan tren peningkatan yang konsisten pascapandemi COVID-19, mencerminkan pulihnya kepercayaan pelaku ekonomi dalam membangun dan mengembangkan kapasitas produksi. Sebagai proporsi terhadap PDRB, PMTB Kota Bekasi ditargetkan sebesar 33,92 persen pada tahun 2026 dan meningkat menjadi 33,95 persen pada tahun 2027. Rasio PMTB terhadap PDRB yang berada di atas 33 persen ini menunjukkan intensitas investasi fisik yang relatif tinggi sebagai penopang pertumbuhan ekonomi jangka menengah.

Pendanaan lain dalam pembangunan Kota Bekasi yaitu bersumber dari PKBL dan TJSL. PKBL dan TJSL di Kota Bekasi tahun 2021-2024 yang tercatat baru berasal dari Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB). Pendanaan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Mencermati masih minimnya pendanaan yang bersumber dari PKBL dan TJSL di atas, diperlukan upaya terobosan peningkatan pendanaan dan perluasan mitra. Hal ini penting untuk lebih memberikan manfaat kepada masyarakat dan pemanfaatannya dapat diarahkan untuk membantu menangani persoalan yang menjadi fokus perhatian misalnya terkait penanganan stunting, kemiskinan, penataan PKL, estetika kota, dan lainnya.

Keterlibatan pihak swasta sebagai inovasi dalam pembangunan infrastruktur akan menciptakan pelayanan publik yang lebih baik. Terkait hal tersebut, Pemerintah Kota Bekasi juga melaksanakan pembangunan infrastruktur dengan skema KPBU berdasarkan prinsip alokasi risiko yang proporsional. KPBU adalah kerja sama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu kepada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh penanggung jawab proyek kerja sama, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko antara pihak (Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2023).

Bentuk kerja sama ini ditujukan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas, efisien, dan tepat guna, serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Proyek KPBU adalah penyediaan infrastruktur yang dilakukan melalui Perjanjian KPBU antara Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK). Infrastruktur yang dapat dikerjasamakan meliputi infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial.

Beberapa KPBU yang telah dan direncanakan akan dilaksanakan di Kota Bekasi, antara lain:

- KPBU SPAM Regional Jatiluhur I

Proyek SPAM Regional Jatiluhur I merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional yang pembiayaannya menggunakan skema KPBU untuk penyediaan infrastruktur air minum curah (AMC). Proyek dengan kapasitas 4.750 l/d (liter per detik) ini melayani Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan DKI Jakarta. Pembangunan proyek yang dimulai pada akhir tahun 2021, saat ini telah selesai dikerjakan.

- KPBU Ducting

KPBU ini merupakan kerja sama berupa pembangunan ducting dan menara telekomunikasi di ruas jalan Kota Bekasi. Tujuan utama dari proyek ini adalah untuk merapikan tampilan kabel-kabel utilitas, meningkatkan keamanan dan kenyamanan pejalan kaki, serta mendukung penerapan Bekasi Smart City. Pengerjaan proyek ini dilaksanakan diruas jalan Kota Bekasi dengan panjang jalur saluran ducting sepanjang 608.673 meter dan pembangunan sebanyak 373 Menara Telekomunikasi Seluler (Mikro Seluler/Microcell Pole (MCP)) di jalur jalan Kota Bekasi. Untuk ke depannya, KPBU Ducting ini direncanakan akan dilakukan kembali di beberapa ruas yang ada di Kota Bekasi.

- KPBU Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa)

KPBU pengelolaan sampah di Kota Bekasi mengacu pada upaya pemerintah kota untuk melibatkan pihak swasta dalam membangun dan mengelola fasilitas pengolahan sampah, seperti Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) atau Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah, mengurangi volume sampah yang dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), dan menghasilkan energi terbarukan. Tahap yang sedang dilakukan yaitu permohonan dukungan yang ditujukan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.

Selain dari sumber pendanaan di atas, terdapat beberapa alternatif pembiayaan pembangunan yang dapat dimanfaatkan, misalnya:

1. Pinjaman Daerah

Pinjaman daerah dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur layanan publik. Pinjaman ini dapat bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank. Namun demikian, dalam prosesnya memerlukan persetujuan DPRD untuk pinjaman jangka menengah dan jangka panjang.

2. Obligasi Daerah

Obligasi daerah adalah surat utang jangka menengah atau panjang yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan investasi

yang menghasilkan penerimaan dan manfaat bagi masyarakat. Dalam konteks kota, obligasi daerah kota diterbitkan oleh pemerintah kota untuk membiayai proyek-proyek pembangunan di wilayah kota tersebut.

Tujuan penerbitan obligasi ini yaitu untuk membiayai proyek infrastruktur, seperti pembangunan jalan, jembatan, atau fasilitas umum lainnya. Selain itu, obligasi dapat mendukung program-program pelayanan publik yang memberikan manfaat bagi masyarakat kota. Obligasi ini juga merupakan bentuk diversifikasi sumber pembiayaan pembangunan daerah.

3. Zakat dan Wakaf

Zakat memiliki potensi yang sangat besar dalam membantu pembangunan daerah berkelanjutan, terutama dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Secara teori, zakat adalah salah satu instrumen utama dalam redistribusi kekayaan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan membantu masyarakat yang kurang mampu. Dalam konteks pembangunan daerah, zakat dapat digunakan untuk membiayai berbagai proyek yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

4.1.1 SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Sasaran pembangunan nasional termuat pada RPJM Nasional Tahun 2025-2029 yang sekaligus menjadi fondasi dalam pembangunan Indonesia Tahun 2027. Sasaran utama pembangunan pada tahun 2027 berada pada fase akselerasi pertumbuhan sebagai jembatan menuju 8 persen pada 2029 sesuai RPJMN 2025-2029. Secara lebih detail, sasaran dan target yang merupakan trisula pembangunan seperti pada gambar berikut.

4.1.2 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA BARAT

RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2027 diarahkan untuk melaksanakan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat periode 2025-2029, yaitu: “Jawa Barat Istimewa, Lembur Diurus, Kota Ditata”. Adapun tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2027, seperti pada gambar berikut.

4.1.3 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN KOTA BEKASI

Tujuan dan sasaran pembangunan Kota Bekasi Tahun 2027 sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029. Tujuan dan sasaran pembangunan Kota Bekasi dijelaskan seperti pada gambar berikut.

Ketercapaian dari tujuan dan sasaran pembangunan Kota Bekasi sebagaimana yang digambarkan di atas ditunjukkan dengan indikator dan target. Indikator dan target tersebut dijelaskan pada tabel berikut.

KESELARASAN TRISULA DAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL, PROVINSI JAWA BARAT DAN KOTA BEKASI

Trisula Pembangunan dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027 adalah tiga pilar utama strategi nasional untuk mengentaskan kemiskinan dan memacu pertumbuhan ekonomi. Fokus utamanya meliputi penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Keselarasan Trisula Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Barat, dan Kota Bekasi Tahun 2027 seperti pada tabel di bawah ini.

Untuk keselarasan sasaran dan indikator pembangunan tahun 2026 secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

4.2 TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

4.2.1 TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

Tema RKP Tahun 2027 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi dan Industri”. Sebagai penjabaran dari tema RPJMN 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”, RKP Tahun 2027 menjadi perencanaan pada tahun ketiga pelaksanaan RPJMN 2025-2029.

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2027, ditetapkanlah prioritas nasional. Prioritas nasional ini dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas utama sebagaimana termuat dalam (Lampiran I) RPJMN Tahun 2025-2029. Prioritas nasional dan kegiatan prioritas utama seperti pada tabel di bawah ini.

4.2.2 TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA BARAT

RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2027 mengusung tema pembangunan “Pengembangan Produktivitas Perekonomian Berbasis Penguatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pembangunan”. Tema tersebut memiliki makna bahwa pengembangan produktivitas dilaksanakan melalui produksi pangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif serta industri yang didukung oleh sumber daya manusia dan tata kelola pembangunan yang berkualitas. Tata kelola pembangunan yang produktif dan efektif akan meningkatkan daya saing tenaga kerja, mendorong iklim investasi, dan pertumbuhan sektor produktif yang akan mempercepat penciptaan lapangan kerja baru dan penyerapan tenaga kerja secara inklusif dan berkelanjutan di Provinsi Jawa Barat.

Untuk mewujudkan visi Jabar Istimewa sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029, prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2027 diuraikan seperti pada tabel berikut.

4.2.3 TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA BEKASI

RKPD Kota Bekasi Tahun 2027 mengusung tema “Peningkatan Ketahanan Kota Bekasi melalui Optimalisasi Belanja Pembangunan yang Mendorong Produktivitas Tinggi”. Tema ini menekankan upaya pemerintah daerah untuk memperkuat kemampuan Kota Bekasi dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan, baik ekonomi, sosial, maupun lingkungan, melalui pemanfaatan anggaran pembangunan yang lebih efektif serta peningkatan produktivitas seluruh potensi daerah sehingga mampu menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Terdapat 3 (tiga) penekanan terkait tema di atas, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut:

1. Peningkatan ketahanan kota, menggambarkan upaya memperkuat kemampuan kota dalam menghadapi berbagai dinamika dan risiko pembangunan, seperti tekanan urbanisasi, perubahan ekonomi, kemacetan, banjir, serta tantangan sosial. Ketahanan kota diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur yang andal, pelayanan publik yang berkualitas, serta penguatan kapasitas ekonomi dan sosial masyarakat seiring dengan dinamika global, nasional, regional yang terjadi.
2. Optimalisasi belanja pembangunan, menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan bahwa setiap anggaran pembangunan digunakan secara lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. Belanja pembangunan diarahkan pada program prioritas yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta penguatan layanan dasar.
3. Mendorong produktivitas tinggi, berfokus pada peningkatan kinerja sektor ekonomi daerah melalui penguatan sektor perdagangan, jasa, digital dan UMKM, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Upaya ini dilakukan melalui inovasi, pemanfaatan teknologi, peningkatan keterampilan tenaga kerja, penciptaan iklim investasi yang kondusif, serta penguatan ekosistem ekonomi kreatif dan digital.

Prioritas pembangunan Kota Bekasi Tahun 2027 disusun berdasarkan penahapan pembangunan dalam RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 dan mempertimbangkan prioritas Nasional dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2027. Selain itu, prioritas pembangunan ini juga disusun dengan menerapkan konsep THIS, yaitu:

1. Tematik, disesuaikan dengan isu strategis dan tema pembangunan
2. Holistik, menyelesaikan permasalahan secara komprehensif dari hulu sampai hilir
3. Integratif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan
4. Spasial, mengacu pada kebijakan penataan ruang dan kebijakan kewilayahan

4.2.4 KETERKAITAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL, PROVINSI JAWA BARAT DAN KOTA BEKASI

Mengingat perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, maka Kota Bekasi berupaya untuk berkontribusi terhadap pencapaian prioritas nasional dan Provinsi Jawa Barat. Keterkaitan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

4.3 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

4.3.1 ARAH KEBIJAKAN NASIONAL

Untuk mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional, serangkaian arah kebijakan telah ditetapkan dalam RPJMN. Rangkaian arah kebijakan tersebut, ditampilkan pada tabel berikut.

4.3.2 ARAH KEBIJAKAN PROVINSI JAWA BARAT

Pada konteks Provinsi Jawa Barat, arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2027 yang dijabarkan pada tabel berikut.

4.3.3 ARAH KEBIJAKAN KOTA BEKASI

Adapun arah kebijakan pembangunan Kota Bekasi sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 seperti pada tabel dibawah ini.

4.4 PROGRAM PRIORITAS KOTA BEKASI TAHUN 2027

Program Prioritas Kota Bekasi Tahun 2027 merupakan program yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan serta diselaraskan dengan tema dan prioritas pembangunan. Program prioritas tersebut seperti pada tabel dibawah ini.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN

Program Perangkat Daerah merupakan kumpulan seluruh program yang menjadi tanggung jawab PD di Kota Bekasi. Rencana Program Perangkat Daerah ini merupakan program untuk mencapai kinerja pembangunan daerah tahun 2027 sebagai upaya untuk menjaga kesinambungan pembangunan tahunan daerah dengan pembangunan jangka menengah daerah yang menjadi tanggung jawab kepala daerah.

5.2 RENCANA DUKUNGAN PROGRAM TERHADAP PENCAPAIAN TARGET NASIONAL, PROVINSI JAWA BARAT DAN KOTA BEKASI

5.2.1 PROGRAM STRATEGIS NASIONAL

Program Strategis Nasional (Pro-SN) adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, Pro-SN menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah dalam menyelaraskan kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan agar mendukung agenda strategis nasional secara terpadu dan berkelanjutan. Dukungan Kota Bekasi terhadap Pro-SN Tahun 2027 seperti pada tabel berikut.

5.2.2 ASTA CITA

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045 perlu sinkronisasi perencanaan antara pusat dan daerah, prioritas daerah harus mendukung prioritas nasional. Prioritas nasional merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden, dimana Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas presiden yang mencakup rencana pembangunan diberbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC). Dukungan Kota Bekasi terhadap pencapaian Asta Cita Tahun 2027 seperti pada tabel di bawah ini.

5.2.3 PRIORITAS PROVINSI JAWA BARAT

Selain berkontribusi terhadap pencapaian target nasional, Kota Bekasi juga berupaya untuk berkontribusi terhadap pencapaian prioritas Provinsi Jawa Barat. Kontribusi Kota Bekasi terhadap pencapaian prioritas Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Program prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2027. Program prioritas Kota Bekasi beserta pagu indikatif (merupakan sigma pagu subkegiatan yang paling dominan berkontribusi terhadap program prioritas) dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

5.3 RENCANA DUKUNGAN PROGRAM KOTA BEKASI TERHADAP TEMATIK PEMBANGUNAN

Selain berkontribusi terhadap Pro-SN dan Asta Cita, Kota Bekasi juga berupaya untuk melaksanakan tematik pembangunan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Dukungan Kota Bekasi terhadap tematik pembangunan seperti pada tabel di bawah ini.

5.4 RENCANA DUKUNGAN PROGRAM KOTA BEKASI TERHADAP PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN NASIONAL

Selain berkontribusi terhadap Pro-SN dan Asta Cita, dan tematik pembangunan, Kota Bekasi juga berupaya untuk mendukung pembangunan kewilayahan sebagaimana yang tertuang dalam RKP Tahun 2027. Dukungan Kota Bekasi terhadap pembangunan kewilayahan

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

6.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 dan diperoleh dari indikator tujuan/sasaran yang terseleksi. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kota Bekasi tersebut, maka target IKU Kota Bekasi Tahun 2027 disampaikan pada tabel berikut.

6.2 INDIKATOR KINERJA DAERAH

Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup indikator makro pembangunan dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah.

BAB VII PENUTUP

RKPD Kota Bekasi Tahun 2027 merupakan penjabaran tahun ketiga dari RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029. RKPD Kota Bekasi tahun 2027 ini mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program/kegiatan/subkegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab, yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bekasi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depannya;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh Wali Kota untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2027;
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah kota yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; dan
4. Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam merealisasikan program/kegiatan/subkegiatan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

RKPD Kota Bekasi Tahun 2027 merupakan acuan bagi setiap Perangkat Daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha, sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pemerintah. Untuk itu, kaidah pelaksanaan RKPD Kota Bekasi Tahun 2027 ini adalah sebagai berikut:

1. Setiap Perangkat Daerah serta masyarakat termasuk dunia usaha di lingkungan Kota Bekasi berkewajiban untuk melaksanakan program/kegiatan/subkegiatan RKPD Tahun 2027 dengan sebaik-baiknya;
2. Bagi setiap Perangkat Daerah, RKPD Tahun 2027 ini merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2027. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan setiap program/kegiatan/subkegiatan dalam rangka koordinasi perencanaan, masing-masing Perangkat Daerah perlu membuat Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2027 sebagai berikut:
 - a. Uraian rencana penggunaan APBD Tahun Anggaran 2027 merupakan program/kegiatan/subkegiatan yang dipergunakan untuk mencapai prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam kerangka regulasi sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
 - b. Uraian rencana penggunaan APBD Tahun Anggaran 2027 merupakan program/kegiatan/subkegiatan yang dipergunakan untuk mencapai prioritas pembangunan daerah yang tercermin dalam kerangka anggaran sesuai dengan kewenangannya; dan

- c. Uraian sebagaimana yang dimaksud butir kedua di atas, perlu juga menguraikan kewenangan pengguna anggaran yang bersangkutan;
3. Setiap Perangkat Daerah dengan dikoordinasikan oleh Bapperida, sebagaimana yang dimaksud butir b di atas, merumuskan matriks rencana tindak lanjut untuk setiap bidang urusan pembangunan (matriks rencana tindak lanjut menjadi lampiran dari setiap bidang urusan pembangunan) yang menjadi lampiran dokumen RKPD Kota Bekasi Tahun 2027;
 4. Masyarakat Kota Bekasi dapat berperan serta seluas-luasnya dalam proses perancangan dan perumusan kebijakan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan, yang nantinya akan dituangkan dalam peraturan daerah. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat luas dan dunia usaha dapat berperan serta dalam pembangunan yang direncanakan melalui program/kegiatan/subkegiatan pembangunan berdasarkan rancangan peran serta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan/subkegiatan pembangunan;
 5. Dalam menyusun Renja Perangkat Daerah, setiap Perangkat Daerah wajib melakukan penjarangan aspirasi masyarakat dan dunia usaha dalam forum-forum konsultasi, dengar pendapat publik, dan forum lintas pelaku sesuai dengan kebutuhannya masing-masing; dan
 6. Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Walikota tentang RKPD Kota Bekasi Tahun 2027.

Berdasarkan uraian di atas, maka RKPD Kota Bekasi Tahun 2027 menjadi landasan penyusunan KUA-PPAS dan RAPBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2027 dan dalam rangka melaksanakan tahun ketiga RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029. Dengan kaidah dan prinsip yang telah diuraikan, diharapkan pembangunan di Kota Bekasi dapat berjalan dengan baik, lancar, dan transparan.

WALI KOTA BEKASI,

Ttd

TRI ADHianto TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 3 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

JUNAEDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2026 NOMOR 10